



GOOD CORPORATE
GOVERNANCE

ERICK THOHIR, MENTERI BUMN:

GCG JANGAN HANYA LIPSSERVICE

HALAMAN
20

AGI-IKAGI RUMUSKAN SOLUSI
TANTANGAN INDUSTRI GULA

HALAMAN
25

TEBAKAU, SI DAUN EMAS
YANG KIAN BERNAS



PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
www.ptpn10.co.id | email: contact@ptpn10.co.id

 PT Perkebunan Nusantara X |  @ptpnx

Visi

Menjadi perusahaan agribisnis Nasional berbasis tebu dan tembakau yang unggul dan berdaya saing di tingkat Regional.

Misi

Sebagai perusahaan industri perkebunan terintegrasi yang berbasis tebu dan tembakau dalam memberikan nilai tambah (value creation) bagi segenap stakeholders dengan:

1. Menghasilkan produk perkebunan yang bernilai tambah serta berorientasi kepada konsumen.
2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tatakelola perusahaan yang baik;
3. Mengembangkan kapabilitas organisasi, teknologi informasi dan SDM yang prima.
4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik bagi pemegang saham.
5. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

Kebijakan Mutu

Perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis nasional berbasis tebu dan tembakau berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dengan:

- ★ Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan internal perusahaan PTPN X kepada seluruh unit usaha dan atau anak perusahaan PTPN X dalam rangka menghasilkan produk perkebunan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi demi peningkatan kepuasan pelanggan, stakeholder, dan shareholder.
- ★ Mendorong terwujudnya keunggulan proses kerja melalui efisiensi, diversifikasi, dan optimalisasi dilandasi corporate value: Sinergi, Integritas, Profesional (SiPro) dalam upaya meningkatkan daya saing dan sustainability dengan tetap mengedepankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.



tim
Redaksi

PENANGGUNG JAWAB

Dwi Satriyo Annurogo

PEMIMPIN UMUM

Lutfil Hakim

PEMIMPIN REDAKSI

Suryanto

REDAKTUR PELAKSANA

Cindy P Larashati

Maria Putri

DEWAN REDAKSI

Soetono Effendi BU

Bambang Sapto Adjie

Maria Putri

Cindy P Larashati

SEKRETARIS REDAKSI

Cindy P Larashati

REPORTER

Sekar Arum Catur Murti

SAP Jayanti

Siska Prestiawati Wibisono

FOTOGRAFER

Eko Suswantoro

ARTISTIK

D Angger Putranto

KEUANGAN

Maria Putri

ALAMAT REDAKSI, IKLAN, SIRKULASI

PT Perkebunan Nusantara X

Jl. Jembatan Merah No. 3-11

Surabaya 60175

Telepon: (031) 3523143

Fax: (031) 3557574

email: redaksiptpnx@ptpn10.co.id



OPTIMISME 2020

BANK Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 tetap di atas 5%. Kongkritnya di kisaran 5,1%. Perkiraan World Bank yang dirilis Desember 2019 ini setidaknya bisa menjadi *benchmarking* bagi asumsi Indonesia's Economic Growth 2020 yang ditarget oleh Kementerian Keuangan RI sebesar 5,3%.

Artinya target Kemenkeu di angka 5,3% bukanlah asumsi yang *overestimate*, meski tren perekonomian global sedang berada pada situasi yang berat. Bahkan International Monetary Fund (IMF) memberi sinyal alarm bahwa ekonomi dunia 2020 memasuki tahap genting. IMF memprediksi ekonomi dunia hanya tumbuh di kisaran 3,2 – 3,4%.

Prediksi World Bank ini menjadi penting, mengingat beberapa lembaga kajian domestik justru *under-estimate* terhadap perekonomian Indonesia 2020, dan secara jelas dikatakan sulit bisa tumbuh 5%. Ada beberapa alasan yang menjadi asumsinya, diantaranya defisit APBN 2020 yang Rp 307 triliun berpotensi memperlemah target realisasi GDP (PDB) serta besarnya utang RI, dan beberapa alasan lain yang terkait dengan perubahan kebijakan ekonomi dunia.

Bakal melambatnya ekonomi China akibat perang dagang vs Amerika Serikat, merupakan salah satu poin yang menjadi asumsinya. China sangat mungkin mengurangi impor batu bara dari Indonesia – dalam kerangka *global economic defence* –nya. Padahal selama ini ekspor batubara ke China mencapai 120-130 juta MT atau sekitar 25% pangsa ekspor batubara Indonesia.

Selain itu, rancangan regulasi energi Uni Eropa yang dinamakan *Renewable Energy Directives II* (RED II) akan menghadang CPO Indonesia. Meski penerapannya baru dimulai 2021, tapi tren penurunan ekspor CPO ke Eropa sudah terasa sejak dua tahun terakhir. Sementara UE sendiri seolah telah menutup rapat kemungkinan dibahasnya nasib sawit Indonesia dalam forum IEU – CEPA (Indonesia European Union Comprehensive

Economic Partnership Agreement).

Pada konteks kedua komoditas itu saja (batubara dan sawit) seolah beban ekonomi Indonesia ke depan juga akan berat. Namun World Bank tidak terpengaruh dengan sederet variabel pengaruh tersebut, dan tetap meyakini prediksinya bahwa ekonomi Indonesia 2020 bakal tumbuh minimal 5,1%. Meski demikian World Bank tetap mengingatkan perlunya Indonesia melakukan reformasi kebijakan untuk mendorong investasi dan kenaikan produksi.

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak aksi dalam kerangka reformasi kebijakan sebagai antisipasi situasi ekonomi ke depan, diantaranya mengajukan revisi sejumlah UU melalui paket RUU *Omnibus law*. Sedikitnya ada 60 peraturan & perundangan yang akan dibahas di Baleg DPR RI – dalam kerangka *Omnibus law*, sebagian besar terkait dengan urusan investasi dan ketenagakerjaan.

Presiden Jokowi sendiri juga sudah berulang kali mengingatkan kalangan penegak hukum agar mempertimbangkan kepentingan pembangunan daripada sekedar aspek kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pelaksana pemerintahan ((Kementerian, Provinsi, Kabupaten. Kota) dalam menjalankan program kerjanya. Terutama yang terkait dengan program stimulasi bagi peningkatan investasi, khususnya infrastruktur. Pemda juga diminta oleh Presiden untuk menghentikan membuat Perda baru, bahkan Perda lama disederhanakan agar bisa mendorong investasi.

Presiden selalu mengingatkan semua elemen pemerintahan, termasuk BUMN untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG (*good corporate governance*) dalam menjalankan program kerjanya, agar tercipta tatakelola yang profesional, guna memperoleh hasil yang maksimal. Karena hanya dengan cara-cara itu ekonomi Indonesia di 2020 dan selanjutnya bisa tetap kuat dan optimistis. ■

Redaksi

AWARDED MAGAZINE



■ **emplasemen** | 01■ **varietas**

Terus Ukir Prestasi, PTPN X Kembali Raih Tiga Penghargaan | 06

PTPN X Raih Dua Penghargaan IBA 2019 | 07



PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia BusinessAward 2019. Penghargaan yang di terima langsung oleh Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo meliputi The Best CEO in Agro Industry 2019 dan The Best Corporate Performance in Agro Industry 2019. Ajang yang mengambil tema 'Business Transformation for Excellence Performance' ini diselenggarakan di Gedung BPPT, Jakarta (11/6).

PTPN X Tanam Perdana Lahan Agroforestry di Nganjuk | 08

PTPN X Tanam Perdana di HGU Ngusri | 09

PTPN X dan Perhutani Kelola Agroforestry di Bojonegoro | 10

Agroforestry Jelu Ditarget 4.200 Ton | 11

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X mulai menanam lahan agroforestry yang berada di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Lahan seluas 26 Ha ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap produksi gula PTPN X.

Jajaki Pasar Asia, PTPN X Ikuti WTA 2019 | 12

■ OPTIMALISASI ASET PTPN X

Kafe Kali Kopi, Tempat Nongkrong Kekinian | 13

■ OPTIMALISASI ASET PTPN X

PG Toelangan Disiapkan Jadi Destinasi Wisata di Sidoarjo | 14

PTPN X Jadi Tuan Rumah Pelatihan IPS | 15

Direksi Holding Tinjau Kesiapan Giling 2020 | 16

PTPN X dan PT SEI Berencana Bangun PLTS | 17

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia BusinessAward 2019. Penghargaan yang di terima langsung oleh Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo meliputi The Best CEO in Agro Industry 2019 dan The Best Corporate Performance in Agro Industry 2019. Ajang yang mengambil tema 'Business Transformation for Excellence Performance' ini diselenggarakan di Gedung BPPT, Jakarta (11/6).

■ TINJAU SEJUMLAH ASET

Direksi Rancang Strategi Pengembangan | 18

■ DIRUT PTPN X:

Kita adalah 'Keluarga Besar' | 19

■ NATIONAL SUGAR SUMMIT

AGI-Ikagi Rumuskan Solusi Tantangan Industri Gula | 20

■ HADAPI DINAMIKA BISNIS

PTPN X Lakukan Restrukturisasi Organisasi | 22

PT ENERO Operasikan Dua Boiler Baru | 24

Tembakau, Si Daun Emas yang Kian Bernas | 25

■ KULIAH LAPANG PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

Berburu Ilmu Kelola Limbah Agroindustri Di Golden Leaf House | 26

Gembleng Karyawan Bagian Pengolahan di Pusdik Arhanud | 27

sukrosa

38

MENTERI BUMN ERICK THOHIR:

GCG Jangan Hanya Lip Service

Baru tiga hari ditunjuk sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir sudah 'membunyikan alarm' dengan statement pedas yang diarahkan pada tata cara kelola Badan Usaha Milik

Negara. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan secara benar dan sungguh-sungguh. Bukan sekedar, apalagi lip service.



GCG Kunci Keberhasilan Bisnis Global | 43

Sebagai bagian dari keluarga besar BUMN, PT Nusantara Nusantara (PTPN) X harus menjalankan gerak perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam menerapkan dan menjalankan program Good Corporate Governance (GCG) dalam membangun dan mengembangkan perusahaan di era kompetisi global ini.

Berbagai Instrumen Kawal Penerapan GCG | 45

Komitmen, Jadi Modal Utama GCG | 47

Komitmen PTPN X dalam Penerapan GCG | 49

Susun dan Ciptakan SOP Optimalisasi Aset | 50



Holding Perkebunan Targetkan Laba Sektor Gula Rp 53 Milliar | 28

PP (Persero) Support Pelatihan Petani Tebu Millennial | 29

BUMN HADIR UNTUK NEGERI

PTPN X Bedah Rumah dan Bangun 11 MCK | 30

Bangun Masjid Al-Fitrah | 31

Sinergi dengan Tiga BUMN, PTPN X Bedah
Rumah Warga Klaten | 32

PG Kremboong 'Peduli' Rumah Warga Tidak
Layak Huni | 33



rendemen

INVESTASI

Investasi, Jadi Konsep
Pendanaan PTPN X di Masa
Depan | 34

tebu

Gaet Pihak Ketiga untuk Optimalkan Potensi Aset | 36

Banyaknya aset milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang belum dimanfaatkan membuat Tim Optimalisasi terus melakukan terobosan. Salah satunya terus gencar mencari dan menggaet pihak ketiga untuk bekerjasama memanfaatkan aset yang ada.



lunas

Semakin Agresif Garap Pasar Ritel | 52

Semakin berkembangnya sektor konsumsi ikut mengerek industri kemasan utamanya yang berkaitan dengan bidang makanan dan minuman. Melihat hal tersebut, PT Dasplast Nusantara tidak ingin ketinggalan untuk ikut bermain di sektor tersebut.

filter

ERICK THOHIR

Dari Basketball
hingga Menteri | 54



okra

Sekilas Tentang Hukum Pertanahan

■ UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960 | 56

stetoskop

KLINIK ESTETIKA MEDITAMA

Hadirkan Peralatan
Kecantikan Berteknologi
Tinggi | 60

Melakukan perawatan di klinik estetika saat ini sudah menjadi kebutuhan banyak wanita terutama di kota besar. Karena alasan kesibukan, terapi estetika yang hemat waktu namun bisa memberi hasil instan semakin dicari. Menjawab hal tersebut, kini semakin banyak klinik yang menawarkan solusi mempercantik kulit secara cepat dan tanpa rasa sakit. Jawabannya ada pada perawatan kecantikan menggunakan teknologi tinggi.



nira

Si Kenyal yang Punya Banyak Penggemar | 62



prof-it

Mengenal Jaringan
5G dan Dampaknya
Terhadap Kesehatan | 64

Apa itu 5G? Yang jelas jangan menanyakan pada mereka yang tidak pernah menggunakan ponsel ya. Sudah pasti asing bagi mereka. Bagi para pengguna ponsel masa kini saja, mungkin hanya sebagian kecil yang bisa mendefinisikan dengan benar apa sebetulnya yang dimaksud dengan 5G. Lalu setelah kita mengetahuinya, apakah teknologi tersebut memiliki dampak besar bagi tubuh kita?



KRISTALISASI



Diplomasi Sawit | 66

Bagaimana cara menghadapi ancaman Uni Eropa (UE) terhadap CPO Indonesia – khususnya untuk bahan baku biofuel atau biodiesel yang ditetapkan nol persen dari unsur minyak sawit – yang pemberlakuannya dijadwalkan mulai 2021. Ancaman UE ini sebagai putusan turunan dari hasil Resolusi Sawit oleh Parlemen UE.

LORONG ASPIRASI ...





■ PTPN X menerima tiga penghargaan yakni Top Leader on Digital Implementation 2019, Top Digital Implementation on Agriculture Sector 2019 Level Star 4, dan Top Digital on Agriculture – e-Farming & Investani.

Terus Ukir Prestasi, PTPN X Kembali Raih Tiga Penghargaan

■ LAPORAN: CINDHY LARASHATI

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X kembali meraih penghargaan. Kali ini, PTPN X menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam ajang TOP Digital Award 2019. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo dan Direktur Operasional PTPN X, Aris Toharisman, di Jakarta (27/11). Tiga penghargaan yakni Top Leader on Digital Implementation 2019, Top Digital Implementation on Agriculture Sector 2019 Level Star 4, dan Top Digital on Agriculture – e-Farming & Investani.

“PTPN X selalu memperbaiki kinerjanya setiap tahun. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan usaha dari seluruh karyawan PTPN X dan juga dukungan dari seluruh stakeholder. Kami mengucapkan

kan terima kasih atas apresiasi dan kepercayaan yang diberikan kepada PTPN X,” terang Dwi.

Berhasilnya PTPN X dalam menyabet Top Digital on Agriculture – e-Farming dan Investani, merupakan salah satu bukti bahwa PTPN X selalu berusaha memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholder khususnya petani. Melalui beberapa program unggulan antara lain e-Farming dan Investani. e-Farming adalah aplikasi pendaftaran lahan dan monitoring kemajuan pekerjaan kebun melalui website dan mobile application (android) yang didukung dengan

teknologi GIS dan satelit.

Selain itu, PTPN X juga memiliki program terbaru yakni Investani.

Investani merupakan program investasi dalam bentuk lahan perkebunan wilayah kerja PTPN X. Para investornya adalah karyawan internal dan anggota koperasi karyawan PTPN X, serta Holding Perkebunan Nusantara. Program Investani dan e-Farming ini menjadi langkah awal PTPN X untuk memasuki era industri 4.0.

“PTPN X senantiasa fokus pada perkembangan teknologi informasi sebagai bentuk peningkatan SDM dan komitmen kami untuk mewujudkan SDM yang unggul dan Indonesia yang lebih maju,” tambah Dwi. ■

“PTPN X SENANTIASA FOKUS PADA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BENTUK PENINGKATAN SDM DAN KOMITMEN KAMI UNTUK MEWUJUDKAN SDM YANG UNGGUL DAN INDONESIA YANG LEBIH MAJU.”

■ **Dwi Satriyo Annurogo**
DIREKTUR UTAMA PTPN X

PTPN X Raih Dua Penghargaan IBA 2019

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia BusinessAward 2019. Penghargaan yang di terima langsung oleh Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo meliputi The Best CEO in Agro Industry 2019 dan The Best Corporate Performance in Agro Industry 2019. Ajang yang mengambil tema 'Business Transformation for Excellence Performance' ini diselenggarakan di Gedung BPPT, Jakarta (11/6).

■ LAPORAN: CINDHY LARASHATI

INDONESIA BusinessNews Award merupakan ajang perlombaan yang diselenggarakan oleh majalah BusinessNews Indonesia bekerjasama dengan Dewan Riset Nasional (DRN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan didukung oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia (Kemenristek/Brin). Tujuan digelarnya acara ini adalah memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di era bisnis 4.0.

Dalam ajang ini, PTPN X berkesempatan memaparkan ide dan gagasan tentang penerapan visi misi,

strategi pertumbuhan, pengelolaan Human Capital, hingga pengembangan inovasi dan transformasi bisnisnya. Dwi dalam paparannya menjelaskan mengenai angka-angka kinerja, pencapaian, dan *stakeholder relations* yang telah dilakukan oleh PTPN X.

"PTPN X selalu memperbaiki kinerjanya setiap tahun. Penghargaan yang telah diraih ini merupakan sumbangsih dari seluruh karyawan PTPN X. Penghargaan ini tentunya juga didapatkan atas dukungan seluruh *stakeholder*," terang Dwi dalam sambutannya.

Sebagai salah satu anak perusahaan dari PTPN III (Persero) dan juga sebagai *leading company* dalam

industri gula di Indonesia, PTPN X selalu berupaya berkontribusi maksimal dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga kesejahteraan *stakeholder*, khususnya petani tebu. Melalui beberapa program yang telah dilakukan antara lain: *e-Farming*, Pelatihan petani tebu milenial, pemberian bantuan pupuk dan bibit, hingga pemberian Kartu Tani Sehat kepada 6.000 orang petani binaan.

"PTPN X akan terus bekerja dengan menjunjung nilai Sinergi, Integritas, dan Profesional sehingga target-target perusahaan dapat tercapai. Tentunya, diimbangi dengan kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat," tambah Dwi. ■



■ Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo (dua dari kiri) menerima penghargaan di acara Indonesia Business News Award 2019.



■ Direktur Operasional PTPN X, Aris Toharisman (5 dari kanan) dan seluruh jajaran melakukan penanaman perdana lahan Agroforestry di Nganjuk.

PTPN X Tanam Perdana Lahan Agroforestry di Nganjuk

PTPN X kembali melakukan tanam perdana di lahan Agroforestry wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Lestari Nganjuk pada Kamis (31/10/2019). Program Agroforestry kali ini bekerjasama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jombang.

■ LAPORAN: SEKAR ARUM

PENANAMAN dilakukan di lahan seluas 40,275 Ha, yang terdiri dari tiga petak yang tersebar di RPH Ngujung, BKPH Ngujung Barat, dan KPH Jombang, Kebun Sanggrahan, Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Lahan agroforestry tersebut ditanami varietas unggul baru, dengan potensi produksi 80 ton per ha dan rendemen 9%.

Nantinya hasil dari program Agroforestry di Nganjuk ini akan dikelola langsung ke PG Lestari pada musim giling tahun 2020. Sehingga diharapkan dapat menyokong kontinuitas pasok Bahan Baku Tebu (BBT) di PG Lestari.

Tanam perdana ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara PTPN X dengan Perum Perhutani Divisi Re-

gional Jawa Timur untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya tanaman tebu guna mendukung ketahanan pangan. Kerja sama tersebut terkait dengan pengerjaan lahan Perum Perhutani untuk kegiatan



penanaman Agroforestry tebu seluas 5.661,5 Ha dan telah mendapat persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017.

Direktur Operasional PTPN X, Aris Toharisman, mengatakan, ber-

dasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program BUMN Sinergi Agroforestry tebu musim giling 2019, PG Lestari menorehkan cacatan yang sangat membanggakan yakni dengan hasil produksi tertinggi sebesar 72,2 Ton/ Ha dengan Rendemen 8,64%.

“Hal ini sungguh sangat membanggakan. Namun ada beberapa catatan yang harus mendapat perhatian khusus salah satunya bagaimana prestasi ini dapat terus bertahan,” kelakar dia.

Ditambahkan Aris, untuk mencapai target produksi di tahun 2020 mendatang, PG Lestari telah melakukan berbagai upaya antara lain pengawalan tenaga ahli pertanian, kerjasama dengan *provider* untuk pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan *Land Preparation* sampai dengan kultivasi perawatan kebun penggunaan varietas bina unggul, mengoptimalkan masa tanam, penerapan teknologi pertanian, investasi sumur bor untuk pemberian di musim kemarau, sinergi *stakeholder*, akademisi, instansi pemerintah dan swasta. ■



■ Dirut PTPN X Dwi Satriyo Annurogo, Dirops PTPN X Aris Toharisman bersama karyawan di acara tanam perdana HGU Ngusri Blitar.

PTPN X Tanam Perdana di HGU Ngusri

Pada tahun 2020, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X akan fokus pada pengembangan lahan. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari *agroforestry* bekerjasama dengan Perum Perhutani, pembukaan lahan HGU (Hak Guna Usaha), serta kerjasama dengan petani.

■ LAPORAN: SAP JAYANTI

SETELAH 2019 ini berfokus pada peningkatan kompetensi SDM, pada 2020 nanti PTPN X akan *concern* pada ekstensifikasi lahan. "Kenapa ekstensifikasi? Mau tidak mau, kita memang harus melakukannya karena lahan tanaman tebu terus menyusut. Kalaupun ada, produktivitasnya mengalami penurunan. Kami ingin HGU Ngusri ini menjadi *pioneer*, etalase atau percontohan. Di sini nantinya akan ditanam 16 varietas unggul baru seperti NX 01, NX 02, NX 03 serta varietas dari Brazil. Mudah-mudahan bisa segera dirilis karena ini menjadi masa depan industri gula kita. Kalau kita tidak *concern* terhadap lahan dan varietas, maka semakin tahun produksi yang dihasilkan juga akan semakin menurun," kata Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo.

Di lahan HGU Ngusri yang berada di Dusun Putuk Rejo, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar ini, PTPN X mulai melakukan tanam

perdana Kebun Bibit Datar (KBD) seluas 18,5 Ha pada pertengahan Oktober lalu. Lahan yang baru saja resmi menjadi milik PTPN X pada Juli 2019 lalu tersebut memiliki total luasan 298 Ha di mana sebelumnya 70 Ha telah ditanami tebu. Di lahan ini nantinya secara bertahap akan dikembangkan lagi menjadi tanaman tebu seluas 210 Ha. Bibit yang telah ditanam ini rencananya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tanam *plant cane* pada bulan Mei - Juni 2020.

Varietas yang digunakan untuk tanam perdana yaitu MOJO 01 memiliki potensi produktivitas lebih dari 110 Ton/Ha dan rendemen di atas 9,5 persen. Lahan HGU ini akan dikelola langsung oleh Pabrik Gula (PG) Ngadiredjo Kediri. "Kami optimis dengan penanaman Varietas Unggul Tebu di lahan HGU Ngusri nantinya akan menghasilkan tebu yang berkualitas dan memenuhi standar Manis, Bersih, Segar (MBS) untuk digilingkan di PG Ngadiredjo," tambah Dwi.

Ia menegaskan, HGU Ngusri akan

menjadi prioritas bagi PTPN X. "Pendaan sudah kami siapkan. Di sini juga sudah disiapkan mobil komodo, motor *trail* serta truk. Akan kami fasilitasi, namun tentu hasilnya harus memuaskan," ujarnya tegas.

Tidak hanya berfokus pada kejayaan BBT semata, PTPN X juga selalu berupaya menjaga lingkungan dalam setiap penerapan proses bisnisnya. Penanaman lahan ini menerapkan prinsip *zero burning* saat proses *land clearing*, sehingga timbulnya kabut asap yang berimbas pada pemanasan global dapat diminimalisir. Selain melakukan tanam perdana untuk bibit, pada lahan ini juga akan dilakukan percobaan observasi varietas (OBVAR) dengan melakukan penanaman 16 klon varietas unggul harapan dengan tujuan untuk mengetahui potensi tebu pada lahan tersebut.

GM PG Ngadiredjo, Abdul Munib mengatakan, untuk tahun 2018/2019 sudah dilakukan panen dengan luasan kurang lebih 30,4 Ha dan menghasilkan 1.352 ton tebu dengan rendemen 9,83 persen sehingga total keuntungan bersih yang didapatkan dari tebu sebesar Rp 930 juta. Dari tanaman kopi yang sudah dipanen didapatkan biji kopi seberat 13,1 ton dengan penghasilan Rp 40 juta. Sementara dari tanaman karet Rp 55 juta, sengon Rp 15 juta. Sehingga di 2019 ini menghasilkan kurang lebih Rp 1 Miliar lebih yang digunakan sebagai modal utama untuk *land clearing* dan lain-lain.

"Berikutnya saya bercita-cita untuk membenahi infrastruktur jalan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, untuk musim tanam 2020-2021 harus ada percepatan sesuai dengan instruksi Dirut agar ada penanaman seluas 210 Ha. Untuk itu kami mohon *support* pada *land clearing* selanjutnya," tutur Munib.

Lukas Supriyatno dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar menambahkan, tanam perdana HGU Ngusri diharapkan bisa menjadi salah satu penopang swasembada gula. "Kami pesan untuk peningkatan produktivitasnya, karena luas lahan kita tidak akan bertambah tapi justru semakin menurun," kata Lukas. Ia juga meminta agar kehadiran PTPN X juga ikut menjaga kelestarian alam di sekitarnya serta membantu meningkatkan kesejahteraan warga. ■

PTPN X dan Perhutani Kelola Agroforestry di Bojonegoro

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menjalin kerja sama dengan Perum Perhutani untuk membuka lahan baru di Bojonegoro. Upaya ini dilakukan untuk budidaya tanaman tebu guna mendukung ketahanan pangan nasional.



■ Dirut PTPN X Dwi Satriyo Annurogo dan Adm KPH Bojonegoro Dewanto di lahan Agroforestry Desa Jelu Bojonegoro

■ LAPORAN: SEKAR ARUM CM

DIREKTUR Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo saat melakukan kunjungan pada Kamis (3/10) mengatakan bahwa kerjasama ini terkait dengan pengerjaan lahan Perum Perhutani untuk kegiatan penanaman Agroforestry. Sesuai dengan persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017.

“Sebagai tindak lanjut dari kerjasama, pada hari ini saya melakukan kunjungan ke Lahan Perum Perhutani BKPH Clangap, KPH Bojonegoro, yang berada di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro,” ujar Dwi.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses pengerjaan lahan yang telah dimulai pada awal bulan Oktober 2019. Nantinya, lahan seluas 52,3 Ha lahan Perhutani di kawasan KPH Bojonegoro akan ditanami tebu dan dikelola langsung oleh Pabrik Gula

(PG) Djombang Baru. Lahan ini akan ditanami varietas unggul baru, dengan potensi produksi 80 Ton/ Ha dan rendemen 9 persen.

“Kerjasama terkait pengerjaan lahan Agroforestry tebu ini sebagai upaya dari PTPN X untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pasok BBT ke pabrik gula pada masa giling tahun 2020,” ungkap Dwi.

Lebih lanjut Dwi mengatakan bahwa kebutuhan gula untuk konsumsi Rumah Tangga saat ini mencapai 2,5 juta ton per tahun, sementara total konsumsi gula nasional mencapai 5,5 juta hingga 6 juta ton. Sedangkan produksi tebu dalam negeri hanya mencapai 2 juta ton per tahun.

“Jadi ini kurang banyak, dan kita mendapat tugas untuk meningkatkan produksi gula nasional. Peningkatan produksi gula tersebut tidak bisa diterjemahkan hanya dengan penambahan PG tetapi bagaimana kita mendapatkan gula sebanyak-banyaknya di kebun melalui intensi-

fikasi dan ekstensifikasi. Kalau tidak di lakukan hal ini, maka keinginan tersebut tidak bisa terealisasi. Untuk itu, kami bekerjasama dengan Perhutani untuk budidaya tebu. Dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat. Karena kalau ada kegiatan tebu, berarti ada kegiatan ekonomi,” terangnya.

Untuk perluasan tersebut, PTPN X mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan seluas 5.661,5 hektar yang tersebar di Bojonegoro, Jombang, Mojokerto dan Blitar. “Ini 423 hektar, masih kecil dari target. Ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat,” ujarnya.

Sementara di tahun 2018 lalu, PTPN X telah melakukan penanaman seluas 223 Ha yang berada di kawasan KPH Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, dan Blitar. Di kawasan KPH Jombang seluas 108 Ha yang dikelola oleh PG Lestari. Selanjutnya, akan ada pengerjaan lahan di kawasan KPH Mojokerto seluas 253 Ha yang akan dikelola oleh PG Gempolkrep.

“Kerjasama ini merupakan sinergi BUMN dengan Perum Perhutani dan merupakan tugas Negara berdasarkan SKB 4 Menteri sebagai wujud BUMN Hadir Untuk Negeri, karena kegiatan Agroforestry tebu memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” tambah Dwi.

Pada kesempatan yang sama, Adminisratur KPH Bojonegoro, Dewanto mengatakan bahwa kerjasama agroforestry ini sejalan dengan misi Perhutani, yaitu *Planet, People* dan *Profit*. “Ini tidak murni bisnis tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kita juga jaga aset negara. Kenapa pemerintah menetapkan tebu, karena situasinya seperti ini biar nilai bisa ditingkatkan,” pungkask Dewanto. ■

Agroforestry Jelu Ditarget 4.200 Ton

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X mulai menanam lahan agroforestry yang berada di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Lahan seluas 26 Ha ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap produksi gula PTPN X.

■ LAPORAN: SAP JAYANTI

SINERGI antara PTPN X dengan Perum Perhutani perihal kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya tanaman tebu guna mendukung ketahanan pangan dilakukan sejak Oktober 2017. Kerjasama ini terkait dengan pengerjaan lahan Perum Perhutani untuk kegiatan penanaman Agroforestry tebu seluas 5.661,5 Ha dan telah mendapat persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017.

Direktur Operasional PTPN X Aris Toharisman mengatakan, perluasan lahan perlu terus dilakukan mengingat areal tanam tebu di Jawa Timur terus mengalami penurunan secara signifikan. "Dalam lima tahun terakhir areal

tanam tebu di Jatim berkurang 27 ribu Ha. Ini mungkin juga berkaitan dengan minat masyarakat menanam tebu yang semakin menurun. Karena itu, begitu kita memperoleh lahan, harus kita manfaatkan secara optimal," ujar Aris.

Ia berharap, produktivitas yang dihasilkan di lahan ini bisa lebih tinggi dibandingkan rata-rata petani. "PG PTPN ini kan menjadi pembina petani karena itu protasnya harus jauh di atas masyarakat," kata Aris. Melihat kondisi lahan yang ada, ia optimistis bisa mencapai produktivitas di atas 80 ton per Ha, atau sekitar 4.200 ton dari luas lahan 52,3 Ha.

"Lahannya bagus, dilihat dari warnanya cukup subur. Permasalahannya di sini mungkin air. Tapi kalau kita bisa menyediakan air, saya yakin protas bisa di atas 80. Tapi kalau hanya tadah

■ Direktur Operasional PTPN X, Aris Toharisman menyerahkan potongan tumpeng kepada perwakilan perum perhutani Bojonegoro di acara tanam agroforestry tebu di kebun Jelu PG Djombang Baru KPH.

hujan, mungkin sekitar 75 ton per Ha saja," jelasnya. Untuk itu pihaknya mengupayakan untuk mencari sumur air di sekitar area lahan. Untuk bibit tanamannya sendiri ditanam varietas NX 01 yang cocok untuk lahan tegalan.

Administratur KPH Bojonegoro, Dewanto menambahkan tanam perdana merupakan tahap kedua setelah sebelumnya dilakukan acara buka lahan. Seluas 52,3 Ha lahan Perhutani di kawasan KPH Bojonegoro akan ditanami tebu dan dikelola langsung oleh Pabrik Gula (PG) Djombang Baru.

Ia berharap lahan yang sekarang digunakan untuk menanam tebu bisa memberikan hasil yang optimal dan mampu berkontribusi pada swasembada pangan, utamanya gula. ■



■ Direktur Operasional PTPN X Aris Toharisman bersama Administratur KPH Bojonegoro dan GM PG Djombang Baru melakukan kegiatan tanam tebu Agroforestry di Kebun Jelu Bojonegoro

Jajaki Pasar Asia, PTPN X Ikuti WTA 2019

Tembakau PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X turut berpartisipasi dalam pameran World Tobacco Asia 2019 yang diselenggarakan di Grand City Mall, Surabaya pada (16-17/10). Pameran yang diadakan oleh Tobacco Jurnal Internasional, London dihadiri oleh para pelaku industri tembakau baik *cigarette* (pabrik rokok) maupun pabrik mesin pengolahan tembakau serta produsen daun tembakau dari seluruh Asia.

■ LAPORAN: VALENCIA APRILIA

WORLD Tobacco Asia (WTA) merupakan sebuah pameran berskala Internasional yang berkaitan dengan pertembakauan, mulai dari mesin pengolah tembakau hingga inovasi produk tembakau oleh industri rokok berbagai negara. WTA pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2010. Pameran ini bertujuan memperkenalkan produk tembakau serta alat mesin rokok dari berbagai belahan dunia dan mengundang para investor untuk menanamkan modal dalam industri tembakau.

Hal ini dipandang baik sebagai alternatif memperkenalkan tembakau milik PTPN X oleh Kepala Bagian Tembakau Kantor Pusat PTPN X, Aris Handoyo. Beberapa produk-produk terbaik yang telah disiapkan antara lain tembakau kering atau *raw material*, produk cerutu dan produk turunan dari tembakau.

Berharap tembakau garapan PTPN X dan Penelitian Tembakau Jember ini dapat dilirik oleh ban-

yak *buyer* baru khususnya kawasan Asia, mengingat *market* tembakau PTPN X selama ini tertuju hanya pada kawasan Eropa dan Amerika Serikat perseroan juga mulai melirik pasar di Republik Rakyat Cina yang



terus berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat.

“Pameran kali ini, merupakan kesempatan bagi tembakau PTPN X untuk dikenal dan mendapat *new buyer* pada kawasan Asia. Dengan adanya pameran ini dapat menjadikan jembatan baru untuk industri

tembakau PTPN X tembus sampai ke kawasan Asia serta memberikan edukasi terbaru mengenai kualitas pasar cerutu,” ujar Aris saat ditemui di lokasi pameran.

Selain itu, sejak tahun 2009 Tembakau PTPN X telah mengembangkan cerutu berukuran kecil atau *cigarillos* untuk diekspor, terutama ke negara-negara Eropa, seperti Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Spanyol, Italia, dan Prancis.

Dengan adanya pameran ini tembakau PTPN X diharapkan dapat menggaet para *new buyer* terutama kawasan benua Eropa dan Amerika, tanpa harus melawat ke negara-negara tersebut. Kedua, hal ini sebagai kesempatan untuk memberikan edukasi kepada market mengenai seberapa tinggi kualitas dan *taste* tembakau PTPN X yang telah diproduksi.

Ketiga, untuk menambah wawasan mengenai progress perkembangan teknologi maupun industri tembakau dunia. Dengan begitu, tembakau PTPN X akan melakukan strategi-strategi terbaru agar dapat berkontribusi lebih besar lagi dan mewarnai dunia tembakau di kelas Internasional.

“Harapan saya pameran seperti ini ke depannya dapat membawa *market* tembakau PTPN X makin dikenal oleh pangsa pasar Nasional dan Internasional, sehingga target permintaan tembakau semakin meningkat. Dengan meningkatnya permintaan diharapkan dapat memperluas areal tembakau yang menjadi salah satu wadah untuk lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi maksimal kepada Bangsa dan Negara,” tambah Aris. ■





■ Kafe Kali Kopi, warung kopi syariah

OPTIMALISASI ASET PTPN X

Kafe Kali Kopi, Tempat Nongkrong Kekinian

Akibat tutupnya Pabrik Gula (PG) Toelangan beberapa tahun yang lalu, banyak gedung dan bangunan yang terbengkalai sehingga tampak tidak terawat dan kesan “angker”. Namun, di tangan seorang pengusaha, rumah dinas yang tidak terawat dan terkesan angker tersebut berhasil disulap menjadi tempat nongkrong yang nyaman dan kekinian.

■ LAPORAN: SISKI PRESTIWATI

DUA rumah dinas milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang tepatnya berada di sebelah kiri Gedung Pertemuan PG Toelangan tampak berbeda. Rumah dinas yang khas bangunan Belanda kini berubah menjadi sebuah warung kopi yang ditata apik, lengkap dengan panggung kecil dan penampilan *live music* setiap harinya. Dua rumah dinas tersebut dipermak dan disulap oleh Beni Siswanto menjadi warung kopi keluarga yang menyediakan aneka makanan dan minuman untuk segala usia.

“Kami menyebutnya bukan kafe tetapi warung kopi syariah dengan nama Kafe Kali Kopi,” kata Beni usai acara Grand Launching Kafe Kali Kopi di Tulangan, (12/11).

Konsep warung kopi ini syariah, sambung Beni karena semua makan-

an dan minuman yang disediakan halal dan bebas dari alkohol. Selain itu, dirinya juga menerapkan konsep *open bar* dan *open kitchen*. Sehingga semua proses pembuatan makanan dan minuman pun bisa terlihat oleh konsumen.

Beni menjelaskan warung kopi syariah ini buka mulai pukul 10.00 WIB hingga 00.00 dini hari. Dan setiap hari ada hiburan *live music*. Setiap pengunjung pun bisa berkaraoke dan bernyanyi dengan iringan *live music* yang telah disediakan. “Untuk *live music*-nya setiap hari bisa dinikmati mulai pukul 19.00-22.00 WIB,” kata pengusaha kuliner ini.

Saat ditanya mengapa Beni memilih rumah dinas PG Toelangan untuk dijadikan salah satu tempat usahanya, Beni mengungkapkan bahwa setelah PG Toelangan tidak lagi giling, dirinya melihat banyak aset perusa-

haan yang menjadi mangkrak. Begitu pula dengan rumah dinas yang besar dengan halaman yang luas dibiarkan begitu saja sehingga rumah dan halaman rumah dinas tersebut tampak kotor, penuh dengan tanaman liar yang sangat lebat sehingga kesan angker dibumbui dengan cerita-cerita horor seputar pabrik gula yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini makin berasa.

“Saya cari informasi dan *Alhamdulillah* kok boleh saya sewa untuk saya buat usaha. Saya sewa selama 5 tahun,” imbuhnya.

Hanya butuh waktu kurang dari satu bulan, Beni melakukan pembangunan dan mengubah dua rumah dinas untuk disulap menjadi warung kopi syariah yang kekinian dan nyaman. “*Alhamdulillah*, kalau *weekend* jumlah pelanggan yang hadir cukup banyak, tanggal 19 Oktober 2019 kemarin jumlah pengunjung mencapai kurang lebih 600 orang,” jelas pria yang juga memiliki Panti Asuhan Al Mukhlis ini.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Umum dan Pengembangan Aset PTPN X, Wahyu P Siswosumarto menambahkan bahwa PTPN X membuka tangan bagi para pelaku usaha yang sedang membutuhkan tempat usaha. PTPN X memiliki beberapa aset yang bisa digunakan menjadi alternatif tempat usaha. Salah satu contohnya adalah Beni Siswanto, yang memanfaatkan dua rumah dinas PG Toelangan menjadi Kafe Kali Kopi sebagai tempat nongkrong dan berkumpul. ■

OPTIMALISASI ASET PTPN X

PG Toelangan Disiapkan Jadi Destinasi Wisata di Sidoarjo

Sudah tiga tahun lamanya Pabrik Gula (PG) Toelangan berhenti giling. Padahal, PG Toelangan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X ini memiliki sejarah yang panjang dan sangat menarik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong PTPN X untuk membuat destinasi baru di PG Toelangan.



■ LAPORAN: SISKI PRESTIWATI

TERGELITIK melihat aset yang tidak dimaksimalkan, Pemerintah melalui Komisi D DPRD Sidoarjo dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo berkunjung ke Kantor Pusat PTPN X untuk berkonsultasi terkait rencana pengembangan PG Toelangan untuk dijadikan destinasi wisata baru di Kabupaten Sidoarjo.

PG Toelangan ini didirikan pada tahun 1850 oleh Pemerintah Belanda dengan nama N.V. Matsechappy Tot Exploitatie de Suiker Ondernemingen Kremboong en Toelangan dan berubah menjadi N.V. Mattschappy Kremboong en Toelangan yang manajemennya berada dibawah Tiedemen Van Kerehem (T.V.K).

Ketua Komisi D DPRD kabupaten Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori mengatakan Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo melihat PG Toelangan sudah tidak lagi beroperasi lagi sejak tahun 2016 memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

“Di Sidoarjo ini, destinasi wisata masih minim dijumpai. Kami melihat potensi itu ada di PG Toelangan, untuk itu kami ingin berkonsultasi dan berkordinasi dengan PTPN X untuk mengembangkan destinasi wisata baru di eks PG Toelangan,” kata Dhamroni pada acara Rapat Konsultasi terkait Rencana Pengembangan PG Toelangan untuk dijadikan destinasi wisata di Kantor Pusat PTPN X, Jalan Jembatan Merah 3-11, Surabaya pada Selasa (26/11).

Dhamroni menambahkan kunjungan ke kantor pusat PTPN X merupakan tindak lanjut dari kegiatan kunjungan dadakan yang dilakukan DPRD kabupaten Sidoarjo ke PG Toelangan bulan lalu. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi D Ka-

bupaten Sidoarjo diterima baik oleh General Manager PG Kremboong.

“Dari kunjungan tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa PTPN X berencana untuk membangun wisata baru di eks PG Toelangan. Ini yang sangat kami harapkan selama ini, oleh sebab itu kedatangan kami guna membahas dan mendapatkan informasi terbaru mengenai hal tersebut, sebab kami akan siap dalam membantu kelancarannya,” imbuhnya.

Putra asli Tulangan ini mengungkapkan dua tahun mendatang, Pemerintah merencanakan adanya kereta api Bandara Juanda. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempersiapkan destinasi wisata baru yang terintegrasi untuk para wisatawan. Salah satunya yang diharapkan adalah wisata edukasi di PG Toelangan.

Di tempat yang sama, Kepala Di-

nas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Joko Supriadi menjelaskan saat ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tengah gencar membangun dan mempromosikan destinasi wisata baru yang terintegrasi. Bahkan telah melibatkan *travel agent* untuk bisa membantu mempromosikan destinasi wisata di wilayah Sidoarjo.

“PG Toelangan ini letaknya cukup strategis dan banyak destinasi yang bisa diintegrasikan, mulai dari wisata religi situs Medalam dan Candi Pari yang letaknya hanya 4 KM-an. Selain itu, hanya 1 KM dari PG Toelangan ada Wisata Religi Makam Mbah Jae-lani dan ada Kampung Belimbing, dan di Daerah Sudimoro tempat produksi Krupuk Rambak,” kata Joko.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Pengembangan Aset PTPN X, Wahyu P Siswosumarto menjelaskan pihaknya sangat berterima kasih atas kehadiran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mengingat Sidoarjo dulu pernah menjadi lumbung *revenue* PTPN X.

“Untuk pengembangan aset di PG Toelangan memang sudah direncanakan dan ada beberapa yang sudah dilakukan antara lain *convention hall* yang bernama Grha Toelangan yang memiliki kapasitas hingga 750 orang,” kata Wahyu.

Selama ini *convention hall* milik PG Toelangan banyak dipergunakan masyarakat Sidoarjo untuk berbagai kegiatan mulai dari pernikahan maupun kegiatan lainnya.

Dari hasil studi kelayakan tersebut, jelas Wahyu, jajaran Direksi PTPN X menilai masih banyak hal yang perlu dipertajam, selain nilai investasi yang sangat tinggi membuat direksi mengambil keputusan untuk menundanya. Namun PTPN X terus mempromosikan dan mencari pihak ketiga yang bersedia untuk bekerjasama dalam membangun PG Toelangan.

“Kami sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk bisa mengembangkan destinasi wisata baru di PG Toelangan,” pungkasnya. ■

PTPN X Jadi Tuan Rumah Pelatihan IPS

■ LAPORAN: CINDHY LARASHATI

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menjadi tuan rumah dalam Pelatihan *Integrated Procurement System* (IPS) yang diadakan oleh PTPN III (Persero) selaku *Holding* Perkebunan Nusantara (24-25/10). Pelatihan yang diselenggarakan di Kantor Pusat PTPN X ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari PTPN VII sampai PTPN XIV. Acara dibuka secara langsung oleh Direktur Operasional PTPN X, Aris Toharisman dengan didampingi Kasubdiv IT Operasional PTPN III (Persero), Budi Irawan.

Pelatihan IPS diselenggarakan guna menyamakan sistem pengadaan yang berlaku di seluruh PTPN Group, mencakup beberapa aspek mulai dari *cataloging material*, *monitoring* progres pekerjaan vendor, hingga proses *invoice*. Pada pelatihan ini, peserta diberi materi perihal aplikasi sistem manajemen material, service master, dan manajemen harga. Materi tersebut disampaikan oleh Konsultan PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI),

“Diharapkan dengan adanya aplikasi dari *Holding* terkait *procurement material* barang dan jasa ke depannya akan membuat pekerjaan PTPN Group lebih sistematis dan terkontrol dengan baik,” Ujar Aris Toharisman dalam sambutannya.

Ke depannya diharapkan adanya IPS mampu mengintegrasikan seluruh sistem pengadaan di PTPN Group dan mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Sehingga, antar PTPN dapat saling bersinergi satu sama lain. ■



“DIHARAPKAN DENGAN ADANYA APLIKASI DARI HOLDING TERKAIT PROCUREMENT MATERIAL BARANG DAN JASA KE DEPANNYA AKAN MEMBUAT PEKERJAAN PTPN GROUP LEBIH SISTEMATIS DAN TERKONTROL DENGAN BAIK,”

■ Aris Toharisman | DIREKTUR OPERASIONAL PTPN X



Direksi Holding Tinjau Kesiapan Giling 2020

Ingin meningkatkan kinerja sektor gula, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) sebagai *Holding* Perkebunan benar-benar menyiapkan langkah strategis agar giling 2020 mendatang berjalan sukses. Untuk itu, Direktur Produksi dan Pengembangan *Holding* Perkebunan tinjau langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi *real* seluruh PTPN Gula dan langkah strategis yang akan diterapkan.

■ LAPORAN: SISKI PRESTIWATI

MUSIM giling 2019 menurut *Holding* Perkebunan masih belum maksimal. Untuk itu, evaluasi dilakukan agar bisa mempersiapkan musim giling 2020 dengan lancar. Direktur Produksi dan Pengembangan *Holding* Perkebunan, Mahmudi mengungkapkan dirinya sudah berkeliling ke seluruh pabrik gula di lingkungan PTPN Gula.

“Kali ini, saya kesini (PTPN X) karena ingin melihat kondisi sebenarnya dan mendengarkan keluhan dan masukan dari seluruh pabrik gula di PTPN X,” kata Mahmudi saat kunjungan kerja di PTPN X dengan tema “Transformasi menuju Operational Excellence” di PG Kremboong, Minggu (17/11).

Mahmudi mengungkapkan *Hold-*

ing Perkebunan saat ini tengah berbenah dan ingin maju bersama seluruh anak perusahaan khususnya PTPN gula. Saat ini dari 14 PTPN terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu tiga PTPN masuk dalam kelompok *sustain* atau kuat, lima PTPN hanya mampu membayar bunga tetapi tidak mampu membayar hutang pokok, dan enam PTPN yang *unsustain* atau tidak mampu membayar bunga dan pokok hutang.

“*Unsustain* kita sudah mencapai Rp 23 Triliun dan ini harus segera dicarikan solusinya agar bisa kita kelola,” ungkap Mahmudi.

Mahmudi menambahkan seluruh PTPN harus bisa memperbaiki sisi operasional untuk bisa menciptakan kinerja sesuai dengan yang diinginkan. Selama ini, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ba-

nyak yang tidak tercapai. Bagaimana caranya agar bisa keluar dari situasi seperti ini adalah dengan perbaikan di tiga aspek, yaitu aspek operasional, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dan aspek lainnya. “Perubahan itu harus dilakukan dan memang sulit. Karena kalau tidak berubah itu akan menjadi fatal,” tegasnya.

Mahmudi menjelaskan bila PTPN masih melakukan pengelolaan seperti tahun lalu maka itu akan menjadi kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu, perubahan itu perlu meskipun sulit dan berat bahkan menyakitkan tetapi tetap harus dilakukan agar perusahaan bisa terus berkembang.

“Setelah saya berkeliling ke pabrik gula, terjadi disparitas semangat antar pabrik gula. Ini juga menjadi perhatian bagaimana agar semangat di semua pabrik gula itu sama,” imbuhnya.

Mahmudi menjelaskan luas areal tebu terus menurun, menurut catatan *Holding* Perkebunan, di tahun 2015 terdapat 216 ribu hektar lahan dan di tahun 2019 hanya tinggal 150 ribu hektar. Hal ini menjadi tantangan dan menuntut kreativitas PTPN Gula untuk meningkatkan produktivitas tebu. Selain itu, *agronomy practices* pun harus terus tingkatkan, misalnya bagaimana mengalihkan energi yang ada ke permasalahan ketepatan waktu dalam pemberian pupuk ke tanaman, jangan selalu mengurus masalah hama saja. Sebab, kalau pemberian pupuk tepat waktu, maka tanaman akan sehat dan hama pun akan berkurang dengan sendirinya.

“Yang terpenting dan harus segera dilakukan adalah DTI, yaitu *Delivery, Technology dan IT Support System*,” sebutnya.

Delivery, jelas Mahmudi adalah menghadirkan semuanya tepat waktu. Misalkan kemudahan dalam pengadaan mesin di pabrik gula. Teknologi dan *IT Support System* di lingkungan *Holding* Perkebunan harusnya sudah tuntas, mulai *on farm*, dimana sudah ada citra satelit yang bisa menunjukkan kondisi lahan secara nyata dan jelas, adanya *drone* untuk pencitraan lahan. ■

PTPN X dan PT SEI Berencana Bangun PLTS

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menggandeng PT Sientratek Energi Indonesia (SEI) dalam melakukan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Rencana pembangunan ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo dan Iskandar selaku Direktur Utama PT SEI yang dilaksanakan di Kantor Pusat PTPN X pada Rabu (16/10). PT SEI sendiri merupakan perusahaan pengembang dan penyedia jasa teknologi tenaga surya.

■ LAPORAN: VALENCIA APRILIA

PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Sinar matahari merupakan energi yang terbarukan, selalu tersedia dan tidak akan pernah habis seperti bahan bakar fosil lainnya sehingga tidak menyebabkan krisis kelangkaan energi. PLTS juga sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia. Dengan begitu, hal ini sejalan dengan komitmen PTPN X untuk selalu turut menjaga lingkungan dalam setiap menjalankan proses

bisnisnya dan juga turut serta dalam mengembangkan energi terbarukan.

Kerjasama ini menggunakan pola *Built, Operate, Transfer* (BOT) yang akan berlangsung selama 20 tahun. Apabila terdapat kelebihan dalam produksi listrik per-kWh, PTPN X berhak untuk menjual kelebihan kapasitas tersebut ke PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) dengan harga yang telah disetujui bersama.

Rencananya, pembangunan PLTS ini akan dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Kantor Pusat PTPN X Surabaya,

Kebun HGU Sumberlumbu, dan Kebun HGU Jengkol yang berada di wilayah Kediri.

“Ini merupakan komitmen PTPN X dalam pemanfaatan energi terbarukan (*renewable energy*) di Indonesia. Selain guna menjaga lingkungan, pembangunan PLTS juga mampu memberikan *benefit* bagi perusahaan jika dalam pengolahannya terdapat kelebihan kapasitas produksi listrik nantinya,” terang Dwi.

“Harapan saya, agar kerjasama ini dapat segera terealisasi karena ini akan menjadi *pilot project* untuk lokasi lainnya,” tambah Dwi.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak lahan PTPN X yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai PLTS.

PTPN X juga merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi energi-terbarukan, yaitu melalui anak usahanya PT Energi Agro Nusantara (Enero) yang mengembangkan produksi *bioethanol*. Saat ini, PT Enero juga sedang mengembangkan *ethanol multigrade*. ■



■ Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo (dua dari kanan) menyerahkan cinderamata kepada Iskandar selaku Direktur Utama PT SEI dalam acara MoU rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)



■ Direksi PTPN X meninjau beberapa aset perusahaan di wilayah kerja Kebun Tembaku Ajong Gayasan Jember.

TINJAU SEJUMLAH ASET

Direksi Rancang Strategi Pengembangan

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X tengah gencar menjalankan program optimalisasi aset yang dimiliki di tahun 2019. Untuk itu, berbagai strategi terus dilakukan agar seluruh aset perusahaan tidak menjadi *idle asset* atau beban perusahaan.

■ LAPORAN: SISKI PRESTIWATI

DIREKTUR Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo bersama Direktur Komersil PTPN X, Slamet Djumantoro melakukan kunjungan ke beberapa aset milik perusahaan yang berada di daerah Jember. Sebelum memulai lawatannya ke sejumlah titik, kedua direksi perusahaan perkebunan ini menyempatkan diri berkunjung ke Klinik Pratama Nusa Medika Ajong Gayasan yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap.

Selama di fasilitas kesehatan tingkat satu milik PT Nusantara Medika Utama (NMU), kedua direksi mendapatkan pemaparan perihal kinerja klinik yang diresmikan pada 20 Juli 2018 lalu. Kedua direksi ini bangga dan terus menebarkan senyum melihat kinerja klinik yang terus menga-

lami peningkatan.

Lawatan pertama adalah Gudang Patrang yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Desa Patrang, Kabupaten Jember. Usai melihat kondisi Gudang Patrang, perjalanan dilanjutkan menuju ke aset PTPN X yang ada di Jalan Sultan Agung, Jelbuk yang dijadikan sebagai Koperasi Karyawan (Kopkar) Kertanegara. Selama di Kopkar Kertanegara, direksi PTPN X bersama rombongan tidak hanya melihat aset, tetapi juga melihat secara langsung proses produksi cerutu yang pembuatannya masih secara manual. Tak hanya melihat proses produksi, Dwi bahkan sempat mencicipi nikmatnya cerutu yang berkualitas ekspor.

Lawatan pun berlanjut ke daerah Rembangan. Di daerah Rembangan terdapat dua titik aset yang dikunjungi, yang pertama sebuah lahan

pertanian yang tidak ditanami, hanya ada beberapa pohon jati. Titik kedua, terletak di daerah perbukitan tepatnya di Desa Kemuning, sebagian lahan aset tersebut telah dibangun sebuah kafe yaitu Kafe Gunung Jati.

“Tolong segera berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk mengamankan setiap aset-aset yang sudah diokupansi warga,” pinta Dwi kepada tim optimalisasi aset yang mendampingi.

Usai melihat aset di daerah Rembangan, rombongan berlanjut melihat aset yang berada di Jalan Gajah Mada. Di sana, direksi melihat proses perobohan bangunan bekas gudang yang sudah tak layak huni. Gudang Condro yang lokasinya di tengah kota ini, sengaja dibongkar dan dibersihkan agar ke depannya dapat digunakan secara lebih optimal.

“Tempat ini strategis, nantinya bisa dibangun gedung olah raga,” kata Slamet.

Sebelum lawatan berakhir, Slamet berpesan kepada seluruh tim optimalisasi aset untuk terus mendata setiap aset-aset yang ada. Jika terdapat aset yang sudah terlanjur diokupansi warga maka harus segera berkoordinasi dengan Biro Hukum agar aset tersebut tidak sampai lepas. Untuk aset-aset yang lain, bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar tidak menjadi beban perusahaan tetapi sebaliknya bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan. ■

DIRUT PTPN X:

Kita adalah 'Keluarga Besar'

Program internalisasi nilai-nilai perusahaan PTPN X yakni Sinergi, Integritas dan Profesional (SiPro) resmi diperkenalkan kepada seluruh karyawan pada Jumat (8/11) yang lalu, program ini disiarkan serentak melalui *live streaming* di sembilan kota dan 13 lokasi yang diikuti oleh 2700 karyawan.

■ LAPORAN: SEKAR ARUM

PROGRAM internalisasi budaya perusahaan kali ini, dikemas dengan begitu berbeda selain dilakukan secara *live streaming* dengan unit usaha lainnya, acara kali ini juga terasa asyik dan inovatif pasalnya para karyawan diajak untuk nonton bareng (nobar) film pendek yang di-konsep, dibuat dan diperankan langsung oleh para *millennials* PTPN X.

Dalam film tersebut diceritakan bagaimana kehidupan para karyawan PTPN X, mulai dari sinergi yang dilakukan baik dari tingkat teratas hingga bawah, integritas terhadap perusahaan hingga profesionalitas yang diberikan dalam bekerja.

Dan diluar dugaan, sambutan dari *audiens* baik yang berada di Kantor Pusat ataupun yang ada di unit sangat luar biasa. Nobar video ini nampaknya menjadi salah satu media

sosialisasi yang tepat karena mampu mengingatkan terhadap nilai-nilai perusahaan namun juga ada sisi *entertainment* di dalamnya.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annu-rogo mengatakan bahwa budaya perusahaan memiliki peran penting dalam pengembangan organisasi di suatu perusahaan. Apabila setiap orang dalam perusahaan mampu menyelaraskan budaya dengan strategi organisasi, maka tujuan perusahaan akan lebih efektif untuk dicapai.

"PTPN X mempunyai nilai perusahaan yakni Sinergi, Integritas dan Profesional (SiPro). Dengan nilai-nilai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan," ujarnya.

Ditambahkan Dwi, untuk mewujudkan hal tersebut yang perlu diingat adalah bahwa kita semua ini adalah

keluarga yakni Keluarga Besar PTPN X. Maka, karena kita merupakan bagian dari sebuah keluarga besar sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga keutuhan keluarga ini.

Untuk itu, ia berharap bahwa seluruh karyawan dapat meneladani arti penting yang terkandung dalam SiPro dan menanamkan nilai-nilai perusahaan ke dalam perilaku karyawan PTPN X dan membentuk kerjasama, komunikasi dan komitmen dalam perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan kuis yang dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi Kahoot yang dapat diakses melalui *smartphone* masing-masing peserta. Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo sangat mengapresiasi kuis inovatif tersebut. Bahkan ia pun turut serta dalam kuis tersebut. ■



■ Direksi dan karyawan berfoto bersama pada kegiatan internalisasi corporate value di kantor pusat PTPN X.

NATIONAL SUGAR SUMMIT

AGI-Ikagi Rumuskan Solusi Tantangan Industri Gula

Di tahun-tahun mendatang, industri gula nasional akan terus menghadapi berbagai tantangan. Sebagai upaya untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) menyelenggarakan National Sugar Summit (NSS) yang berlangsung 12-13 Desember 2019 di Surabaya.

■ LAPORAN: SAP JAYANTI

PERMASALAHAN yang dihadapi industri gula tanah air tidak hanya dalam hal kuantitas saja. Namun soal kualitas juga masih perlu pembenahan. Di sisi kuantitas, produksi gula baru mencapai 2,2 juta ton atau sekitar 38 persen dari total kebutuhan yang mencapai 5,7 juta ton. Sedangkan di sisi kualitas, pelaku industri gula nasional dituntut melakukan perbaikan kualitas gula sehingga bisa memenuhi syarat yang dibutuhkan berbagai kalangan pengguna gula.

“Tantangan yang dihadapi industri gula kian dinamis. Kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan terkait pengembangan industri gula baik di sisi *on farm*, *off farm*, maupun diversifikasi, biaya produksi, dan lain-lain. Sehingga, kita perlu bersama-sama merumuskan solusi terbaik untuk setiap permasalahan tersebut,” kata Ketua Ikagi Dwi Satriyo Annurogo. NSS 2019 dihadiri oleh seluruh pelaku industri gula baik BUMN maupun swasta untuk bersama-sama



merumuskan solusi bagi permasalahan pergulaan.

“Harapannya, seluruh pelaku industri gula saling bersinergi untuk bersama-sama memajukan industri gula nasional,” tambah Dwi yang juga Direktur Utama PTPN X ini.

Melalui NSS ini berhasil dirumuskan 13 poin yang menjadi *concern* pelaku industri gula. Pertama yaitu semua pihak yang berkepentingan sepakat bahwa situasi pergulaan nasional yang semakin kritis ini harus dipandang sebagai salah satu



■ Ketua Ikagi, Dwi Satriyo Annurogo didampingi Direktur Eksekutif AGI, Budi Hidayat saat menjawab pertanyaan awak media di sesi press conference National Sugar Summit 2019 di Grand City Surabaya.

persoalan bangsa yang menuntut penanganan cepat dan serius. Selain itu, pemerintah juga perlu menyusun kembali peta jalan pengembangan industri gula nasional disertai *instrument* pendukungnya yang kondusif, lintas sektoral dan terintegrasi, terutama menyangkut aspek produksi, distribusi, kelembagaan, pendanaan dan hilirisasi.

Kemudian, belajar dari negara Thailand dan India perlu dilakukan kebijakan proteksi dan promosi industri gula lokal beserta industri turunannya terutama *bioethanol* secara konsisten. Yang keempat, kebijakan pemberian insentif *raw sugar* untuk mendukung pembangunan PG dan peningkatan kapasitas giling harus dilakukan konsisten, sesuai dengan Permenperin 10/2017. Pengolahan *raw sugar* perlu diberikan juga kepada PG yang mengalami *idle capacity*, terutama yang berbasiskan tebu rakyat.

Pertemuan tersebut juga menyimpulkan bahwa kehadiran beberapa PG baru dalam kurun lima tahun terakhir ternyata tidak menambah produksi gula nasional. Ini menunjukkan implementasi pemberian insentif masih belum sesuai dengan tujuan.

Selain itu, dengan melihat bahwa sekitar 90 persen luas pengelolaan tebu Indonesia dilakukan oleh petani, sangat wajar apabila pemerintah mendukung pengembangan tebu rakyat melalui penyediaan teknologi budidaya, penyediaan benih tebu unggul, bantuan bongkar ratoon, penyuluhan, perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi.

Dan rumusan yang ketujuh menyebutkan, dengan mempertimbangkan lahan tebu di pulau Jawa yang semakin terbatas, sehingga pabrik eksisting sudah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku tebu, maka pendirian pabrik gula baru seyogyanya dilakukan di luar Jawa. Dari sisi petani, animo petani bertanam tebu juga semakin menurun karena harga gula yang dipandang relatif rendah, biaya produksi terus



■ Ketua Ikagi, Dwi Satriyo Annurogo didampingi Direktur Eksekutif AGI, Budi Hidayat setelah memberikan piagam kepada sponsor di acara National Sugar Summit 2019 di Grand City Surabaya.

meningkat sedangkan akses terhadap sumber dana atau kredit murah justru terbatas.

Dalam menjaga hubungan kemitraan antara petani dan PG, Sistem Bagi Hasil (SBH) sebaiknya tetap dipertahankan. Dan dalam rangka melindungi eksistensi petani tebu dan PG pemisahan pasar Gula Kristal Putih (GKP) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) masih diperlukan.

Dari sisi kualitas, pengetatan standar warna (ICUMSA) GKP pada saat ini tidak urgen dan kurang relevan karena warna gula hanya berkaitan dengan estetika dan preferensi konsumen. Namun tidak ada hubung-

annya dengan aspek kesehatan.

Di sejumlah negara produsen gula terutama di Thailand ICUMSA gula yang dijual berICUMSA 25, 200, 500 atau 1.000. Konsumen dapat memilih membeli gula sesuai ICUMSA yang dibutuhkan.

Namun, sebagai upaya untuk menjaga rembesan gula mentah ke pasar konsumsi dan persaingan yang tidak sehat, sebaiknya standar ICUMSA gula mentah impor tetap min 1.200 IU. Dan rumusan yang terakhir disebutkan bahwa kadar sulfit (SO₂) GKP sebaiknya mengacu ke Codex for sugar dengan kandungan maks 70 ppm. ■



■ Ketua Ikagi, Dwi Satriyo Annurogo didampingi Direktur Eksekutif AGI, Budi Hidayat memotong pita dalam prosesi pembukaan National Sugar Summit 2019 di Grand City Surabaya.

HADAPI DINAMIKA BISNIS

PTPN X Lakukan Restrukturisasi Organisasi

Menghadapi tantangan dan dinamika bisnis yang semakin dinamis, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X lakukan restrukturisasi organisasi dengan melakukan perubahan pada struktur pejabat puncak. Diharapkan restrukturisasi organisasi dapat meningkatkan kinerja dan daya saing yang kompetitif dalam lingkungan PTPN X.

■ LAPORAN: SAP JAYANTI

RESTRUKTURISASI yang dilakukan akan memberikan penyegaran dalam atmosfer kerja di PTPN X. Tidak itu saja, restrukturisasi organisasi juga akan memicu penciptaan

inovasi-inovasi strategis untuk perkembangan perusahaan ke depan.

Adanya restrukturisasi organisasi ini berdampak pada jumlah pejabat puncak yang sebelumnya 16 posisi menjadi 13 posisi. "Berkurangnya jumlah ini tentunya akan membuat

korporasi menjadi lebih lincah dan sinergi lebih kuat dalam upaya pencapaian target perusahaan," ujar Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, Dwi Satriyo Annurogo.

Restrukturisasi dan penataan organisasi tentunya berdasarkan evaluasi kinerja secara mendalam, sehingga seluruh pejabat puncak mendapatkan penempatan yang relevan.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PTPN X juga menyampaikan bahwa dalam tahun 2019 PTPN X berhasil meraih beberapa penghargaan. Mulai dari Revolusi



■ Ucapan selamat dari Direksi PTPN X di acara serah terima pejabat puncak dan restrukturisasi di PTPN X.



Mental Award, Indonesia Business Award, hingga TOP Digital Award. "Keberhasilan dan capaian tersebut merupakan indikator bahwa PTPN X memiliki SDM-SDM yang unggul," ujarnya.

Dengan penyegaran pada jajaran manajemen diharapkan nantinya akan bermunculan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan PTPN X ke depan. "Saya menghimbau untuk bersama-sama meningkatkan kinerja kita berdasar pada nilai-nilai SIPro (Sinergi, Integritas, dan Profesional) Kerjasama dan sinergitas antar bagian juga perlu ditingkatkan, sehingga nantinya akan membuat kita menjadi tim yang solid dan handal. Kita bersama-sama harus memberi-

kan support terbaik kita bagi pabrik gula dan kebun tembakau. Sehingga, target-target yang telah dicanangkan, tidak hanya sekedar kita capai, tapi dapat kita lampau," tutur Dwi.

Dalam kesempatan tersebut

Direktur Utama PTPN X juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada dua pejabat puncak yang sudah memasuki masa bebas tugas yaitu Alan Purwandiarso dan Benny Basuki Suryo. ■



NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
Moh. Afif Fauzi	Kepala Bagian Keuangan	Plt. Kepala Satuan Pengawasan Intern
Arif Suhariadi	Kepala Bagian Akuntansi	Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
Herman	Kepala Bagian SDM	Kepala Bagian SDM dan umum
Tri Ari Sulistyawan	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Hukum dan Pengembangan Aset
Wakhyu Priyadi Siswosumarto	Kepala Bagian Umum dan pengembangan Aset	Kepala Bagian Perencanaan Strategis
Edwin Risananto	GM PG Djombang Baru	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Ramlan Silvester Sinaga	Pjs, Kepala Bagian Teknik	PJs Kepala Bagian Teknik dan Pengolahan
Arisson Sianipar	Pjs. GM PG Gempolkrep	Pjs GM PG Kremboong
Agus Mihandoko	GM PG Kremboong	GM PG Gempolkrep
Erwin Budianto	Pjs GM PG Lestari	Pjs GM PG Djombang Baru
Marshal Gerard Pattiasina	Kepala Bagian Pengolahan	GM PG Lestari
Bambang Hari Nugroho	GM PG Modjopanggoong	GM PG Pesantren Baru
Miftakhul Munir	GM PG Pesantren Baru	GM PG Modjopanggoong

PT ENERO Operasikan Dua Boiler Baru

Anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang memproduksi bioetanol, PT Energi Agro Nusantara (Enero) membangun dua boiler baru dengan kapasitas 2x10 Ton/jam. Penambahan dua boiler ini nantinya akan meningkatkan kinerja dari PT Enero.



■ Boiler kapasitas dua kali 10 ton per-jam PT Enero

■ LAPORAN: SAP JAYANTI

BOILER yang mulai dioperasikan pada pertengahan Oktober 2019 ini akan membantu pengoperasian PT Enero, sehingga menjadi mandiri. Selama ini, operasional PT Enero tergantung pada masa giling Pabrik Gula Gempolkrep.

“Selama ini, kinerja PT Enero masih bergantung kepada PG Gempolkrep. Kebutuhan *steam* Enero di *supply* dari PG Gempolkrep dan hanya saat masa giling. Harapannya, dengan adanya dua *boiler* ini PT Enero bisa mandiri, hari operasional PT Enero akan lebih panjang dan berdampak pada peningkatan laba perusahaan,” kata Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo. Selama tahun 2018 lalu, PT Enero sudah menunjukkan kinerja yang positif dengan mencetak laba sebesar Rp 2,4 Miliar.

Saat ini PT Enero sedang berfokus pada modernisasi pabrik dan diversifikasi produk. Modernisasi yang dilakukan adalah dengan penambah-

an dan modifikasi peralatan yang ada. Dengan modernisasi, kinerja pabrik akan lebih efisien dan kualitas produk-produk yang dihasilkan akan meningkat. Sedangkan untuk diversifikasi, PT Enero sedang mengembangkan produk *fuel grade ethanol* menjadi *multi grade ethanol*, dimana etanol yang dihasilkan adalah ENA grade, *industrial grade*, dan *food grade*. “Adanya diversifikasi produk ini diharapkan mampu memperluas bisnis PT Enero karena dapat merambah pasar industri maupun makanan,” tambah Dwi.

Selain itu, program lain yang akan segera diwujudkan oleh PT Enero adalah pembangunan pabrik CO². Kebutuhan pasar akan CO² sangat tinggi, khususnya pada industri minuman berkarbonasi. Adanya permintaan pasar tersebut membuat PT Enero tergerak untuk segera merealisasikan pabrik CO² pada tahun 2020.

Direktur Utama PT Enero, Izmirta Rachman menambahkan, investasi yang ditanamkan untuk pembangunan dua *boiler* ini sebesar Rp 10,45

Miliar di luar bahan-bahan pendukungnya. “Pembangunan dua *boiler* ini sungguh-sungguh akan bermanfaat bagi PT Enero,” ujarnya. Dengan dimilikinya *boiler* ini, PT Enero akan lebih mandiri karena dapat terus beroperasi selama 24 jam, 360 hari dalam satu tahun tanpa henti.

Meskipun demikian, *boiler* ini tidak akan meninggalkan konsep integrasi industri etanol dengan pabrik gula tetapi justru akan lebih mendukung karena pemanfaatannya akan lebih mengoptimalkan kedua industri.

Untuk bahan bakar *boiler* telah didukung penuh oleh PT PGN dengan jalur dan ketersediaan gas yang sudah disiapkan. “Nantinya juga akan didukung penuh oleh *excess biogas* dari PT Enero sebagai bahan bakar penunjang dengan konsep optimalisasi *internal resources* yang terintegrasi,” tutur Izmirta Rachman.

Ia menambahkan, kondisi industri etanol pada 2019 ini sedang dalam masa sulit. Khususnya terkait kebijakan pemerintah menurunkan tarif impor etanol dari Pakistan dari yang sebelumnya 30 persen menjadi 0 persen. Industri etanol dalam negeri yang seharusnya sudah tercukupi dari produksi dalam negeri harus berkompetisi dengan importer.

“Pasar lokal semakin terbatas dan tak terelakkan lagi perang harga menjadi tantangan karena semakin sesaknya pasar lokal oleh barang impor,” jelasnya.

Namun, kondisi tersebut tidak menjadikan PT Enero menyerah. Apalagi proses modernisasi dan modifikasi yang dilakukan sudah bisa diterapkan sehingga PT Enero bisa mengisi pasar *multi grade* enero, khususnya ENA *grade* enero yang akan menembus pasar ekspor. ■

Tembakau, Si Daun Emas yang Kian Bernas

■ LAPORAN: ANGGA SUPRAYOGI

JEMBER – “Daun emas sedang naik daun” begitulah sebuah pameo untuk tembakau yang saat ini hangat diperbincangkan. Terlepas dari pro dan kontra di ranah publik, perlahan tembakau mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Pada November 2019, Pemkab Jember pun telah mendeklarasikan Jember sebagai The City of Cigar Indonesia atau Jember Kota Cerutu Indonesia. Dengan pengukuhan julukan baru ini, tentu membuka lebar peluang dua unit Kebun Tembakau dan Pusat Penelitian Tembakau PTPN X untuk berkiprah lebih luas dalam memajukan sektor pertembakauan.

SINERGI DUA INSTANSI

Dalam upaya terus mengibarkan nama tembakau, UPT PSMB Lembaga Tembakau Jember bersinergi dengan Golden Leaf House (GLH) Penelitian Tembakau Jember PTPN X dengan menggelar acara bertajuk “Workshop Diversifikasi Produk Tembakau.” Workshop sehari yang digelar pada 21 November 2019 tersebut dilaksanakan di dua venue. Pertama, di Golden Leaf House/GLH (Wisata Edukasi Tembakau dan Produk Hilir Tembakau) dengan materi pengenalan produk-produk diversifikasi tembakau dan demo pembuatan produk diversifikasi tembakau.

“Kita harus terus menggerakkan roda perekonomian di bidang tembakau, karena kita sebagai stakeholder tembakau mencari nafkah dari tembakau. Tembakau juga menjadi ikon Kota Jember, sehingga tembakau tidak boleh punah. Kita harus saling bersinergi menjaga tembakau agar tetap eksis,” papar Siti Andriati Widartien dalam sambutan pembukaan. Upaya diversifikasi, tambah Titin-sapaan akrab Siti Widartien, memang sedang gencar dilakukan untuk mengangkat citra tembakau, sehingga tembakau tidak terkesan hanya sebagai

bahan rokok dan cerutu saja.

Okta Prima Indahsari yang menginisiasi Golden Leaf House (GLH) memaparkan GLH secara komprehensif. Penjelasan dimulai dari pohon industri tembakau, alat-alat dan mesin yang dimiliki GLH, dan berbagai macam produk diversifikasi yang terdapat di meja display, seperti tobacco absolute, asap cair, briket, pellet, papan partikel, biochar, handsanitizer, hingga sabun



padat. Kecuali itu, para peserta juga diajak menyaksikan pembuatan berbagai macam produk dan tak jarang Okta juga menawarkan kepada peserta yang ingin mempraktikkan langsung proses pembuatan produk-produk diversifikasi tembakau.

GLH terus menggeliat mempromosikan produk-produk diversifikasi berbasis limbah tembakau kepada publik. Tercatat 50 produk hasil diversifikasi tembakau dengan rincian 22 produk dari bahan daun tembakau, 19 produk dari bahan batang tembakau, 3 produk dari bahan akar tembakau, 3 produk dari bahan biji tembakau, dan 3 produk dari bahan bunga tembakau yang tersusun rapi dalam pohon industri tembakau GLH. Sejalan dengan inovasi yang dilakukan, GLH menargetkan menelurkan minimal dua produk baru per tahunnya.

Puas melihat langsung produk dan proses produksi diversifikasi tembakau

di bilangan MH Thamrin 133 Jember, peserta bertolak menuju Aula UPT PSMB LT Jember untuk menyimak paparan dari empat narasumber yang ahli dibidangnya, yakni Mamok Bisowarno (Bakorwil Jember), HM Koentjoro (APTI), L. St. Gomo Tumanggor (Kepala Penelitian Tembakau Jember), Okta Prima Indahsari (Peneliti Teknologi & Prosesing Penelitian Tembakau Jember). Peserta workshop yang berjumlah lebih dari 50 peserta tersebut terdiri dari kalangan birokrat, akademisi (dosen dan mahasiswa), petani tembakau, kepala desa serta para pelaku usaha tembakau di Kabupaten Jember.

Inovasi-inovasi mengenai diversifikasi memang sangat menarik untuk diperbincangkan selain akan membentuk

ide-ide kreatif dari peserta juga akan bisa mendorong minat orang menggeluti sektor tembakau. Mamok Bisowarno perwakilan Bakorwil Jember menambahkan teka-it birokrasi pertembakauan “Kami akan bantu sebisa mungkin untuk menunjang perdagangan tembakau dan produk diversifikasinya karena ini merupakan hal yang positif”. Sedangkan L. St. Gomo Tumanggor atau karib disapa Leo ini membagikan pengalaman beliau seputar produk diversifikasi tembakau seperti tobacco oleoresin (concrete), essential

oil absolute, parfum, dan nicotine salts. Selain itu juga menggambarkan overview pasar global biobriket, biopellet, dan asap cair. Sedangkan Okta lebih menekankan pada pemaparan teknologi tepat guna produk-produk diversifikasi tembakau yang bisa diduplikasi dan dikembangkan oleh para petani tembakau.

Menurut sudut pandang pelaku usaha tembakau, Koentjoro-perwakilan APTI, birokrasi bisa mengakomodir tembakau dan produk turunan tembakau. Perlu kajian lebih lanjut untuk studi kelayakan produk dan pasar diversifikasi produk tembakau. Output dari agenda ini diharapkan perlu adanya pengawasan dan juga pendampingan khusus tidak hanya bagi petani namun juga dari instansi terkait agar semua pihak bergerak bersama memajukan tembakau Indonesia. Diversifikasi produk tembakau akan terus membuka cakrawala publik bahwa tembakau masih layak untuk disayang karena manfaatnya memang tak terbilang. ■

KULIAH LAPANG PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

Berburu Ilmu Kelola Limbah Agroindustri Di Golden Leaf House

Tak hanya menerima kunjungan dari kalangan petani tembakau dan instansi pemerintah semata, di penghujung 2019, Golden Leaf House (GLH) Penelitian Tembakau Jember juga menjadi jujugan bagi kalangan akademisi.



■ LAPORAN: OKTA PRIMA INDAHSAARI

GLH SEBAGAI BENCHMARKING PEMANFAATAN LIMBAH

Sekira 50an dosen dan mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember berkunjung ke GLH sebagai bagian dari kunjungan kuliah lapang mereka (6/12/2019). “Tujuan kami mendampingi adik-adik mahasiswa kuliah lapang di GLH adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan limbah dan alternatif pengelolaan limbah agroindustri. Hal ini juga untuk mendukung mata kuliah Kimia Lingkungan dan Metode Analisis Pencemaran Lingkungan yang tengah kami ajarkan,” jelas Audiananti Meganandi Kartini, dosen sekaligus *Team Leader* Kuliah Lapang.

Laurentius St. Gomo Tumanggor selaku tuan rumah sekaligus Kepala Penelitian Tembakau Jember

meyambut hangat kedatangan mereka. Dalam sambutan pembukaannya, Leo, demikian ia karib disapa, mengetengahkan isu lingkungan yang merupakan fokus bersama antara perguruan tinggi dengan perusahaan. Pengelolaan lingkungan yang tepat ini akan memberikan manfaat terhadap peningkatan produksi, kualitas, sosial dan ekonomi kepada semua *stakeholder*.

“Saya berharap GLH menjadi salah satu pusat *benchmarking* dan komparasi studi vokasi dalam hal pemanfaatan limbah produk pertanian sebagai sumber daya usaha yang mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat,” tambah alumnus Institut Pertanian Bogor ini.

WARNA-WARNI GLH

Membuka wawasan peserta, PIC menyuguhkan selang pandang GLH. Limbah organik tembakau selama ini hanya dibuang ke lingkung-

an dan dibiarkan terurai seiring berjalannya waktu. Namun di tangan tim GLH, limbah tembakau tersebut bisa diolah menjadi produk-produk baru yang tidak hanya bersifat *ecofriendly* namun juga berpotensi menyubstitusi beberapa bahan yang digunakan oleh kebun tembakau pada proses curing dan fermentasi. Kecuali itu, kegiatan produksi pengolahan limbah tembakau ini dapat dikembangkan menjadi skala pabrik sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani tembakau.

Peserta dapat melihat ragam olahan limbah tembakau terangkum secara sistematis dan *eye catching* di pohon industri tembakau, mulai dari akar, batang, daun pucuk, kuncup, dan bunga, semuanya bisa diolah menjadi produk baru yang bermanfaat. Selain pohon industri, panca indra peserta juga masih dimanjakan dengan deretan produk-produk diver-

sifikasi tembakau yang telah dihasilkan oleh GLH. Usai mendengarkan paparan materi serta mengeksplorasi produk-produk pengolahan limbah tembakau yang di-*display* di *indoor* GLH, para peserta kuliah lapang diarahkan menuju workshop GLH. Di sini mereka melihat langsung demo proses pembuatan briket, pellet, biochar, asap cair, serta penggunaan kompor biomassa berbahan bakar pellet. Semua produk berbasis limbah tembakau.

Kekaguman dan antusiasme tampak di wajah para peserta. Tak hanya menanyakan perihal kuantitas limbah hasil budidaya tembakau dan emisi yang dihasilkan dari proses produksi diversifikasi tembakau, mereka juga mencoba langsung membuat produk-produk tersebut di workshop. “Menyenangkan sekali bisa mempraktekkan langsung pembuatan briket,” ujar salah satu mahasiswa berkerudung biru.

TESTIMONI PESERTA KULIAH LAPANG

Menurut Shofiyah Tsabitah, materi yang disampaikan menarik dan menambah wawasan baru mengenai manfaat tembakau di luar rokok dan cerutu. Dia berharap ke depan dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat secara kontinyu. Sementara itu C. Okta, ia merasa banyak mendapatkan ilmu baru mengenai pertembakauan dan tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai pemanfaatan tembakau. Yuliana-dosen pendamping, juga menambahkan bahwa pengelolaan tembakau merupakan ilmu baru yang bisa dilanjutkan sebagai bahan penelitian di bidang pengelolaan lingkungan.

Para peserta pulang membawa *souvenir* berupa produk-produk GLH. Dengan mengunjungi GLH, peserta tidak hanya mendapatkan wacana baru mengenai pengelolaan limbah tembakau. Dengan membawa *souvenir* GLH, maka mereka akan turut memperkenalkan ragam diversifikasi produk tembakau sekaligus menyuarakan kampanye positif tentang tembakau kepada masyarakat. ■

Gembleng Karyawan Bagian Pengolahan di Pusdik Arhanud

■ OLEH : MARIA PUTRI | KOMUNIKASI PERUSAHAAN, SEKPER & PKBL

SEMAKIN hebat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, tentu akan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut terlepas dari berbagai faktor lainnya. PT Perkebunan Nusantara X sangat berfokus ada peningkatan kapabilitas SDM-nya. Seperti agenda-agenda tutup giling sebelumnya, Bagian Pengolahan bekerjasama dengan Bagian SDM Kantor Pusat mengadakan *In House Training* (IHT) sebagai evaluasi atas capaian dan kinerja yang sudah didapatkan selama musim giling.

Mengambil tema besar “Menyiapkan SDM Yang Kompeten dalam Menghadapi Persaingan Global”, IHT kali ini melibatkan seluruh karyawan di Bagian Pengolahan, baik itu Kantor Pusat maupun Unit Usaha, mulai dari level Manager hingga Asisten Muda. Fokus IHT ini adalah meningkatkan kualitas SDM dengan membentuk karakter dan *attitude* dari tiap peserta, sehingga mengerti dan memahami apa yang harus diperbuat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Diharapkan, nantinya ketika pelaksanaan di lapangan, setiap SDM Bagian Pengolahan mampu berkontribusi pada penurunan jam berhenti giling, efisiensi biaya, hingga peningkatan kualitas Gula Kristal Putih (GKP).

Dalam IHT ini juga disampaikan materi berwawasan kebangsaan, mengingat sesuai surat edaran No. SE-4/MBU/08/2019 arahan Menteri BUMN, Tentang Membangun Karakter Insan BUMN Yang Berwawasan Kebangsaan, PTPN X berkomitmen mencetak insan-insan pembangunan bangsa yang berperan besar dalam menyukseskan berbagai program pemerintahan, produktivitas tinggi, dan memiliki wawasan kebangsaan sebagai pertahanan diri. Untuk itulah, dipilih Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara (Pusdik Arhanud) Malang sebagai venue untuk *In House Training* kali ini. Pusdik Arhanud merupakan kawah candradimuka prajurit TNI Angkatan Darat (AD).

“Harapannya melalui pelatihan di Pusdik Arhanud ini, pola pembentukan kader-kader yang potensial melalui pelatihan dalam kelas dan *outbond* dapat membentuk pribadi berkarakter, kuat, terlatih, bertanggungjawab, patuh akan aturan (SOP), dan peka terhadap perubahan,” terang Marshal G. Pattiasina, Kepala Bagian Pengolahan PTPN X.

Materi diberikan dalam kelas paralel yang terjadwal selama 3 hari, mulai tanggal 2 Desember hingga 4 Desember 2019. Narasumber yang diundang sebagai tutor adalah narasumber yang sangat *capable* di bidangnya, yaitu Satriyo Wiweko (Direktur Sahabat Lingkungan), Samiyanto, Mustangin, Saptiaji, Gatot (Lembaga Pendidikan Perkebunan), dan dari Pusdik Arhanud. Melalui IHT, seluruh peserta dibekali mengenai peluang bisnis baru, *character building*, hingga strategi dalam menghadapi persaingan bisnis. ■



Holding Perkebunan Targetkan Laba Sektor Gula Rp 53 Milliar



■ Dirut PTPN X Dwi Satriyo Annurogo (kanan) bersama para pelaku industri gula usai menandatangani kesepakatan komitmen kinerja dan strategi giling 2020 di Kantor Pusat PTPN X.

Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) tidak ingin PTPN Gula kembali mengalami kerugian. Untuk itu, Holding Perkebunan melakukan evaluasi dan mendorong seluruh PTPN Gula untuk melakukan perbaikan kinerja agar target Holding Perkebunan bisa terealisasi, yaitu PTPN Gula bisa menyumbang laba sebesar Rp 53 Milliar.

■ LAPORAN: SISKA PRESTIWATI

DI Ruang Pandu Kantor Pusat PTPN X di Jalan Jembatan Merah Surabaya, seluruh direksi dan *general manager* dari PTPN Gula, direksi dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), bersama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Kementerian BUMN berkumpul untuk mengevaluasi kinerja di musim giling tahun 2019 dan merencanakan program di musim giling tahun 2020.

“Memang banyak tantangan yang harus dihadapi industri gula tanah air, namun Holding Perkebunan optimis industri gula di Indonesia masih bisa maju dan mewujudkan program pemerintah untuk swasembada gula,” tegas Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mahmudi pada acara Evaluasi Giling Tahun 2019 dan Strategi Giling Tahun 2020, Sabtu (30/11).

Optimisme di industri gula harus

tetap terjaga apapun yang terjadi, tegas Mahmudi, pasalnya selama ini masih banyak aspek yang memengaruhi kinerja industri gula bahkan aspek politis pun turut memberi warna. Namun, apapun aspek yang menghadang, industri gula harus terus maju dan berkembang.

“Kenyataan, kinerja keuangan industri gula dari tahun ke tahun tidak pernah berkontribusi positif,” tambah Mahmudi.

Mahmudi mengungkapkan setiap tahun, Holding Perkebunan Nusantara merencanakan dan menargetkan industri gula bisa menyumbangkan laba namun kenyataannya sejak tahun 2016 hingga 2019 ini, PTPN Gula masih merugi dan menjadi beban bagi Holding Perkebunan.

“Untuk musim giling 2020, Holding Perkebunan Nusantara merencanakan PTPN Gula bisa profit sebesar Rp 53 Milliar,” sebutnya.

Apa yang harus dilakukan agar profit, sambung Mahmudi, perencana-

naan di masing-masing PTPN harus terus dikawal, khususnya di aspek operasional. “Terobosan-terobosan operasional diharapkan akan ada untuk menjawab tantangan menjamurnya pabrik gula swasta dan menurunnya areal tebu,” paparnya.

Di tempat yang sama, Plt. Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Imam Paryanto mengharapkan agar di musim giling tahun 2020 mendatang, PTPN Gula dan PT RNI bisa menyumbang laba. Gempuran pabrik gula swasta tidak bisa dihindarkan mengingat jumlah produksi di dalam negeri belum memenuhi kebutuhan yang ada.

Dalam laporan kinerja PTPN X di musim giling tahun 2019, Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh PTPN X di musim giling tahun 2019 kemarin adalah PTPN X belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku tebu (BBT) untuk sembilan pabrik gula yang ada. Kesulitan mendapatkan pasok BBT karena menurunkan areal luasan tebu dari tahun ke tahun dan adanya pabrik gula swasta yang berani membeli tebu petani dengan harga tinggi.

“Bagaimana kunci mendapatkan pasok BBT, secara *historical*, petani loyal dengan pabrik gula. Namun begitu dapat tawaran yang lebih tinggi dan pembayaran cepat loyalitas petani diuji. Untuk mengatasi hal ini, kami masih mencari skema dengan bank, begitu juga skema penjualan gula. Dari Holding dengan sistem SPH. Ini lebih fleksibel dan menjadi titik balik bagi kami,” ungkap Dwi.

Selain Direktur Utama PTPN X, seluruh Direktur mulai dari PTPN II hingga PTPN XIV dan Direksi dari PT RNI juga memaparkan kinerja 2019 dan program kerja di tahun 2020. Sebelum berakhir, seluruh direksi PTPN Gula dan PT RNI melakukan Penandatanganan komitmen pencapaian kinerja tahun 2020. ■



■ Petani tebu muda binaan pabrik gula (PG) Modjopanggoong yang mengikuti pelatihan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dan PT Pembangunan Perumahan Tbk. (Persero)



PP (Persero) Support Pelatihan Petani Tebu Millennial

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X kembali melakukan kerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk. (Persero) untuk mengadakan pelatihan untuk para petani tebu rakyat di Klub Bunga Butik Resort, Batu lalu (5/12). Dibuka langsung oleh Direktur Komersil PTPN X, Slamet Djumantoro, pelatihan ini diikuti oleh 35 orang petani tebu muda binaan pabrik gula (PG) Modjopanggoong.

■ LAPORAN: SEKAR ARUM

MENURUT Slamet, tujuan dari terselenggaranya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para petani tebu, terlebih para petani tebu muda yang disebut petani tebu milenial karena mereka punya potensi yang sangat besar. Palsanya, masa depan industri gula membutuhkan sentuhan dan perhatian para petani milenial ini.

“Karena di tangan generasi mudalah perkembangan industri tebu nantinya. Dan Andalah nantinya yang akan menjadi tumpuan dan pahlawan bagi ketahanan pangan Indonesia

ke depan. Untuk itu kami harapkan dengan pelatihan ini akan mampu menggerakkan minat generasi muda untuk lebih proaktif lagi sehingga dapat meningkatkan daya saing yang dimiliki,” urainya.

Dijelaskannya, bahwa masih banyak potensi yang belum digali dari industri tebu. Diharapkan dengan keterlibatan generasi muda yang mempunyai kreativitas semua potensi industri tebu dapat dimanfaatkan. Terutama untuk peningkatan produktivitas tanaman.

Sementara itu, hadir dalam kesempatan tersebut, Panji Decca Duni-anto, selaku Manajer Unit Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) PT PP (Persero) Tbk mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan kali ini diperuntukkan untuk pelatihan bagi para petani milenial.

“Diharapkan dengan adanya pelatihan ini sinergi antara PT PP dan PTPN X ini akan dapat meningkatkan kinerja dari kedua belah pihak dan dapat menjadi motor penggerak bagi para petani milenial untuk dapat meningkatkan daya saing yang ada,” jelas Panji.

Dan juga dengan alokasi bantuan dari PT PP ini, lanjut Panji diharapkan petani tebu lebih merasa dirangkul dan mendapatkan perhatian. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang ada.

Dalam pelatihan ini, beberapa materi pun diberikan antara lain motivasi dan spirit usaha, budidaya dan aplikasi, mekanisasi tanaman tebu, *core sampler*, *e-farming* dan rendemen. ■



■ Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo bersama karyawan dan masyarakat bergotong royong dalam bedah rumah di Desa Kawang Rejo dan Desa Lengkong Jember.



■ Penyerahan kunci rumah hasil CSR program bedah rumah milik Ibu Nursiah di Desa Kawangrejo Jember.

BUMN HADIR UNTUK NEGERI

PTPN X Bedah Rumah dan Bangun 11 MCK

Sebagai wujud hadir untuk negeri, PT Perkebunan Nusantara X mengucurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk bedah rumah dan bantuan pembangunan MCK pada 11 titik di daerah Ajong Gayasan, Jember.

■ LAPORAN: SISKAPRESTIOWATI

MBAH Nursi'ah tampak berkaca-kaca menahan air mata saat Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo bersama rombongan dari PTPN X, dan Muspika setempat tiba di rumahnya. Bersama Direktur Komersil Slamet Djumantoro, Kapolsek Mumbulsari AKP Heri Supadmo, Camat Mumbulsari Joko Sopoyono, beberapa staf PTPN X, dan Muspika setempat melihat kondisi rumah Mbah Nursi'ah yang sudah tidak layak huni. Bahkan, sesek (dinding dari anyaman bambu) sebelah kanan pun sudah rusak parah, sehingga rumah bagian kanan terbuka lebar. Belum lagi beberapa tiang bambu untuk menyangga rumah yang sudah terlihat rapuh.

Hampir 30 menit, rombongan PTPN X melihat kondisi rumah Mbah Nursi'ah mulai dari depan hingga dapur yang memang sudah tidak lagi layak untuk

ditempati. Apalagi, Mbah Nursi'ah yang tinggal seorang diri pasca meninggalnya sang putra membuat Mbah Nursi'ah tidak sanggup untuk merenovasi rumahnya yang beralaskan tanah. Jangankan untuk merenovasi rumah, untuk makan sehari-hari saja, Mbah Nursi'ah mengharapkan bantuan dari tetangga.

"Untuk penyaluran dana CSR PTPN X, tahun ini kami berikan untuk program bedah rumah Mbah Nursi'ah yang kita lihat bersama-sama bahwa kondisi rumahnya memang sudah sangat berbahaya bila tidak segera diperbaiki," kata Dwi pada acara Penyerahan Bantuan CSR Bedah Rumah dan Pembangunan MCK Desa Kawang Rejo dan Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari, Jember, Rabu (30/10/2019).

Dwi Satriyo menambahkan memang di Jawa Timur ini, masih banyak rumah yang membutuhkan bantuan bedah rumah. Namun saat ini, PTPN X baru bisa membantu rumah milik Mbah Nursi'ah.

Selain bedah rumah, PTPN X juga memberikan bantuan MCK pada 11 titik di Desa Kawang Rejo dan Desa Lengkong.

"CSR kali ini, baik bedah rumah maupun bantuan MCK ini tidak lain untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Sehingga diharapkan kesehatan masyarakat pun semakin meningkat," jelasnya.

Dwi berharap, bantuan yang diberikan melalui CSR PTPN X ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena PTPN X juga bagian dari masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk bisa lebih meningkatkan kesehatan bagi warga masyarakat. Dengan masyarakat yang sehat tentunya akan berdampak sangat baik bagi kemajuan.

Tidak hanya melihat kondisi rumah Mbah Nursi'ah, Dwi turun langsung ke lapangan untuk ikut membantu pemugaran rumah janda tua, dimulai dengan penurunan genting atap rumah. Dana untuk bedah rumah sebesar lebih dari 50 juta rupiah. Sedangkan untuk bantuan MCK dengan nominal masing-masing titik senilai Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta.

Selaku penerima bantuan bedah rumah, Mbah Nursi'ah menyampaikan terima kasih kepada PTPN X yang telah membantu membangun rumahnya. Begitu pula, Hakim, warga Dusun Peji, Desa Lengkong sebagai penerima bantuan MCK mengatakan terima kasihnya kepada PTPN X.

"Terima kasih ke PTPN X sudah memberikan bantuan MCK. Semoga PTPN X semakin lancar dan maju," ujar Hakim. ■

BUMN HADIR UNTUK NEGERI

Bangun Masjid Al-Fitrah

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X juga mengucurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membangun Masjid Al Fitrah yang berada tepat di depan Kantor Kebun Ajong Gayasan.

■ LAPORAN: SISKI PRESTIWATI

LETAK Kantor Kebun Ajong Gayasan berada di jalan utama Kota Jember dengan tingkat pengguna jalannya cukup tinggi. Ada salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh pengguna jalan adalah adanya tempat ibadah. Selama ini, tepat di depan Kebun Ajong Gayasan memang sudah berdiri mushola yang diperuntukan bagi karyawan Kebun Ajong Gayasan dan masyarakat sekitar. Namun adanya perkembangan pembangunan perekonomian di Jember dan berdirinya Klinik Pratama milik PT Nusantara Medika Utama maka jumlah jamaah terus bertambah. Dengan niat ingin bisa menyediakan tempat beribadah dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih nyaman, maka PTPN X mengucurkan CSR-nya untuk pembangunan masjid di lokasi tersebut.

General Manager Kebun Ajong Gayasan, Dwi Aprilia Sandi menjelaskan ide pembangunan Masjid Al Fitrah ini berasal dari bapak Syaifuddin Zuhri yang sekarang ini menjabat sebagai Plt. General Manager Kebun Kertosari.

“Pembangunan Masjid Al-Fitrah ini menelan biaya sebesar Rp 832 ju-

ta. Dimana dana sebesar 225 juta berasal dari dana CSR PTPN X sedang sisanya berasal dari para donatur dan masyarakat sekitar,” sebut Dwi Aprilia Sandi dalam sambutannya pa-



■ Peresmian Masjid Al-Fitrah di Wilayah Kebun Ajong Gayasan.

da acara Peresmian Renovasi Masjid Al-Fitrah Kebun Ajong Gayasan, (30/10).

Pria yang akrab disapa Sandi ini menambahkan bantuan juga tidak hanya datang dalam bentuk uang,

tetapi ada yang dalam bentuk material, seperti pasir, semen, batu bata dan material lain yang dibutuhkan.

“Proses pembangunan renovasi masjid ini pun melibatkan seluruh karyawan dan masyarakat sekitar. Pembangunan masjid merupakan hasil jerih payah karyawan dan masyarakat sekitar yang telah menyumbangkan tenaganya. Semoga jerih payah seluruh karyawan dan masyarakat sekitar dicatat sebagai amal yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kelak,” ucap Sandi yang mendapat jawaban aamiin dari seluruh undangan yang hadir.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo mengungkapkan pemilihan nama Masjid Al Fitrah ini bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi memang ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh jamaah yang akan menunaikan ibadah di sini.

“Fitrah itu kan artinya kembali suci. Maka diharapkan setiap kali kita masuk ke dalam masjid ini kita semua diingatkan untuk kembali suci,” ungkap Dwi

Dwi menjelaskan bila sebelum sholat di Masjid Al Fitrah ini, kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik maka setelah kita melakukan sholat dan menyadari kesalahan kita diharapkan kita kembali menjadi suci dengan berjanji untuk tidak melakukan kegiatan

tersebut.

“Sebelumnya saya sangat bangga karena Kebun Ajong Gayasan berhasil merevonsi masjid Al Fitrah ini menjadi sangat nyaman dan sangat bagus,” pungkasnya. ■



■ Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo saat meninjau pembuatan sarana air bersih di Klaten.

BUMN HADIR UNTUK NEGERI

Sinergi dengan Tiga BUMN, PTPN X Bedah Rumah Warga Klaten

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/Corporate Social Responsibility).

■ LAPORAN: **SAP JAYANTI**

BERSINERGI dengan PT Angkasa Pura 1 (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), dan PTPN IX, PTPN X melakukan kegiatan CSR berupa perbaikan rumah, bantuan elektrifikasi, pembangunan fasilitas Cuci Kakus (MCK), bantuan sarana air bersih dan pemberian beasiswa senilai Rp 875 juta untuk masyarakat di sekitar wilayah kerja Kebun Klaten.

PTPN X menyadari bahwa keberlangsungan Kebun Klaten tidak lepas dari dukungan masyarakat Klaten. Untuk itulah, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sekitar kebun Klaten menjadi fokus utama manajemen. Taraf hidup yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan CSR disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. "Sesuai dengan

tema HUT RI lalu yaitu SDM Unggul Indonesia Maju, itulah program BUMN Hadir untuk Negeri. Kita ingin membantu masyarakat yang membutuhkan seutuhnya untuk mendapatkan SDM yang unggul. Tadi disampaikan ada bantuan bedah rumah, elektrifikasi, MCK, fasilitas air bersih, ini semuanya untuk masyarakat lebih sehat sehingga lebih baik lagi kinerjanya. Pemberian beasiswa juga adalah semangat BUMN untuk mempersiapkan SDM, pembinaan kepada tunas bangsa," ujar Dwi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan bantuan di Klaten, Jumat (29/11/2019).

Dengan individu yang sehat, akan terbentuk keluarga dan lingkungan yang sehat pula. Dan pada gilirannya akan menjadikan bangsa ini kuat. "Ini adalah wujud bagaimana BUMN memberikan manfaat bagi masyarakat," sambung Dwi.

GM Kebun Klaten, Erna Anastasia Dewi El Irsyadi melaporkan, elektrifikasi diberikan ke 30 unit rumah mulai dari Desa Ngemplak, Birin,

Balang, Ketitang dan lain-lain. Untuk bantuan MCK juga diberikan ke 30 unit rumah yang tersebar di beberapa desa, yaitu Karangasem, Ngriman, Jetak, Birit, dan lain-lain.

Kegiatan CSR ini juga meliputi pemberian bantuan sarana air bersih di Desa Pandes. Untuk bantuan perbaikan rumah diberikan kepada lima rumah, yang berada di Desa Bareng, Metuk lor, Kembang, dan Jetak.

Yang terakhir, pemberian bantuan beasiswa diserahkan kepada 15 orang siswa baik SD, SMP, maupun SMK. Selain itu pada pekan sebelumnya juga diadakan pasar murah yang menyediakan 1500 paket sembako untuk masyarakat.

"Elektrifikasi sudah selesai 100 persen dan beasiswa sudah ditransfer ke rekening sekolah siswa penerima. Sedangkan untuk bedah rumah dan sarana air bersih masih dalam *progress* namun ditargetkan akan bisa selesai pada Bulan Desember," ujar Erna. Pasar murah sendiri sudah dilaksanakan pada 24 November. ■

BUMN HADIR UNTUK NEGERI

PG Kremboong 'Peduli' Rumah Warga Tidak Layak Huni

Bagi sebuah entitas bisnis, membantu kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan keharusan. Hal itu pulalah yang menjadi salah satu agenda Pabrik Gula (PG) Kremboong dalam memberikan manfaat dan nilai tambah kepada lingkungan.

■ LAPORAN: SEKAR ARUM

UNTUK itu pada Rabu (27/11) PG Kremboong, unit usaha dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan CSR-nya melalui program bedah rumah. Kegiatan ini diperuntukan guna membantu masyarakat sekitar yang memang memerlukan serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

General Manager PG Kremboong, Agus Minhandoko mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terutama kepada masyarakat sekitar pabrik. Dan bantuan kali ini diterima langsung oleh Ibu Ponisah dari Desa Kremboong.

"Semoga dengan bedah rumah ini bisa bermanfaat untuk Keluarga Ibu Ponisah. Karena Ibu Ponisah ini

sudah tua renta, janda, penghasilannya pas-pasan, dan harus merawat Ibunya yang berusia 90 tahun lebih. Untuk itu diharapkan melalui CSR ini dapat meringankan beban beliau dan keluarga," tandasnya.

Dijelaskan Agus, bedah rumah dengan lebar enam meter dan panjang enam meter ini dilaksanakan selama satu bulan. Semua dibangun total dari program CSR dari PKBL dan dibantu secara gotong royong oleh karyawan.

Sementara itu, Direktur Komersil PTPN X, Slamet Djumantoro yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa CSR ini juga menjadi bagian dari kegiatan Kementerian BUMN sebagai pemrakarsa program BUMN Hadir untuk Negeri yang telah melakukan berbagai kegiatan di seluruh penjuru Tanah Air. Salah satunya, program bedah rumah ini diberikan semata-mata sebagai perwujudan

kepedulian perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada warga masyarakat sekitar.

"Perusahaan juga memiliki tanggungjawab untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warga desa yang ada di sekitar perusahaan. Untuk itu bedah rumah ini diharapkan mampu dapat menolong mereka terutama bagi yang membutuhkan," jelasnya.

Sebelumnya, lanjut Slamet pihaknya telah membangun rumah layak huni dan pembangunan toilet di daerah Jember. Ke depan, ia pun berharap makin banyak lagi masyarakat atau daerah lainnya yang dapat menerima bantuan dari PTPN X.

Ungkapan terima kasih datang dari Ibu Ponisa (pemilik rumah). Ia merasa sangat beruntung karena rumahnya yang dulu tak layak huni sekarang sudah layak untuk ditinggali. "Alhamdulillah senang sekali, saya berterima kasih pada PG Kremboong sudah mau merenovasi rumah saya. Dulu kalau hujan rumah saya ini banjir, sehari-hari tidurnya di lantai. Pokoknya tidak layak huni. Sekarang rumah saya sudah bagus. Sekali lagi terima kasih," pungkasnya dengan sedih. ■



■ PG Kremboong, unit usaha dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menyalurkan CSR-nya melalui program bedah rumah.

INVESTANI

Investani, Jadi Konsep Pendanaan PTPN X di Masa Depan

Dalam situasi bisnis industri gula yang semakin kompetitif dan regulasi yang ketat, diperlukan sebuah inovasi untuk bisa memenangkannya. Hal itu pulalah yang terus dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi terbaru yakni Investani.

■ LAPORAN: SEKAR ARUM

INVESTANI sendiri merupakan sistem *crowdfunding* dengan skema pembiayaan berasal dari pengumpulan dana para investor untuk operasional proyek tertentu yang dijalankan sesuai ketentuan.

Kepala Bagian SDM dan Umum, Herman mengatakan bahwa Investani ini merupakan terobosan yang sangat baik untuk perusahaan,

terlebih di masa depan. Digagas langsung oleh para karyawan milenial, Investani bisa menjadi sumber alternatif dalam meraih bahan baku tebu serta pendapatan baru bagi perusahaan di tengah kondisi industri gula seperti saat ini.

Penerapan Investani sendiri memiliki potensi yang cukup tinggi, pasalnya PTPN X bisa menjadi *off taker* dari proses operasional bisnis Investani. Investasi yang ditawarkan

oleh Investani adalah di sektor riil karena jelas lahan tebu dan pengelolanya, *brand* dan citra PTPN X, lahan, dan pabrik gula yang dapat menjamin tebu selalu dapat diolah di pabrik PTPN X. Hal ini tentu akan membuat keuntungan tersendiri bagi perusahaan.

Keuntungan tersebut di antaranya yaitu perusahaan dapat mengelola lahan perkebunan tanpa banyak bergantung pada pihak lain contohnya alternatif pendanaan selain bank, salah satu *moneytize* untuk inovasi TI yang sudah diterapkan di lingkungan PTPN X selain *e-farming* dan SAP, pinjaman individu petani, *market-place* hasil pertanian, dan pendanaan untuk sektor lain. Di Investani, 90% operasional dilakukan oleh sistem TI



sehingga tidak membutuhkan banyak SDM.

“Itulah yang menjadikan Investani ini merupakan alternatif pendanaan dan pengelolaan Bahan Baku Tebu yang sangat menguntungkan di masa depan bagi PTPN X, sistemnya sangat mudah dan transparan. Saat ini target *market* Investani adalah para investor yang dimulai dari karyawan internal PTPN X, PTPN Group, Anggota Koperasi lainnya, dan bahkan akan meraih investor eksternal jika sudah mendapat ijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelasnya.

Lahan percontohan untuk Investani sendiri telah berjalan pada musim giling 2019 dengan luasan 11,36 ha dan ROI investor sebesar 13,81%, dengan jangka waktu efektif 11 bulan, nilai tersebut jauh lebih baik dari nilai investasi deposito yang berkisar 5%-7% dalam satu tahunnya. Memasuki portofolio yang kedua akan dikelola lahan dengan luasan 3,85 ha di wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, Mojokerto tepatnya di Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko dengan kategori *plant cane*.

Varietas yang ditanam yaitu varietas Mojo 01, 6243 dan warteb dengan berbagai varietas unggul harapan baru dengan masa tanam 07 B-08 A yang perkiraan panennya akan dilakukan pada bulan Agustus 2020.

Sampai dengan saat ini, sudah ada Fintech untuk layanan *crowd-funding* sejenis di antaranya Tanifund, Igrow, dan Ternaknesia. Kelebihan dari investani sendiri yaitu adalah seluruh prospektus investasi yang ditawarkan pada investor merupakan bisnis yang dijalankan menggunakan *infra-structur, best practices business, expertise & experience human resources* yang dimiliki PTPN X Grup yang telah berjalan selama ini dengan kenaikan trend positif setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan investani bukan hanya sebagai perantara sehingga perhitungan bagi hasil menjadi maksimal untuk investor.

Lantas bagaimana dengan resiko kerugian yang dapat diperoleh investor? Herman menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengelola investani akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan investor dari resiko kerugian.

“Namanya bisnis pasti ada resiko. Namun apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi kerugian meskipun tidak diinginkan, maka akan diberlakukan hal berikut antara lain semua hasil penjualan tebu hasil panen pada proyek ini akan dibagikan kepada investor secara proporsional berdasarkan kepemilikan

saham, pengelola tidak mendapatkan bagian dari penjualan tebu hasil panen pada proyek ini, namun tidak juga diwajibkan mengganti kerugian dari investor. Singkatnya, jika terjadi kerugian maka komposisi bagi hasil

adalah investor sama dengan 100% dari hasil panen (*revenue*) dibagi proporsional kepemilikan investasi dan sedangkan pengelola dan investani tidak mendapatkan hasil *revenue* dari lahan tersebut,” terang Herman kembali.

Untuk bagi hasil keuntungan sendiri saat ini berlaku 70% Investor, 24% Pengelola, 5% Investani, 1% Koperasi karyawan (kustodian). Be-

saran tersebut bisa jadi akan berubah di proyek selanjutnya tergantung pada prospektus yang ditawarkan ke investor.

Transparansi juga menjadi faktor yang diutamakan dalam proyek investani ini,

jadi para investor tak perlu

khawatir karena segala sesuatu kegiatan proyek seperti pengolahan tanah, penanaman atau kepras, pemupukan, panen, giling hingga kondisi keuangan terakhir akan dilaporkan secara terperinci setiap bulannya pada laporan elektronik yang dikirim ke email para investor.

“Di masa mendatang, Investani ini bisa menjadi salah satu alternatif bahkan bisa tumbuh menjadi entitas unit yang akan *men-support* proses bisnis di PTPN X. Tentu saja Investani ini perlu dukungan dari para pihak terkait. Kami bersyukur, *support* dari Direksi dan partisipasi dari karyawan dalam mendukung Investani ini,” pungkasnya. ■

INVESTANI INI MERUPAKAN ALTERNATIF PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BAHAN BAKU TEBU YANG SANGAT MENGUNTUNGKAN DI MASA DEPAN BAGI PTPN X, SISTEMNYA SANGAT MUDAH DAN TRANSPARAN. SAAT INI TARGET MARKET INVESTANI ADALAH PARA INVESTOR YANG DIMULAI DARI KARYAWAN INTERNAL PTPN X, PTPN GROUP, ANGGOTA KOPERASI LAINNYA, DAN BAHKAN AKAN MERAHAI INVESTOR EKSTERNAL JIKA SUDAH MENDAPAT IJIN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)



Gaet Pihak Ketiga untuk Optimalkan Potensi Aset

Banyaknya aset milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang belum dimanfaatkan membuat Tim Optimalisasi terus melakukan terobosan. Salah satunya terus gencar mencari dan menggaet pihak ketiga untuk bekerjasama memanfaatkan aset yang ada.

■ LAPORAN: SISKI PRESTIWATI

SEKILAS eks Kantor PG Toelangan tidak banyak berubah, namun siapa yang tahu kalau bagian dalam eks kantor PG Toelangan sudah berubah 100 persen. Tidak lagi ada sekat-sekat ruangan di dalamnya, yang ada adalah sebuah gedung pertemuan yang mewah dengan interior yang *modern* lengkap dengan panggungnya.

Kepala Bidang Umum dan Pengembangan Aset PTPN X, Wakhyu P Siswosumarto mengatakan Eks kantor PG Toelangan telah dibangun *convention hall* yang diberi nama Graha Toelangan. Di atas lahan seluas 800 meter persegi, Graha Toelangan memiliki

daya tampung hingga 700 orang. Dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi, kamar ganti, jasa catering dan tempat parkir yang luas.

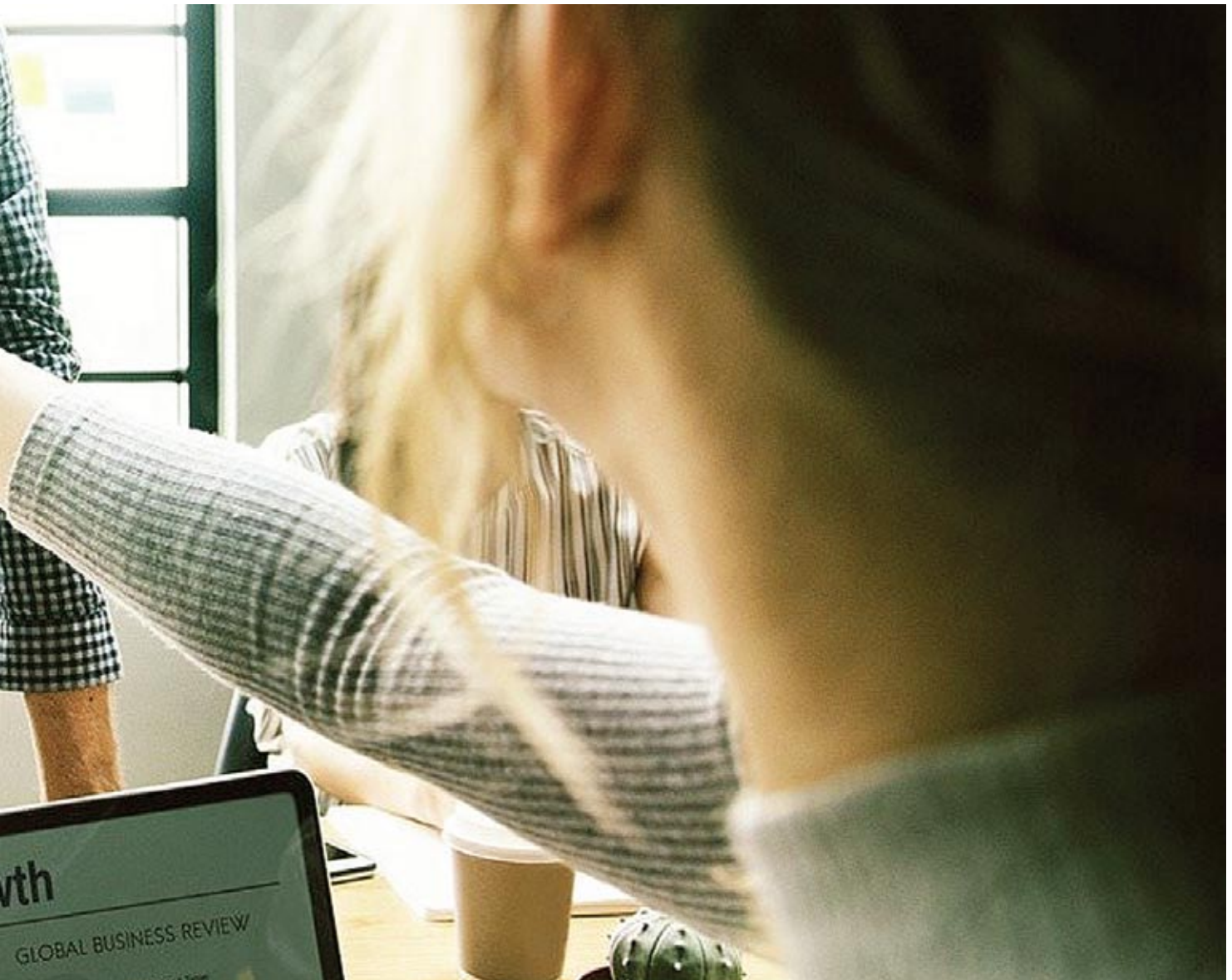
“Untuk mengelola Graha Toelangan ini, kami berencana menggandeng pihak ketiga. Saat ini, PTPN X tengah menjalin komunikasi intensif dengan Mahar Agung Organizer, salah satu *wedding organizer* cukup ternama di Surabaya.

Selain menggandeng Mahar Agung Organizer untuk mengelola Graha Toelangan, sambung Wakhyu, dua rumah dinas di samping kiri Gedung Pertemuan PG Toelangan pun telah disulap menjadi tempat nongkrong kekinian oleh Beni Siswanto, seorang

pengusaha kuliner dan pemilik panti asuhan di Sidoarjo ini.

Wakhyu menjelaskan dua rumah dinas yang dulu tidak terawat, di tangan Beni dirubah menjadi Kafe Kali Kopi yang menawarkan berbagai menu yang istimewa didukung dengan penataan ruangan yang *homey* serta hiburan *live music* setiap hari.

Tidak hanya di rumah dinas PG Toelangan, di tangan Latif, eks garasi PG Watoetoelis pun berhasil disulap menjadi kafe dengan nama Kopi Konco yang berhasil menarik perhatian masyarakat sekitar Watoetoelis. Kafe yang baru di-*launching* pada 26 Oktober 2019 ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan daerah yang dulu sempat membuat



orang yang melintas merasa takut, kini menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati dan menghabiskan waktu bersama teman dan kerabat.

Aset di PG Watoetoelis tidak hanya disewa oleh Latif untuk dijadikan tempat *kongkow* kekinian, tetapi juga ada Pabrik Struktur Beton yang menempati eks Gudang Ampas. Dimana, Pabrik Struktur Beton ini wilayah pemasarannya di luar Pulau Jawa.

“PT NMU juga berencana akan melakukan ekspansi klinik pratama di PG Watoetoelis dan PT NMU akan menyewa beberapa rumah dinas untuk pengembangan kliniknya,” jelasnya Wakhyu.

PTPN X pun telah mengkomersil-

kan vilanya yang berada di Tretes dan di Pacet. Untuk memasarkan Vila De Nusa, PTPN X memasarkan melalui *offline* dan *online*. Untuk *offline*, PTPN X bekerjasama sama dengan masyarakat sekitar vila dengan menawarkan Villa De Nusa kepada para wisatawan di Tretes yang tengah mencari Vila. PTPN X juga memanfaatkan media sosial untuk promosi, yaitu melalui *Facebook* dan *Instagram* De Nusa.

“Pemasaran secara *online*, kami menggandeng Traveloka dan Airbnb, dan sekarang ini kami sedang bekerjasama dengan PegiPegi,” sebutnya.

Wakhyu menambahkan PTPN X mulai menyewakan villa untuk umum pada September 2018 lalu dan

pihaknya sangat bersyukur karena animo dari masyarakat cukup tinggi. Dari catatan yang ada hingga September 2019 ini sudah lebih dari 150 penyewa menikmati vila De Nusa baik di Tretes maupun di Pacet.

“Selain untuk acara keluarga, penyewa juga kadang memakainya untuk syuting video klip ataupun kegiatan *outbond* dengan mendirikan tenda di teras vila,” imbuhnya.

Wakhyu juga menyampaikan Tim Optimalisasi aset akan terus melakukan terobosan dan promosi agar seluruh aset yang dimiliki PTPN X bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak ada lagi aset yang akan menjadi beban perusahaan. ■

MENTERI BUMN ERICK THOHIR:

GCG Jangan Hanya Lip Service

Baru tiga hari ditunjuk sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir sudah 'membunyikan alarm' dengan *statement* pedas yang diarahkan pada tata cara kelola Badan Usaha Milik Negara. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan secara benar dan sungguh – sungguh. Bukan sekedarnya, apalagi *lip service*.

” SUDAH banyak hal terjadi yang membuat citra BUMN kurang baik. Mohon maaf, saya dari swasta, jangan ada lagi penerapan GCG di BUMN yang hanya lip service,” kata Erick kepada media, di sela acara serah-terima jabatan dengan Rini Soemarno, Rabu (23/10) – atau tiga hari setelah ditunjuk menjadi Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju, Minggu (20/10).

Tidak jelas apa yang melatari pernyataan Erick Thohir di awal dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN terkait GCG. Mungkin sebagai pengusaha pihaknya sudah mendapat informasi tentang banyak hal terkait citra BUMN yang kurang baik. Sehingga ke depan, tata kelola BUMN lebih ditekankan pada penerapan GCG secara tepat dan benar.

Bahkan secara jelas Erick mengatakan pihaknya akan segera melakukan ‘bersih-bersih’ di BUMN, agar tata-kelola ke depan lebih baik dan profesional dengan basis penerapan prinsip GCG. “Mungkin sudah waktunya juga saya melakukan bersih-bersih,” kata Erick.

Sehingga tidak heran ketika dua minggu setelah itu, Erick memecat lima direksi Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia, karena temukan pelanggaran yang dianggap serius. Juga memberhentikan mantan Dirut Garuda Indonesia sebagai Komisaris Utama di enam anak perusahaan. Juga meminta anak usaha Garuda Indonesia untuk dibenahi, dan mengaku ‘tergelitik’ ketika mengetahui ada cucu

usaha Garuda Indonesia bernama PT Garuda Tauberes Indonesia.

Erick Thohir mengaku sangat serius menata BUMN ke depannya, termasuk kemungkinan menutup dan melakukan *merger* anak usaha, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi tentang Kewenangan dan Memberikan Hak sepenuhnya terkait kebijakan tersebut kepada Menteri BUMN.

Sambil menunggu PP dimaksud, Erick sudah membuat Kep-Men BUMN tentang Penataan Anak Usaha dengan beleid No: SK-315/MBU/12/2019. Semua itu dimaksudkan agar pengelolaan BUMN ke depan lebih jelas pijakan hukumnya, serta profesional dalam pengelolaannya dengan basis penerapan prinsip GCG.

Istilah GCG selama ini memang lebih populer di kalangan pasar modal (bursa efek) - khususnya untuk emiten. Menteri BUMN, Erick Thohir yang *nota-bene* seorang pengusaha swasta nasional – terlebih berbasis pendidikan di AS, sudah sangat familiar dengan GCG

yakni mendorong terciptanya keterbukaan publik dalam pelaporan kinerja usaha dan keuangan – berbasis kerja profesional, akuntabilitas dan mandiri, guna mencapai hasil optimal yang berkualitas.

Prinsip GCG sebenarnya sudah menjadi *concern* pemerintah sejak 1998. Tapi sebatas kaitan pada peraturan tentang sistem pelaporan bagi perusahaan *go public* melalui pasar modal. Itu pun belum bisa mendorong seluruh emiten melaksanakan GCG secara sungguh-sungguh.

Masalah GCG baru menjadi isu kronis ketika perusahaan energi terkemuka di AS yakni Enron Corporation terungkap melakukan praktek *window dressing* di awal tahun 2000-an. Dengan memanfaatkan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama di AS, Enron membuat pelaporan usaha dan keuangan secara palsu untuk mengecoh otoritas dan investor di bursa. Dari skandal Enron inilah kemudian masalah pentingnya GCG menjadi tren dunia, termasuk di Indonesia.



Bahkan pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus untuk menangani masalah GCG yakni Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi – dengan tugas pokok antara lain merumuskan, menyusun, memprakarsai, serta memantau penerapan sekaligus perbaikan di bidang GCG.

Pada perkembangannya, penerapan GCG saat itu bukan hanya di lingkungan pasar modal, tapi melebar terhadap kemungkinan BUMN juga ikut menerapkan. Dari sinilah kemudian pada tahun 2002 terbit Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN. Artinya sejak itu BUMN wajib menjadikan GCG sebagai landasan operasional.

Prinsip GCG melalui KepMenNeg BUMN itu antara lain meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, independen atau kemandirian, kewajaran (*fairness*) dan prinsip pertanggungjawaban. Kebijakan ini bukan untuk kepentingan BUMN semata, tapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan iklim investasi nasional pasca krisis moneter.

Lantas, apakah seluruh BUMN sudah menerapkan prinsip GCG? Jawabannya, belum. Sebagian besar sudah. Tapi harus diakui, sampai 9 (sembilan) tahun KepMenNeg BUMN itu diberlakukan, masih ada BUMN yang belum sepenuhnya menerapkan, atau masih ‘setengah-setengah’ menerapkan. Sampai akhirnya diterbitkan revisinya berupa Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Kewajiban Penerapan GCG pada BUMN.

Namun, hingga 8 (delapan) tahun revisi Kepmen BUMN tentang GCG itu diberlakukan, nampaknya belum juga efektif memaksa sebagian BUMN menarapkan prinsip GCG secara penuh. Mungkin juga masih ada yang bersifat *lip service*. Terbukti pada Oktober 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengingatkan perlunya BUMN konsisten menerapkan GCG.



“KPK kembali mengingatkan kepada penyelenggara negara di BUMN agar menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan bisnisnya. Semestinya dengan kewajiban dan standar GCG yang lebih kuat di BUMN dapat menjadi contoh bagi praktik pencegahan korupsi di sektor swasta,” kata Jubir KPK, Febri Dian-syah, Rabu (2/10).

Merujuk kepada peringatan KPK tersebut, nampaknya apa yang disampaikan Erick Thohir di awal tugasnya sebagai Menteri BUMN terkait istilah ‘GCG *lip service*’ – tidaklah berlebihan. Sehingga wajar pula jika pada pembinaan BUMN (termasuk sektor perkebunan) kedepan lebih dititik-takkan pada penguatan prinsip GCG, agar bisa dicapai hasil yang lebih baik, efektif dan efisiensi, pertumbuhan berkelanjutan serta stabilitas keuangan yang berkualitas.

GCG PTPN X

PTPN X – sebagai bagian dari BUMN *Holding* Perkebunan – telah lama menerapkan prinsip Tata Kelola

Perusahaan (GCG) yang baik dan benar dalam menjalankan roda pekerjaannya, baik dalam konteks *on farm* dan *off farm*, maupun pada manajerial bisnis secara keseluruhan.

“Kami secara konsisten menerapkan prinsip GCG dan melakukan *update* sesuai dinamika dan perkembangan melalui persetujuan komisaris dan pemegang saham. Namun dinamika dan perkembangan terkadang tak bisa dihindari, sehingga memaksa untuk dilakukan penyesuaian sesuai persetujuan dewan komisaris dan pemegang saham,” kata Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo.

Dwi mengatakan, PTPN X memiliki acuan kerja yang jelas sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM). Artinya direksi dan karyawan tidak bisa membuat program baru yang tidak ada di RKAP dan RPJM.

Prinsip-prinsip utama pada GCG, kata Dwi, tetap dijadikan sebagai *backbone* dalam menjalankan usaha. Diantaranya prinsip *fairness* atau



kesetaraan dan kewajaran, *transparency* atau keterbukaan informasi, *accountability* atau akuntabilitas, *responsibility* dan *independency* atau kemandirian.

Dalam konteks transparansi, misalnya PTPN X telah menerapkan *E-Proc* pada proses pengadaan barang dan jasa yang bisa diakses oleh publik. “Sehingga tidak ada lagi intervensi atau titipan dari direksi. Semua proses dilakukan, dan keputusan akan diambil berdasarkan pemenuhan persyaratan,” kata Dwi.

Dwi menambahkan, *basic* kerja PTPN X selalu dilandasi nilai-nilai yang telah dibangun perusahaan, yaitu Sinergi, Integritas dan Professional (SIPro). “Nilai-nilai yang dibangun PTPN X sejatinya sudah mendasari prinsip-prinsip GCG, sehingga penerapan GCG sejauh ini bisa konsisten terlaksana dengan baik,” tambahnya.

Penerapan GCG di PTPN X juga bisa dilihat dari hasil *assessment* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni

mencapai predikat ‘Baik’ dengan skor 84,29%. Di lingkungan BUMN, skor itu tergolong baik dan menjadi pencapaian positif bagi perusahaan.

Direktur Komersil PTPN X, Slamet Djumantoro mengatakan dalam mendukung penerapan GCG. PTPN X telah ada peraturan internal sebagai *basic* operasional perusahaan sesuai prinsip GCG. Diantaranya Anggaran Dasar Perseroan, *Code of Corporate Governance* (COCG), *Code of Conduct* (COC), Pedoman *Whistle Blowing System*, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Pengadaan Barang & Jasa, serta azas-azas GCG itu sendiri.

“Selain itu juga ada budaya kerja yang telah dibangun oleh PTPN X, yakni profesional, produktif dan pembelajar. Artinya penerapan GCG juga merupakan cerminan budaya kerja di PTPN X. Maka itu evaluasi SDM merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan,” kata Slamet.

Slamet berharap semua elemen dalam perusahaan konsisten dalam menerapkan prinsip GCG, menjalankan nilai dan budaya kerja perusahaan, serta melaksanakan seluruh pedoman kerja secara seksama, sehingga nantinya *skoring* hasil *assessment* oleh BPKP mengenai GCG nilainya bisa lebih baik lagi.

Penerapan prinsip GCG di PTPN X dilakukan secara integral dan komprehensif. Pada Direktorat Operasional, misalnya konteks transparansi dilakukan terbuka pada setiap penyusunan program kerja hingga evaluasi kinerja. Keterbukaan juga diterapkan dalam penyusunan investasi.

“Sedari awal semua pihak harus memahami bahwa investasi yang diajukan harus benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Bukan sekedar *shopping list* (daftar belanja). Penerapan GCG sangat dibutuhkan untuk mencapai target atau tujuan yang ditetapkan,” kata Direktur Operasional PTPN X, Aris Toharisman.

Bahkan pada Direktorat Operasional, telah dibentuk ‘Komite

Investasi’ yang terdiri dari seluruh bagian, mulai dari bidang teknik, pengelolaan, tanaman, hingga keuangan SPI. “Komite ini bertugas melakukan penggalian dan klarifikasi apakah benar investasi tersebut diperlukan,” kata Aris.

Pada konteks akuntabilitas, lanjut Aris, semua program yang telah ditetapkan harus terukur secara jelas. Misalnya penyusunan program kerja awal giling, penentuan target jumlah gula yang dihasilkan pabrik juga. Hal ini juga berkaitan dengan *reward* atau *punishment* untuk masing-masing pihak. Termasuk untuk promosi atau mutasi pada karyawan.

“Ada banyak instrumen yang kami gunakan. Mulai dari aplikasi seperti *e-farming* untuk lahan, Narada untuk bongkar-muat dan angkut, serta laporan dari SPI. *Alhamdulillah*. Dengan GCG, bentuk-bentuk kecurangan hampir tidak pernah terjadi,” tambahnya.

Bagi PTPN X, penerapan GCG bukan sekedar menyelaraskan dengan tuntutan regulasi, namun merupakan keharusan guna mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan –sesuai *best practices* atau standar yang berlaku.

Kepala Urusan Analisa Bisnis dan Resiko PTPN X, Bayu Firmansyah mengatakan penerapan GCG bukan hanya mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, tetapi sebagai bentuk evaluasi perusahaan agar lebih mampu bersaing secara global dan bertahan dalam segala dinamika yang ada.

Kedepan, kata Bayu, selain terus *concern* dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan GCG, manajemen PTPN X juga perlu melakukan *update* terhadap seluruh pedoman kerja yang ada disesuaikan dengan perkembangan. Termasuk optimalisasi system pengendalian gratifikasi dan *whistle blowing system*.

Jika semua komponen dan persyaratan telah dilakukan secara *gradual* oleh PTPN X terkait penerapan GCG, maka alarm yang dibunyikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir terkait GCG, sudah terlaksana dengan baik di PTPN X. ■**Tim**

GCG Kunci Keberhasilan Bisnis Global

Sebagai bagian dari keluarga besar BUMN, PT Nusantara Nusantara (PTPN) X harus menjalankan gerak perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam menerapkan dan menjalankan program *Good Corporate Governance* (GCG) dalam membangun dan mengembangkan perusahaan di era kompetisi global ini.

■ LAPORAN: SISKAPRESTIWATI

GCG diyakini sebagai salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Pada tahun 1998, survey dari Booz-Allen di Asia Timur menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *Corporate Governance* paling rendah dengan skor 2,88 jauh dibawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG di korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.

Agar seluruh korporasi di Indonesia kuat dan mempunyai daya saing di era global ini, Pemerintah Indonesia mewajibkan penerapan GCG di seluruh perusahaan milik Negara, tidak terkecuali di PTPN X. Ditemui di ruang kerjanya Jalan Jembatan Merah Surabaya, Direktur Utama PTPN, Dwi Satrio Annurogo mengungkapkan penerapan GCG di PTPN X menjadi hal yang wajib dan harus dilakukan.

“Apalagi sekarang, kita punya nilai-nilai perusahaan yaitu sinergi, integritas, dan profesional dimana ini sangat bisa diimplementasikan bila GCG berjalan dengan baik,” kata Dwi.

GCG di PTPN X, sambungnya, dari sisi tata aturan, sesuai dengan peraturan BUMN. Sebagai bagian dari keluarga besar BUMN, PTPN X

juga harus menjalankan dan mematuhi tata kelola GCG yang ada. PTPN X sudah mempunyai kerangka GCG yang sudah dituangkan dalam peraturan GCG di PTPN X dan setiap tahun, pihaknya melakukan *review* terhadap peraturan tersebut.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu *fairness* atau kesetaraan dan kewajaran, *transparency* atau keterbukaan informasi, *accountability* atau akuntabilitas, *responsibility* atau pertanggungjawaban dan *independency*.

TRANSPARENCY

Dwi mencontohkan penerapan transparansi di PTPN X adalah penerapan e-proc dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dimana, PTPN X mempunyai tim dan sudah ada sistemnya. Semua kebutuhan barang dan jasa bisa diakses oleh siapa saja dengan mengunjungi website PTPN X. Meskipun semua bisa mengakses informasi, namun sesuai dengan perundangan yang berlaku yang bisa mengikuti adalah para vendor yang sudah terdaftar.

“Pengadaan barang dan jasa dilakukan transparan dan tidak ada lagi intervensi atau “titipan” dari direksi. Semua proses dilakukan dan keputusan akan diambil berdasarkan pemenuhan persyaratan mulai dari sisi administrasi, sisi teknis, sisi harga dan hal-hal yang telah menjadi keputusan tim,” paparnya.

Dwi menambahkan PTPN X juga memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya RKAP dan RJPP tersebut, direksi dan seluruh karyawan PTPN X tidak bisa membuat program baru yang tidak ada di dalam RKAP ataupun RJPP, semua program kerja sudah terstruktur, terencana, terprogram.

“Dengan dinamika yang ada, memang tidak bisa dihindari bila kondisi mengharuskan perusahaan membuat program baru yang sebelumnya tidak ada di dalam RKAP dan RJPP. Hal itu bisa dilakukan namun harus atas sepengetahuan dan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham,” paparnya.

PTPN X juga telah melaksanakan tugas untuk membuat laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan. Selain membuat dan melaporkan laporan keuangan, PTPN X juga menerbitkan *annual report* atau laporan keuangan setiap tahun yang di-*publish* sehingga masyarakat pun bisa mengetahui kinerja perusahaan.

ACCOUNTABILITY

Kaitannya dengan fungsi pelaksanaan dan tanggungjawab, jelas Dwi, tentunya ada pemantauan tugas dan kewenangan mulai dari RUPS yang ada kaitannya dengan kebijakan pemegang saham, Dewan Komisaris yang memberikan arahan kepada direksi dan direksi yang menjalankan keputusan operasional di perusahaan.

Di tingkat teknis sudah ada organisasi yang melaksanakan seluruh program kerja perusahaan. Struktur organisasi dan organ-organ organisasi yang ada juga sudah mempunyai

deskripsi jabatan dan uraian tugas ditambah dengan adanya program program Key Performance Indicator (KPI). Dengan adanya deskripsi jabatan dan uraian tugas, setiap karyawan memahami tugas mereka dan akan menyelesaikan segala urusan yang berada di dalam kewenangannya. Bila hal tersebut diluar kewenangannya maka bisa dilaporkan ke strata yang lebih tinggi sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

“Sekali lagi tidak ada praktik “titipan”, bahkan bila ada masalah khusus yang harus melibatkan direksi, semua akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan job diskripsi yang ada. Bahkan, dalam mengambil keputusan pun direksi akan melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI),” imbuhnya.

Di PTPN X juga sudah ada SPI yang setiap saat melakukan audit *periodic* ke seluruh unit usaha dan sistem kerja yang ada. SPI juga akan melihat apakah SOP yang sudah ada ini masih layak diterapkan dalam kondisi saat ini atau memerlukan penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada.

Perusahaan pun menerapkan dan menjalankan sistem *reward* dan *punishment*, walaupun setiap perusahaan tentunya tidak ingin ada satu karyawan pun yang melakukan pelanggaran. Ini juga

bisa menjadi salah satu contoh, kasus khusus yang melibatkan jajaran direksi dalam mengambil sebuah keputusan. Sekali lagi, dalam memutuskan sebuah perkara, direksi akan tetap berdasarkan fakta, klarifikasi dan adanya peran SPI yang merekomendasi.

RESPONSIBILITY

Ada tata aturan dan perundangan yang wajib ditaati oleh PTPN X. Dari tata aturan yang ada, PTPN X tidak hanya mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan usaha sebagai *profit center* tetapi juga harus memiliki menfaat kehadiran BUMN bagi masyarakat sekitar. Sesuai dengan peraturan yang ada, PTPN X pun melaksanakan program, corporate social responsibility dan PKBL. Kedua program ini tidak hanya diberikan

berupa bantuan yang bersifat fisik seperti pembuatan irigrasi, pembangunan rumah ibadah dan lain-lain. Tetapi PTPN X juga memperhatikan pembangunan manusia seutuhnya.

“Kami juga telah melakukan program pelatihan petani tebu milenial sebagai upaya membangun regenerasi petani tebu rakyat. Saat ini sudah ada 7 angkatan, dimana satu angkatan ada 350 petani milenial,” sebutnya.

Dalam menyalurkan dana CSR ini, jelas Dwi, tim dari PTPN X tidak hanya menunggu proposal yang masuk, tetapi tim juga jemput bola dengan melakukan penelusuran sendiri. Di Tahun 2019 ini, PTPN X telah melaksanakan program CSR berupa bedah rumah di Jember, Kremboong Sidoarjo, dan Klaten dimana penerima bantuan ini belum mendapat perhatian dari pemerintah.

“Kami pun taat terhadap pajak dan semua kami laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

INDEPENDENCY DAN FAIRNESS

Dengan adanya tata nilai perusahaan yaitu Profesional. PTPN X menjalankan roda perusahaan dengan independen tanpa dipengaruhi oleh pihak lain serta bebas dari pengaruh politik apapun. Dwi memberikan



contoh dalam hal menentukan pejabat dalam memimpin sebuah unit usaha atau bidang, jajaran direksi akan mengambil keputusan siapa yang tepat untuk mengisi sebuah posisi dengan berdasarkan *fit and proper test*, laporan kinerja dan wawancara pendalaman terhadap calon yang dinilai memenuhi persyaratan.

Begitu pula dalam menyusun sebuah program kerja, ungkap Dwi, semua itu harus melalui tahapan-tahapan yang ada, mulai dari dilakukannya kajian teknis, dilakukannya kajian ekonomi yang dilakukan oleh tim.

Profesionalitas dan kesetaraan ini juga diterapkan untuk eksternal atau mitra PTPN X. Saat ini, PTPN X menganggap semua mitra itu sama kedudukannya, tidak ada mitra istimewa. Misalkan, mitra petani tebu, tidak ada petani istimewa, walaupun ada klasifikasi itu berdasarkan kemampuan petani, sehingga pendampingan yang dilakukan oleh PTPN X itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan petani yang antara satu petani dengan petani yang lain tidaklah sama.

Dwi menambahkan untuk para vendor *supplier* juga diperlakukan sama dan tidak dibeda-bedakan, begitu pula dengan mitra pembeli gula. Dimana, sistem penjualan gula dilakukan dengan sistem lelang yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pemenang lelang adalah pembeli yang memberikan tawaran dengan harga tertinggi.

“Kami berusaha terus adil kepada petani, vendor *supplier*, pembeli gula dan tentunya dengan karyawan kami. Perusahaan akan memberikan reward untuk karyawan yang berprestasi,” ujarnya.

Dwi menjelaskan penghargaan yang diberikan mulai dari pemberian sertifikat, promosi jabatan, hingga pemberian bonus. Namun untuk poin terakhir ini, tentunya tidak bisa serta merta bisa dilakukan karena harus melihat posisi perusahaan. Hal ini baru akan dilakukan saat perusahaan memperoleh laba dan melebihi target yang ditentukan serta cash flow yang memenuhi.

Jajaran direksi tentunya akan memperhatikan hak-hak pekerja. Secara berkesinambungan, Jajaran direksi berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan serikat pekerja mengenai apa yang menjadi aspirasi karyawan.

OPTIMALISASI ASET

Sejalan dengan program Holding Perkebunan PTPN III (Persero) yaitu program Optimalisasi aset, PTPN X juga tengah gencar merealisasikan program tersebut. Langkah pertama, PTPN X membentuk organisasi, dimana dulu tim optimalisasi aset ini hanya tim adhoc yang kurang kuat. Tidak hanya organisasi, PTPN X pun juga telah menyusun SOP sehingga seluruh anggota di organisasi tersebut sudah memahami tugas dan kewenangannya.

Langkah kedua, pola kerja yang sudah terstruktur sehingga setiap program yang terkait dengan program optimalisasi harus dilakukan kajian, yaitu kajian teknis dan kajian ekonomi. Bila program optimalisasi aset ini melibatkan pihak ketiga maka kajian yang dilakukan pun tidak hanya kajian teknis dan kajian ekonomi saja tetapi lebih komprehensif yaitu harus dilakukan kajian legal-nya.

Masih menurut Dwi, bila semua persyaratan sudah lengkap, maka jajaran direksi akan meminta izin ke Dewan Komisaris terlebih dahulu. Sesudah mengantongi persetujuan dari Dewan Komisaris, program tersebut belum bisa dilaksanakan, sebab PTPN X juga harus meminta izin ke Pemegang Saham. Tahapan ini yang harus dilakukan dan sesuai dengan tata aturan dan perundang-undangan yang ada.

“Alhamdulillah, di tahun 2019 ini, program optimalisasi aset sudah bisa mendatangkan *revenue* hingga menyentuh angka Rp 20 miliar,” tuturnya.

Untuk melihat apakah penerapan GCG itu sudah berjalan dengan baik, Dwi mengungkapkan itu ada *tools*-nya. Dimana, *tools* tersebut antara lain adalah *assessment*, PTPN X meminta bantuan BPKP untuk *review* GCG yang telah dilakukan di perusahaan ini. “Banyak elemen-elemen yang diukur dan PTPN X masuk kategori baik, namun masih

ada beberapa parameter penilaian yang masih harus ditingkatkan dan tertuang dalam bentuk area of improvement (AOI),” ujarnya.

Beberapa rekomendasi tersebut, antara lain pemutakhiran pedoman tata kelola perusahaan (COCG), Pedoman Perilaku (COC), *Board Manual*, Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS), Pedoman Manajemen Resiko.

Dwi menambahkan dinamika saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, PTPN X juga diminta untuk lebih intens dalam mengedukasi karyawan terkait dengan WBS ini. Hal ini bisa saja memang tidak ada pelanggaran atau karyawan masih takut untuk melapor bila mereka mengetahui adanya pelanggaran. Sosialisasi akan WBS ini tentunya akan ditingkatkan agar WBS di PTPN X sudah sesuai dengan penerapan GCG yang baik.

PENERAPAN GCG DI ANAK PERUSAHAAN

Sama seperti PTPN X, anak perusahaan pun menerapkan GCG dengan azas kepatuhan di atas PTPN X yaitu Holding Perkebunan PTPN III (Persero) dan Kementerian BUMN. PTPN X juga telah *membuat audit charter* yang telah ditandatangani oleh seluruh direksi anak perusahaan. Dimana, PTPN X induk bisa melakukan audit ke anak perusahaan.

“Mulai tahun 2018, SPI PTPN X bisa melakukan audit baik itu audit *periodic* ataupun audit khusus. Tata laksana audit yang kami lakukan pun mengacu pada standar Holding Perkebunan dan Kementerian BUMN,” jelasnya.

Dwi mengakui memang penerapan GCG di anak perusahaan masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini diketahui berdasarkan informasi dari SPI yang telah melaksanakan audit. Adanya temuan-temuan tersebut merupakan hal yang wajar apabila sistem belum terbentuk dengan sempurna. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, PTPN X memberikan arahan kepada anak perusahaan untuk melakukan penertiban dan perbaikan untuk lebih baik lagi. ■

Berbagai Instrumen Kawal Penerapan GCG

Supaya bisa mengelola perusahaan secara baik, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) terus berupaya dijalankan dengan baik oleh semua direktorat di PT Perkebunan (PTPN) X. Internalisasi dan penerapan berbagai instrumen dilakukan agar GCG bisa dipahami dan diterapkan.

■ LAPORAN: SAP JAYANTI

DIREKTUR Operasional PTPN X Aris Toharisman mengatakan, penerapan GCG sangat dibutuhkan untuk mencapai target atau tujuan yang ditetapkan perusahaan namun tetap sesuai dengan peraturan. "Kami di direktorat operasional juga menerapkan prinsip-prinsip GCG itu. Salah satunya dari sisi transparansi. Mulai dari menyusun program kerja, evaluasi kinerja juga kami lakukan dalam bentuk forum terbuka. Kalau ada yang menyampaikan keberatan atau masukan dipersilakan," tutur Aris.

Keterbukaan juga diterapkan dalam penyusunan investasi. Sedari awal semua pihak harus memahami bahwa investasi yang diajukan harus benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Bukan sekedar melakukan shopping list atau membuat daftar belanja. Bahkan direktorat operasional membentuk komite investasi yang bertugas melakukan penggalian dan klarifikasi apakah benar investasi tersebut diperlukan. Komite ini terdiri dari seluruh bagian mulai dari bidang teknik, pengolahan, tanaman, keuangan, SPI dan lain-lain agar investasi yang dilakukan benar-benar bermanfaat dan tidak ditumpangi kepentingan-kepentingan yang lain.

Prinsip lain dalam GCG adalah akuntabilitas. "Semuanya jelas terukur," ujarnya. Ia mecontohkan penyusunan program kerja di awal

giling. Misalnya penentuan target berapa jumlah gula yang dihasilkan di pabrik. Dari target yang sudah ditetapkan tentunya berkaitan pula dengan reward atau punishment untuk masing-masing individu.

Kemudian mengenai prinsip responsibility atau pertanggungjawaban. Karyawan PTPN X harus bertanggung jawab atas tugas dan target yang dibebankan kepadanya. Aris mencontohkan salah seorang pejabat puncak yang akhirnya dipindahkan karena tidak mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan. Pemin-dahan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen dari seorang pemimpin terhadap target yang diberikan kepadanya.

Agar prinsip-prinsip GCG bisa diterima, Aris mengatakan bahwa

dalam setiap rapat koordinasi, hal tersebut selalu disampaikan dan ditekankan kepada semua karyawan. Selain melakukan internalisasi kepada seluruh karyawan, monitoring dengan berbagai instrumen juga tetap dilakukan. Setiap karyawan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

"Ada banyak instrumen yang kami gunakan. Mulai dari aplikasi seperti e-farming untuk lahan, Narada untuk bongkar, muat dan angkut serta menggunakan laporan dari SPI. Alhamdulillah dengan selalu mengingatkan tentang GCG ini, bentuk-bentuk kecurangan minimal sekali, bahkan hampir tidak ada. Dan saya sampaikan, kita tidak ada lagi toleransi untuk penyimpangan-penyimpangan itu," ujar Aris tegas. Dengan pelaksanaan kerja yang sesuai GCG





diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi bagi perusahaan.

FOKUS PERLUASAN LAHAN

Pada tahun 2020 PTPN X akan fokus melakukan ekstensifikasi. Hal ini dilakukan melalui beberapa cara. Pertama dengan pembelian HGU, kedua dengan menyewa lahan dan ketiga agroforestry. Untuk agroforestry Aris mengakui ada beberapa kendala di lapangan sehingga mengakibatkan perkembangannya kurang begitu pesat. "Banyak juga lahan yang diperuntukkan bagi PTPN X ternyata di lapangan sudah diokupansi oleh masyarakat. Jadi kita berupaya bagaimana lahan tersebut tetap dapat ditanami tebu tanpa menimbulkan gejolak dengan warga.

Di sisi lain, PTPN X merencanakan untuk membeli lagi lahan HGU menggunakan dana PMN yang masih tersisa. Setidaknya sudah ada tujuh lokasi yang dianggap cocok untuk ditanami tebu di antaranya di wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung dan Jombang.

Dikatakan Aris, kontribusi bahan baku yang berasal dari lahan HGU dan agroforestry memang masih minim karena ada lahan yang produk-

tivitasnya masih di bawah 50 ton per Ha. Walaupun ada juga di sebagian wilayah yang sanggup menghasilkan di atas 70 ton per Ha. "Target kami minimal 80 ton per Ha karena kami kelola sendiri," ujarnya.

Karena belum optimalnya upaya ekstensifikasi yang dilakukan, Aris mengakui BBT yang dihasilkan belum terlalu signifikan. "Dari perluasan lahan kira-kira 500 Ha yang sekarang ditanamin, kalau produktivitasnya 80 ton per Ha saja, berarti baru bisa menghasilkan sekitar 40 ribu ton tebu. Masih jauh dari kebutuhan kita yang sebesar 4 juta ton," tuturnya.

Terkait dengan hal tersebut, Aris menyampaikan bahwa perolehan tebu dan produksi gula pada musim giling tahun ini kurang menggembirakan. Dari yang seharusnya 4,1 juta ton hanya tercapai 3,8 juta ton. Sedangkan produksi gula hanya mampu 304 ribu ton dari target 340 ribu ton. "Artinya, dari angka kinerja produksi, sebagian besar memang tidak mampu sesuai dengan RKAP. Namun dari sisi laba/rugi, kita mampu menahan. Maksudnya begini, kalau tahun ini kita mau mencapai tebu di atas 3,8 juta ton sebenarnya bisa saja. Tapi perusahaan akan rugi karena kita harus membeli dengan harga tinggi,"

tutur pria yang pernah menjabat sebagai Direktur P3GI ini.

Pada akhir musim giling, harga tebu di tingkat petani melonjak tajam karena dipicu adanya beberapa Pabrik Gula (PG) baru yang melakukan commissioning dan membutuhkan tebu. "Jelang akhir Agustus-September, harga tebu naik tajam karena ada PG yang commissioning sehingga tebu harga berapa pun dibeli. Ini yang kemudian menyebabkan harga di pasaran jadi rusak. Akhirnya kita stop di angka 3,8," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Aris menegaskan bahwa PTPN X harus memiliki daya saing agar petani tetap loyal untuk mengirimkan tebunya ke PTPN X. "Karyawan di lapangan diberi kebebasan namun tetap dalam koridor. Pendekatan di masing-masing wilayah bisa jadi akan berbeda. Saat ini masih diidentifikasi dulu kondisinya baru nanti akan dibuatkan standar untuk lingkup wilayah regional. Akan kami carikan model untuk membuat pola-pola kerjasama yang sifatnya lokal. Fleksibel namun tetap ada payung hukumnya. Kami akan buat tata kelolanya, aturan mainnya agar sesuai GCG dan kemudian akan segera disosialisasikan," pungkas Aris. ■

Komitmen, Jadi Modal Utama GCG

Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan salah satu langkah penting bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*), serta mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta *stakeholders* lainnya.

■ LAPORAN: SEKAR ARUM

HAL ini pulalah yang dijabarkan oleh Direktur Komersil PTPN X, Slamet Djumantoro. Diterangkannya bahwa penerapan GCG di PTPN X merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Adapun azas GCG yang dianut atau umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness atau Kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha PTPN X.

"Dan untuk PTPN X sendiri penerapan setelah diassessment oleh BPKP telah mencapai predikat kategori 'Baik' dengan skor 84,29 dari skor maksimum 100. Hal ini tentu menjadi pencapaian yang sangat bagus bagi perusahaan"

Ditambahkan Slamet, bahwa penerapan GCG yang

ada di PTPN X mengacu pada praktik terbaik yang akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan dan membawa Perseroan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Didalam mendukung penerapan GCG di perusahaan, PTPN X memiliki peraturan internal antara lain: Anggaran Dasar Perseroan, dengan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Nanda Fau Iwan, SH, M.Kn No. 17 tanggal 25 Juli 2019 Pedoman Tata Kelola Perusahaan/*Code of Corporate Governance* (COCG), Pedoman Perilaku/*Code of Conduct* (COC), *Board Manual*, Pedoman *Whistle Blowing System*, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Pengadaan Barang & Jasa, Penerapan Azas-azas GCG dilingkungan PTPN X.

Lantas bagaimana penerapan GCG masuk ke dalam Budaya Kerja Perusahaan? Dijelaskan Slamet kembali bahwa budaya kerja perusahaan saat ini adalah Profesional, Produktif dan Pembelajar. Dalam melaksanakan dan menghayati budaya kerja tersebut, PTPN X telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai panduan kepada Pemegang saham, Komisaris dan Direksi dalam menerapkan praktik-



praktik GCG dilingkungan PTPN X baik di Kantor Pusat maupun Unit Usaha. Untuk itu praktik-praktik GCG pada tingkat operasional, seluruh organ perusahaan telah dibekali dengan Pedoman Perilaku/*Code of Conduct* yang mengatur tentang Etika Kerja dan Etika Usaha dalam beraktivitas diperusahaan.

“Penerapan GCG sendiri merupakan cerminan budaya kerja di PTPN X. Untuk itu evaluasi SDM merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, penerapan GCG di bidang produksi dan keuangan juga mengacu kepada azas GCG yang sama yakni (TARIF) yaitu dengan membangun system yang mendukung seperti penerapan *e-proc* dalam pengadaan barang dan jasa, Transparansi terhadap informasi terkait Laporan Produksi dan Keuangan secara berkala, Penerapan ERP/SAP untuk akuntabilitas laporan keuangan, *E farming*, penerapan ISO 9001, ISO 14000.

Slamet pun menghimbau bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan GCG, antara lain komitmen terhadap penerapan tata

kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, perbaikan pengungkapan informasi dan transparansi. Yang mempunyai tujuan akhir yakni memiliki tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam jangka panjang.

“Saya berharap nantinya penerapan GCG di PTPN X dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang

“SAYA BERHARAP NANTINYA PENERAPAN GCG DI PTPN X DAPAT MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN BERUPA PENINGKATAN KINERJA (*PERFORMANCE*) DAN PENCiptaan CITRA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*). SALAH SATUNYA DENGAN PENINGKATAN SKOR DARI YANG SAAT INI MENCAPAI PREDIKAT ‘BAIK’, DIHARAPKAN KEDEPANNYA PENCAPAIAN GCG DI PTPN X DAPAT MENCAPAI PREDIKAT ‘SANGAT BAIK’. DITUNJANG DENGAN MELAKUKAN PERBAIKAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN BESERTA PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSINYA,”

baik (*good corporate governance*). Salah satunya dengan peningkatan skor dari yang saat ini mencapai predikat ‘Baik’, diharapkan kedepannya pencapaian GCG di PTPN X dapat mencapai predikat ‘Sangat Baik’. Ditunjang dengan melakukan

perbaikan praktik tata kelola perusahaan yang berkelanjutan beserta pengungkapan informasi dan transparansinya,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, terdapat beberapa parameter penilaian yang masih harus ditingkatkan penerapannya di PTPN X yang tertuang dalam bentuk *Area of Improvement* (AOI) yang akan dievaluasi penerapannya dan ditindaklanjuti perbaikan kedepannya.

Beberapa rekomendasi dari hasil *assessment* yang akan ditindaklanjuti untuk mendukung penerapan GCG yang lebih baik antara lain Memutakhirkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (COCG), Pedoman Perilaku (COC), *Board Manual*, Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS), Pedoman Manajemen Risiko.

Dan juga Membuat pedoman tambahan/prosedur terkait penerapan tata kelola perusahaan. Membentuk unit pengendalian Gratifikasi dan melakukan evaluasi pengendalian gratifikasi di PTPN X. Melakukan pembentukan tim WBS dan evaluasi penerapan WBS di PTPN X. Serta meningkatkan sosialisasi penerapan GCG kepada seluruh karyawan. Meningkatkan kualitas *Annual Report*. ■



Komitmen PTPN X dalam Penerapan GCG

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan merupakan komitmen penuh dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, terlebih dalam pengelolaan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham maupun kepentingan *stakeholder* lainnya.

■ LAPORAN: SEKAR ARUM

PENERAPAN GCG di PTPN X mengacu kepada beberapa aturan yang menjadi landasan yaitu Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Perseroan berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Pemangku Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *human capital* pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*.

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), PTPN X tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja, tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*.

Adapun prinsip yang sering disebut TARIF ini menjelaskan setiap poinnya antara lain yang pertama adalah *Transparency*, atau Transparansi yakni pengungkapan informasi dari Perseroan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga obyektivitas, transparansi mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang

saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, *Accountability*, atau Akuntabilitas yakni pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Ketiga, *Responsibility*, atau Responsibilitas yakni mengemban tanggung jawab, termasuk dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Keempat, *Independence*, atau Independensi yaitu pengelolaan Perseroan secara independen sehingga masing-masing organ dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain.

Dan yang terakhir adalah *Fairness*, atau Kewajaran dan Kesetaraan, dimana dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan; termasuk kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Menurut, Kepala Urusan Analisa Bisnis dan Resiko PTPN X, Bayu Firmansyah bahwa saat ini PTPN X telah berhasil mencapai *score* 84,29 untuk

penerapan GCG. *Score* ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PTPN X termasuk kategori “baik”.

Tentu, hasil yang dicapai tersebut, dapat menjadi barometer untuk selalu konsisten menerapkan yang sudah baik dan memperbaiki diri untuk hal-hal yang masih perlu diperhatikan, karena penerapan GCG bukan hanya mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, tetapi sebagai bentuk evaluasi perusahaan agar lebih mampu bersaing secara global dan bertahan dalam segala dinamika yang ada.

“Untuk itu perusahaan berupaya keras untuk menyempurnakan dan melaksanakan GCG. Tidak hanya selaras dengan tuntutan regulasi namun juga sesuai dengan *best practices* atau standar yang berlaku. Bagi PTPN X, penerapan GCG merupakan sebuah keharusan guna mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia pun berharap dengan *score* yang telah diperoleh, tidak menjadikan PTPN X cepat puas, akan tetapi menjadi pengingat kita untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, dan rekomendasi yang diberikan oleh TIM BPKP dapat menjadi upaya *improvement* PTPN X. Bahkan bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi yakni *score* 85 ke atas yang menandakan bahwa perusahaan tersebut sangat baik dalam pengelolaan GCG.

Bayu menambahkan, hasil dari penilaian GCG ini, dapat memperbaiki atau menyempurnakan proses yang sudah ada, atau menciptakan proses yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, namun memang ada beberapa *area of improvement* dari hasil *assessment* yang perlu disempurnakan lagi. Ke depan, selain terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan GCG di PTPN X, perusahaan juga akan melakukan *update* terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Perilaku, *Board Manual* sesuai kondisi saat ini, pihaknya pun akan memberikan sosialisasi kepada para karyawan di unit usaha PTPN X agar seluruh organ perusahaan memahami dan menjalankan aktivitas sesuai Pedoman Perilaku dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

“Di samping itu penerapan pengendalian gratifikasi dan *whistle blowing system* yang masih kurang akan terus kami tingkatkan,” tambahnya kembali. ■

Susun dan Ciptakan SOP Optimalisasi Aset

Sebagai perusahaan milik Negara, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memiliki banyak aset di berbagai daerah wilayah kerjanya. Namun, dari semua aset yang dimilikinya tidak semua bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga aset tidur yang jumlahnya besar pun menjadi beban bagi perusahaan. Dengan Program Optimalisasi Aset, PTPN X berhasil merubah aset yang selama ini menjadi beban perusahaan menjadi sumber pendapatan yang jumlahnya pun tidak sedikit.

■ LAPORAN: SISKI PRESTIWATI

PTPN X memiliki 1.607 bidang asset tanah yang tersebar mulai dari Klaten hingga Jember. Dari 1.607 bidang asset tanah, hanya 60% saja yang dimanfaatkan sedangkan sisanya sebanyak 40% tidak dimanfaatkan bahkan menjadi beban perusahaan.

“Karena perusahaan harus membayar pajak tanpa ada pemasukan dari aset-aset tersebut,” kata Kepala Bidang Umum dan Pengembangan Aset PTPN X, Wakhyu P Siswosumarto.

Wakhyu mengungkapkan pada tahun 2017, Direksi PTPN X sudah membuat program untuk optimalisasi aset. Saat itu untuk program optimalisasi di Bidang Renbang, sedang untuk inventarisir aset ada di Bidang Umum. Dengan sistem seperti ini tidak sinkron dan akhirnya seluruh urusan aset dialihkan ke umum.

Program optimalisasi aset di PTPN X hingga akhir 2018, belum ada geliatnya. Sehingga tanggal 9 Januari 2019, Direksi PTPN X mengeluarkan SK nomor XX. SURKP/19.002 Tentang Tim Optimalisasi Aset PTPN X, didukung dengan Peraturan Direksi PTPN III (Persero) nomor 3.00/PER/01/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Kerjasama Pemanfaatan Aset.

“Mei 2019, saya masuk ke Divisi

Umum dan program optimalisasi aset lagi gencar-gencarnya bahkan dijadikan salah satu strategi *corporate* dan ini sejalan dengan program *Holding Perkebunan*,” ucapnya.

Program optimalisasi aset, sambung Wakhyu karena *Holding Perkebunan* melihat selama ini *return of asset* di seluruh BUMN Perkebunan sangat rendah, untuk itu program optimalisasi aset ini adalah satu strategi *Holding Perkebunan* untuk meningkatkan *revenue*.

“Untuk program optimalisasi aset, PTPN X lebih dahulu,” imbuhnya.

Terkait jumlah aset, Wakhyu menjelaskan aset yang paling banyak berada di unit gula, sedang untuk unit tembakau aset terbanyak berada di daerah Jember. Selama ini, ada aset yang tidak digunakan untuk kebutuhan proses produksi dan sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga namun masih *sporadic*. Sebagai langkah awal yang dilakukannya begitu tergabung di dalam Bagian Umum PTPN X adalah mengkompilasi apa saja yang telah dilakukan oleh seluruh unit usaha.

“Kami membuat surat kolektif ke seluruh unit untuk meminta laporan kerjasama yang telah dilakukan oleh unit dengan pihak ketiga,” katanya.

Dengan mendapatkan laporan dari seluruh unit, ujarnya, maka

dari laporannya tersebut dilakukan evaluasi sehingga bisa didapatkan informasi berapa potensi pendapatan dan hal ini dilakukan pada Juni 2019. Untuk mengetahui berapa pendapatan dari program optimalisasi aset ini, pihaknya mengajukan adanya rekening khusus kepada Bagian Keuangan.

“*Alhamdulillah* Juli 2019 ada rekening khusus. Tujuan adanya rekening khusus ini tidak lain untuk mempermudah pemantauan dan penghitungan pendapatan perusahaan yang berasal dari optimalisasi aset yang ada,” paparnya.

Dari rekening khusus tersebut, Wakhyu menjelaskan tiap bulan dibuatkan laporan pendapatan dari masing-masing unit usaha. Sebab, pendapatan aset ini bukan hanya tanggungjawab kantor pusat saja. Bahkan saat ini, pendapatan dari aset ini pun masuk ke dalam program *Key Performance Indicator* (KPI) yang menjadi salah satu dasar penilaian kinerja dari masing-masing General Manager baik di unit gula maupun unit tembakau. Dimana setiap *General Manager* dan kepala bagian di kantor pusat PTPN X telah menandatangani target yang menjadi tanggung jawab setiap personil.

“Target pendapatan dari program optimalisasi aset yang men-



jadi tanggungjawab saya di tahun 2019 sebesar Rp 17 Miliar, meliputi pendapatan aset di Kantor Pusat dan pendapatan aset di seluruh unit usaha. Untuk besaran targetnya tidaklah sama antara unit usaha yang satu dengan unit usaha lainnya,” jelasnya.

Salah satu tugasnya di Bagian Umum adalah merealisasi program optimalisasi aset di PTPN X, imbuahnya, namun hingga Juli 2019 belum ada *Standard Operational Procedure* (SOP). Saat itu, dirinya ingat bahwa ada transaksi jual aset yang nilainya dibawah Rp 6 juta dan transaksi tersebut harus atas persetujuan dari direksi. Hal ini yang membuat prosedur jual beli atau kerjasama aset dengan pihak ketiga membutuhkan waktu yang lama, panjang dan berbelit-belit. Dalam pengamatannya saat itu, untuk transaksi tersebut di atas tidak harus diurus oleh direksi, seharusnya direksi hanya mengurus

masalah aset dengan nilai yang besar.

“Melihat dari hal itu, kami (Tim Optimalisasi Aset) mulai menyusun SOP agar semua berjalan dengan lancar sesuai dengan tupoksi. *Alhamdulillah*, Oktober 2019, direksi PTPN X pun menyetujui SOP Optimalisasi Aset dan SOP Penghapusbukuan aset,” ujarnya.

Dengan SOP tersebut, jelas Wakh-yu, Tim Optimalisasi aset mencoba melakukan desentralisasi kewenangan. Yang pertama kewenangan direksi adalah mengelola aset dengan masa kerjasama kurang dari 5 tahun dengan nilai kerjasama lebih dari Rp 1 miliar. Yang kedua adalah kewenangan dewan komisaris adalah mengelola aset dengan masa kerjasama 5 tahun hingga 10 tahun. Yang ketiga adalah kewenangan pemegang saham yang mengelola aset dengan masa kerjasama lebih dari 10 tahun.

Di dalam SOP tersebut juga

DESENTRALISASI KEWENANGAN OPTIMALISASI ASET

1. Kewenangan direksi adalah mengelola aset dengan masa kerjasama kurang dari 5 tahun dengan nilai kerjasama lebih dari Rp 1 miliar.
2. Kewenangan dewan komisaris adalah mengelola aset dengan masa kerjasama 5 tahun hingga 10 tahun.
3. Kewenangan pemegang saham yang mengelola aset dengan masa kerjasama lebih dari 10 tahun.

diatur kewenangan Kepala Bagian Umum, yaitu mengelola aset dengan masa kerjasama kurang dari 5 tahun dengan nilai kerjama antara Rp 500 juta hingga 1 miliar. Kewenangan General Manager adalah mengelola aset dengan masa kerjasama dibawah 5 tahun dengan nilai kerjasama dibawah Rp 500 juta.

“Meskipun ada kewenangan *General Manager* dalam mengelola aset, namun fungsi Kantor Pusat adalah supervisi sehingga saat teman-teman unit akan melakukan penilaian misalkan kelayakan ekonomi dan akan menerbitkan perjanjian kerjasama (PKS) itu, Bagian Umum Kantor Pusat berkordinasi dan pendapatan dari kerjasama aset tersebut akan dilaporkan ke kantor pusat setiap bulannya dan melalui rekening khusus yang sudah ada,” pungkasnya. ■



“MESKIPUN ADA KEWENANGAN GENERAL MANAGER DALAM MENGELOLA ASET, NAMUN FUNGSI KANTOR PUSAT ADALAH SUPERVISI SEHINGGA SAAT TEMAN-TEMAN UNIT AKAN MELAKUKAN PENILAIAN MISALKAN KELAYAKAN EKONOMI DAN AKAN MENERBITKAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ITU, BAGIAN UMUM KANTOR PUSAT BERKORDINASI DAN PENDAPATAN DARI KERJASAMA ASET TERSEBUT AKAN DILAPORKAN KE KANTOR PUSAT SETIAP BULANNYA DAN MELALUI REKENING KHUSUS YANG SUDAH ADA,”

■ **Wakhyu P Siswosumarto**
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PENGEMBANGAN ASET PTPN X

Semakin Agresif Garap Pasar Ritel

Semakin berkembangnya sektor konsumsi ikut mengerek industri kemasan utamanya yang berkaitan dengan bidang makanan dan minuman. Melihat hal tersebut, PT Dasaplast Nusantara tidak ingin ketinggalan untuk ikut bermain di sektor tersebut.



■ LAPORAN: SAP JAYANTI

PT DASAPLAST NUSANTARA – anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang bergerak pada sektor produksi kemasan (*packaging*) baru saja menambah mesin baru untuk *flexible packaging*. Dengan investasi yang dilakukan perusahaan akan semakin gencar menggarap sektor ritel.

”Sebenarnya di 2019 ini kami menanggarkan untuk peremajaan enam unit mesin *loom* atau mesin tenun di pabrik Pecangaan (yang memproduksi karung dan waring). Tapi kemudian kami mendapat informasi peluang untuk pengemasan minyak goreng Walini yang diproduksi oleh *holding* perkebunan. Ke depan, *holding* akan merambah ke ritel dengan empat produknya yaitu gula, kopi, teh dan minyak goreng ini,” tutur Direktur PT Dasaplast Nusantara, Sugiharto Bisri. Kapasitas mesin yang dimiliki sekarang dirasa masih kurang untuk menjawab peluang tersebut.

Saat ini pabrik *flexible packaging* milik Dasaplast Nusantara yang berada di Tulangan, Sidoarjo baru memiliki dua mesin *finishing* yaitu masing-masing satu mesin untuk kemasan berbentuk *center seal* dan *standing pouch*. ”Nah yang kita tambahkan adalah mesin *finishing* yang untuk *standing pouch*,” jelasnya.

Mesin dengan nilai investasi sebesar Rp 1,6 Miliar tersebut mulai beroperasi sejak Agustus 2019. Selain untuk kemasan *standing pouch* yang umumnya digunakan untuk minyak goreng, mesin ini juga bisa digunakan untuk



■ Kemasan-kemasan produksi PT Dasaplast Nusantara.

memproduksi kemasan dengan jenis *side seal*.

Saat ini, produksi *flexible packaging* Dasaplast Nusantara memang masih minim. Baru mencapai 50 ton per bulan dengan total kapasitas terpasang sebesar 90 ton per bulan. Utilitas mesin diakui Bisri memang belum optimal, baru sekitar 50-60 persen. Adanya mesin baru ini dikatakannya tidak akan menambah kapasitas terpasang pabrik namun kapasitas produksi diharapkan bisa meningkat, karena dilakukannya *debottlenecking* di bagian *finishing*. Karena itu pihaknya akan lebih agresif untuk melakukan pemasaran utamanya di sisi ritel.

Dengan semakin gencarnya pemasaran yang dilakukan diharapkan utilisasi mesin bisa meningkat hingga 80 persen. ”Ini memang masih menjadi PR kami. Selama ini kami belum agresif jualan. Kalau karung kan selama ini mayoritas melalui mekanisme tender. Kami masih terus berlatih mencari pasar untuk yang *flexible packaging*

ini,” ujarnya.

Saat ini, Dasaplast Nusantara sudah memproduksi kemasan untuk beberapa produsen minyak goreng dari perusahaan swasta, salah satunya yang berada di Sidoarjo. Selain itu juga kemasan untuk pakan hewan piaraan, pupuk, garam, beras premium dan beras bulog serta kemasan gula ritel dari salah satu perusahaan swasta.

Ke depan, Dasaplast Nusantara mulai membidik konsumen dari kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) utamanya yang memproduksi makanan dan minuman. Sektor mamin dirasa sangat potensial meskipun untuk UMKM, volume pemesanannya tidak sebanyak industri besar. Karena itu masih dicarikan solusi agar produksinya tetap efisien meskipun pemesanan yang dilakukan tidak dalam skala besar.

Bisri optimistis pasar *flexible packaging* utamanya untuk makanan dan minuman masih terbuka luas. ”Pemainnya di industri ini memang banyak. Tapi kami akan semakin agresif dalam pemasaran utamanya untuk ritel dan tidak lagi bergantung pada tender,” ujar Bisri lagi. Untuk memperkuat pemasaran, Dasaplast Nusantara menggaet tenaga pemasaran yang lebih berpengalaman serta tenaga *freelance*.

Untuk 2020, PT Dasaplast Nusantara menargetkan bisa memproduksi sebesar 7.000 ton kemasan baik *woven bag* maupun *flexible packaging* dengan target laba sebesar Rp 6 Miliar. Dilihat dari komposisinya, *woven* atau karung masih mendominasi dengan produksi sebesar 6.077 ton sedangkan *flexible packaging* 960 ton. ■



■ Mesin baru yang dimiliki PT Dasaplast Nusantara.

ERICK THOHIR

Dari Basketball hingga Menteri

USIANYA belum 50 tahun. Tapi catatan kiprahnya sudah menjulang. Erick Thohir, pria kelahiran Jakarta, 30 Mei 1970 ini sering menjadi perhatian publik. Baik sebagai pengusaha, maupun pejabat negara.

Baru 1,5 bulan dilantik sebagai Menteri BUMN, sudah memecat lima direksi (termasuk Dirut) Garuda Indonesia. Gerak langkahnya kerap mengagetkan publik. Bahkan pernah mengagetkan jagat sepakbola Eropa pada 2013, karena tetiba muncul sebagai pemilik baru klub bola papan atas Italia, Inter Milan.

Sejak remaja sudah banyak dikenal orang, terutama di kalangan pegiat olahraga basketball. Namanya mencuat sejak ikut mendirikan Satria Muda pada 1993, klub basket kenamaan yang berlaga di Liga Kobatama (*premier basketball league*). Saat itu usia Erick masih 23 tahun.

Sebelas tahun kemudian, kecintaannya pada basketball telah mengantarkannya terpilih menjadi Ketua Umum Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia). Dua tahun kemudian, saat memasuki usia 36 tahun, Erick terpilih menjadi President SEABA (*South East Asian Basketball Association*).

Namanya makin mendunia ketika pada 2012 membeli "Philadelphia 76ers", klub bola basket papan atas yang berlaga di NBA – yakni liga basket pria di Amerika Serikat – yang merupakan liga basket paling bergengsi di dunia.

Puncaknya pada 2015, Erick terpilih sebagai salah satu anggota FIBA Central Board (*Fédération Internationale de Basketball*) atau Internasional Basketball Federation) yang berpusat di Mies, Switzerland. Di central board FIBA ini Erick terpilih dua kali kepengurusan hingga periodenya berakhir 2023 nanti.

Kebudayaan Erick Thohir pada perbasketan internasional, diakui banyak pihak telah menjadi motivasi dan pemicu bagi para pebasket nasional, baik atlet, klub dan seluruh stakeholder basketball – untuk terus mengukir prestasi skala dunia.

Putra bungsu pengusaha Muhammad Teddy Thohir ini gerak-langkahnya kerap membuat publik terkaget-kaget. Nama Erick Thohir semakin moncer setelah mem-

beli klub bola Italia yakni Internazionale Milano (Inter Milan) pada 2013 dengan nilai € 350 juta. Jagat sepakbola Eropa (saat itu) penasaran ketika tetiba ada orang Indonesia menjadi Chairman of Inter Milan.

Padahal itu bukan yang pertama Erick membeli klub bola. Setahun sebelumnya, pendiri grup bisnis Mahaka ini sudah memborong kepemilikan saham D.C. United, klub sepak bola profesional AS yang berbasis di Washington, D.C.

Sehingga wajar jika di dalam negeri (Indonesia) – Erick Thohir lantas dipercaya sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk masa bakti 2015 - 2019. Puncak prestasinya ketika Erick ditunjuk sebagai Ketua Panitia Asian Games 2018 – dimana Indonesia sebagai tuan rumah, mencatat sukses besar.

Sedikitnya 11.000 atlet dari 45 negara (belum termasuk official) dari 40 cabor yang dipertandingkan – berhasil di-*organized* dengan baik. Hampir semua media arus utama di kawasan Asia memuji pelaksanaan Asian Games 2018 sebagai sukses dan paling semarak – sebagaimana dikutip South China Morning Post - Hong Kong, The Indian Express - India, Times of India, Channel News Asia - Singapura, The Straits Times - Singapura, dan lainnya.

Sementara sebagai pebisnis, Erick Thohir dikenal unik dan berani. Betapa tidak, ketika usianya masih tergolong muda pada 2001 (31 tahun) – melalui Grup Mahaka, Erick berani mengambil alih saham Skh Republika. Padahal bisnis media saat itu sedang berat-beratnya, pasca pemerintah menghapuskan persyaratan SIUPP bagi pendirian perusahaan media.

Jurnalis senior Karni Ilyas, menilai Erick tergolong pengusaha berani risiko. "Bisnis media adalah bisnis gila. Ini anak muda tetiba membeli Republika ketika bisnis media secara umum sedang berat," kata Karni Ilyas saat menghadiri peluncuran buku karya Erick Thohir berjudul "Pers Indonesia di Mata Saya".

Pada buku yang ditulisnya itu, Erick mencoba mengetengahkan informasi dari unsur-unsur yang menopang laju dunia pers dan bisnis komersial, perebutan audi-

ens, naik-turunnya pengaruh pemberitaan, hingga perkembangan bentuk dan penyajian berita. Erick termasuk pihak yang meyakini bahwa bisnis media bisa tetap eksis tanpa harus mereduksi idealisme jurnalistik.

Terbukti, hampir seluruh bisnis media yang berada di bawah holding kelolaan Erick Thohir berjalan sukses. Diantaranya Republika, Radio 98.7 Gen FM & 101 Jak FM serta share di Prambors FM, Delta FM dan FeMale Radio, TV One, VivaNews, ANTV, Golf Digest Indonesia, dan media lainnya, serta sejumlah perusahaan bidang *event organizer*, *advertisement* dan *entertainment*.

Pada konteks membeli klub bola dan klub basket internasional, Erick Thohir tetap melihatnya sebagai bisnis dan investasi. Buktinya saat menjual klub Inter Milan ke Lion Rock Capital – Hong Kong, Erick dikabarkan mencatat keuntungan tidak sedikit yakni sekitar € 150 juta atau Rp2,4 triliun.

Sehingga publik menilai sangat tepat ketika Presiden Jokowi menugaskan-nya menjadi Menteri BUMN. Sebagai pebisnis Erick Thohir selama ini dikenal bertangan dingin, disiplin, rasional dan mengedepankan aspek profesionalisme dan prinsip GCG.

Maka itu Erick sama sekali tidak ragu ketika mengambil keputusan memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara beserta 4 direksi lainnya – ketika diketahui melanggar kedisiplinan. Bukan hanya itu, Erick terus melakukan "bersih – bersih" di Garuda secara keseluruhan, termasuk 8 anak usaha dan 18 cucu usaha. Juga berencana merombak pejabat komisaris anak usaha yang sebagian besar juga dijabat oleh para direksi yang dipecat.

Dalam beberapa kali kesempatan Erick Thohir secara tegas mengatakan pihaknya tidak akan mengganti jabatan direksi secara tiba-tiba kalau tidak ada masalah yang serius. Juga secara tegas mengatakan tidak ada KKN dalam penunjukan pejabat direksi BUMN. "Silahkan bekerja dengan baik, profesional, rasional. Terus perkuat prinsip GCG dan (GCG) jangan hanya *lips service*," katanya.

Soal rasionalitas usaha BUMN, Erick mengaku sempat kaget ketika mengetahui anak – cucu PT Pertamina mencapai 142 perusahaan. Maka itu pihaknya meminta dirut dan komut Pertamina untuk memetakan kembali usaha-usaha anak-cucu Pertamina tersebut. “Jangan sampai keberadaan usaha-usaha itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu untuk mengurus Pertamina,” katanya.

Menurut Erick, usaha – usaha yang bukan bidang Pertamina sebaiknya dilebur dan memberi kesempatan yang luas kepada swasta. Termasuk usaha pendidikan seperti Universitas Pertamina. “Ngapain Pertamina punya kampus segala. Seharusnya melalui CSR ikut memperkuat kampus-kampus yang ada. Misalnya memperkuat fakultas tertentu di ITB,” katanya.

Soal memberi kesempatan yang luas kepada swasta, pernyataan Erick ini juga sempat disampaikan Presiden Jokowi. Dimana ke depan struktur perekonomian nasional harus dimainkan secara seimbang antara BUMN dan swasta. Kalau swasta bisa melakukan, sebaiknya BUMN tidak usah ikut masuk.

“Poin ini (mengedepankan swasta) bahkan menjadi pembahasan serius di Rakornas Kadin di Bali dan menjadi rekomendasi penting untuk terus dikawal,” kata M. Rizal, Wakil Ketua Kadin Jatim usai mengikuti Rakornas Kadin di Bali belum lama ini.

Pemahaman Erick sangat luas tentang teori pembangunan ekonomi bangsa. Termasuk penguatan peran swasta. Erick yang lulusan program Master of Business Administration dari Universitas Nasional California, serta Bachelor of Arts dari Glendale University itu berjanji akan membawa seluruh BUMN kembali pada fokus usaha masing-masing.

Lebih dari itu, sebagai pejabat Menteri BUMN, Erick selain akan melakukan penataan ulang terkait anak usaha dan penguatan core business masing-masing BUMN, pihaknya sebagai pejabat Menteri BUMN juga aktif melakukan negosiasi secara internasional dengan perusahaan skala dunia untuk menawarkan kerjasama strategis dengan BUMN Indonesia.

Belum lama ini Erick Thohir dan Menkeu Sri Mulyani terbang ke Dubai, dan Erick kembali terbang ke Singapura untuk bertemu sejumlah pimpinan perusahaan skala internasional – untuk merajut kemungkinan kerjasama dengan BUMN Indonesia. “Menteri BUMN Pak Erick sangat sibuk bertemu dengan pimpinan perusahaan kelas dunia, termasuk pertemuan di Singapura pekan ini,” kata Arya Sinulingga, jubiir Kementerian BUMN.

Erick Thohir sebagai sosok pimpinan tidak hanya concern ke soal-soal keolahragaan dan bisnis, tapi juga menyempatkan waktunya untuk kepentingan sosial. Sudah banyak lembaga sosial yang didirikan Erick, diantaranya Yayasan Darma Bakti Mahaka.

Erick Thohir dibesarkan dalam keluarga pebisnis, yakni Muhammad Teddy Thohir salah satu pimpinan Astra Internasional di jaman pemerintahan Orde Baru. Erick merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Kakaknya Rika Thohir dan Garibaldi Thohir – atau akrab disapa Boy Thohir adalah pimpinan Adaro Group, grup usaha sektor pertambangan. Sejak kecil Erick dididik disiplin oleh ayahnya, terutama dalam hal mengelola bisnis. ■LH



Sekilas Tentang Hukum Pertanahan

■ UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PTPN X) adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam usaha perkebunan (agribisnis) berbasis tebu dan tembakau, yang dalam aktivitasnya tidak terlepas dari keberadaan tanah. Tanah merupakan kebutuhan mutlak sebagai sumber bahan baku dalam melakukan budi daya tanaman tebu dan tembakau untuk kebutuhan pabrik gula atau pengolahan tembakau. Mengingat tanah adalah hal terpenting bagi kelangsungan perusahaan, maka tanah yang dimilikinya harus



Oleh:
Slamet Djumantoro
DIREKTUR KOMERSIL PTPN X

selalu dijaga atau dipelihara baik dari pengelolaan maupun dari aspek legalitasnya.

Dalam perjalanan usahanya, PTPN X menghadapi beberapa persoalan yang berkaitan dengan hak atas tanah yang dimilikinya, baik karena hukum (keputusan pejabat negara yang berwenang) maupun yang dikuasai (diserobot) pihak lain

secara ilegal. Apabila masalah hak atas tanah tidak terlindungi baik fisik maupun legal, maka kelangsungan usaha PTPN X akan terganggu sehingga menurunkan kinerja keuang-

an perusahaan. Pada akhirnya mengurangi kesejahteraan para karyawan dan keluarganya. Dengan demikian maka diperlukan pengetahuan sekilas tentang pokok-pokok hukum yang berkaitan dengan pertanahan khususnya yang menyangkut hak atas tanah yang dimiliki oleh PTPN X baik Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak lainnya yang masih berjalan.

Terkait pertanahan, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Agraria dan Peraturan Pemerintah dan turunannya sebagai pelaksanaan atas undang-undang tersebut. Namun dalam pembahasan kali ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)

Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain **HGU/HGB jatuh tempo** dan belum atau terlambat dipepanjang, **HGU/HGB dikuasai pihak lain** serta **HGU/HGB tidak digunakan sebagaimana ketentuan**, bahkan beberapa bidang HGU dapat dikategorikan **terlantar**. Apabila hal ini tidak segera diatasi,

maka hak atas tanah tersebut berisiko untuk dicabut oleh pejabat yang berwenang (negara).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR, antara lain mengatur sebagai berikut;

OBYEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

- Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (atas nama Badan Hukum), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
- Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - tanah Hak Milik atau Hak Guna

Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;

- tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR

- Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar.
- Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian.
- Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Perta-

nahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala.

- Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan:
 - terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau
 - *sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.*
- Identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi:
 - nama dan alamat Pemegang Hak;
 - letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; dan
 - keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar.
- Kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
 - mengecek buku tanah dan/atau



warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;

- meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan;
- melaksanakan pemeriksaan fisik;
- melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan;
- membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
- menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;
- melaksanakan sidang Panitia;
- dan
- membuat Berita Acara.

Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian, dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.



Apabila atas HGU dan HGB diputuskan oleh pejabat yang berwenang ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui **reforma agraria** dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Dari ulasan tentang hukum pertanahan tersebut, kepemilikan hak

atas tanah baik HGU maupun HGB di samping memberikan keuntungan bagi perusahaan namun juga memiliki risiko kehilangan atas hak atau dihapuskannya hak tersebut.

Dengan demikian diharapkan pegawai PTPN X memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pemeliharaan atas dokumen dan fisik tanah baik HGU maupun HGB. ■



HAK GUNA USAHA (HGU)

NO.	PERIHAL	URAIAN
1	Subyek HGU	WNI, Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia
2	Tanah yang dapat diberikan HGU	Tanah Negara, apabila tanah tersebut adalah kawasan hutan, maka HGU diberikan setelah tanah dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
3	Luas HGU	Minimal 5 Ha, Untuk Perorangan Maksimal 25 Ha. Untuk Badan Usaha ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kelayakannya.
4	Jangka Waktu HGU	Maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang maksimal 25 tahun.
5	Kewajiban dan Hak	Kewajiban: ■ Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan. ■ Membangun dan memelihara prasarana lingkungan. ■ Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam. Hak: ■ Menguasai dan mempergunakan HGU ■ Penguasaan sumber air yang ada di atasnya untuk mendukung usahanya.
6	Peralihan HGU	Dengan cara: jual beli, tukar-menukar, penyertaan modal, hibah, dan pewarisan.
7	Hapusnya HGU	a) Berakhirnya jangka waktu HGU. b) Dibatalkan oleh pejabat berwenang karena; c) Tidak terpenuhi kewajiban pemegang HGU d) Putusan pengadilan tingkat akhir (tetap) e) Dilepaskan secara sukarela f) Dicabut berdasarkan undang-undang No.20 Th 1961*) g) Diterlantarkan. h) Tanahnya musnah.



*) NOMOR 20 TAHUN 1961 TENTANG PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA.

HAK GUNA BANGUNAN (HGB)

NO.	PERIHAL	URAIAN
1	Subyek HGB	WNI, Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Ind.
2	Tanah yg dpt diberikan HGB	■ Tanah Negara ■ Tanah Hak Pengelolaan (HPL), ■ Tanah Hak Milik.
3	Jangka Waktu HGB	Maks 35 tahun, dpt diperpanjang maksimal 25 th.
4	Kewajiban Pemegang HGB	■ Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan sesuai dengan syarat pemberiannya. ■ Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungan.
5	Peralihan HGB	Dengan cara; jual beli, tukar-menukar, penyertaan modal, hibah dan pewarisan.
7	Hapusnya HGB	a) Berakhirnya jangka waktu HGB. b) Dibatalkan oleh pejabat berwenang karena; c) Tidak terpenuhinya kewajiban pemegang HGB d) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian HGB. e) Putusan pengadilan tingkat akhir (tetap) f) Dilepaskan secara sukarela g) Dicabut berdasarkan undang-undang No.20 Th 1961. h) Diterlantarkan. i) tanahnya musnah.





KLINIK ESTETIKA MEDITAMA

Hadirkan Peralatan Kecantikan Berteknologi Tinggi

MELAKUKAN perawatan di klinik estetika saat ini sudah menjadi kebutuhan banyak wanita terutama di kota besar. Karena alasan kesibukan, terapi estetika yang hemat waktu namun bisa memberi hasil instan semakin dicari. Menjawab hal tersebut, kini semakin banyak klinik yang menawarkan solusi mempercantik kulit secara cepat dan tanpa rasa sakit. Jawabannya ada pada perawatan kecantikan menggunakan teknologi tinggi.

Klinik estetika meditama merupakan klinik kecantikan di bawah naungan PT Nusantara Medika Utama (NMU). Klinik kecantikan yang mengandalkan peralatan canggih untuk perawatan wajah dan tubuh. Saat ini ada 3 klinik estetika meditama yaitu Estetika Meditama Jember (J-Klin Beauty), Estetika Meditama Mojokerto dan Estetika Meditama Pare (HVA Beauty & Spa).

Untuk klinik estetika meditama jember (J-Klin beauty) perawatan kecantikan dengan menggunakan alat kecantikan modern sudah cukup lengkap, ke depan nantinya akan diikuti pula oleh klinik estetika meditama baik di wilayah Pare Kediri maupun Mojokerto.

Selaku manager klinik estetika meditama, drg. Dwi Lianasari, MSi menyampaikan bahwa untuk menjawab kebutuhan akan *trend* kecantikan terkini, klinik estetika

meditama terutama di wilayah jember menawarkan berbagai jenis perawatan kecantikan yang aman, bebas rasa nyeri, dan hasilnya bisa langsung terlihat. Tentunya hal ini adalah penggabungan antara *skill* terapis dan teknologi canggih alat kecantikan yang mempermudah prosesnya. Berbagai jenis perawatan yang dapat dilakukan antara lain: *Skin Diagnostic*, HIFU, IPL, *Facial Mesotherapy*, *Skin Light*, Radio Frekuensi, injeksi *whithening*, injeksi vitamin c, *slimming*, dan *body treatment*.

Salah satu keunggulan lagi dari klinik estetika meditama adalah layanan berbasis medis (*medic base treatment*). Sebelum melakukan perawatan *customer* dapat melakukan konsultasi dokter terlebih dahulu, untuk teknik *massage* yang dilakukan oleh *beautycian* pun menggunakan teknik Fisiotherapy.

Saat ini klinik estetika meditama sedang menggagas program Go Hospital Treatment yaitu program kerjasama dengan rumah sakit PT Nusantara Medika Utama di wilayah masing masing yaitu RS Jember Klinik, RS Toeloengrejo, dan RS Gatoel. Berupa pemberian *voucher* perawatan pada pasien rawat inap serta perawatan kecantikan untuk karyawan dan keluarga pasien yang bisa dilakukan pada jadwal dan hari yang sudah ditentukan. ■

Berikut perawatan kecantikan dengan peralatan modern yang bisa dilakukan di Klinik Estetika Meditama:



1. SKIN DIAGNOSTIK

Pemeriksaan kulit untuk mengetahui jenis dan permasalahan kulit secara detail. Dengan menggunakan alat *skin analysis*, dapat membantu menemukan solusi terbaik untuk kesehatan dan kecantikan kulit.

2. IPL / INTENSE PULSED LIGHT



Suatu teknik di bidang dermatologi yang menggunakan spektrum cahaya polikromatik sehingga lebih terkontrol dan tidak ada rasa sakit. IPL dapat mengatasi pigmentasi, *acne*, *wrinkle*, *hair removal*, *skin rejuvenation* dan terapi vaskuler.



3. HIFU / HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND

Treatment antiaging terbaik, aman dan hasilnya tampak dalam satu kali *treatment*. Teknologi HIFU mengeluarkan gelombang ultrasound yang ditargetkan pada lapisan kulit dalam sehingga panas yang dikeluarkan dapat merangsang terbentuknya kolagen. Manfaat HIFU meniruskan wajah, mengencangkan kulit wajah dan leher, menghilangkan double chin, menghilangkan kerutan dan mata panda.



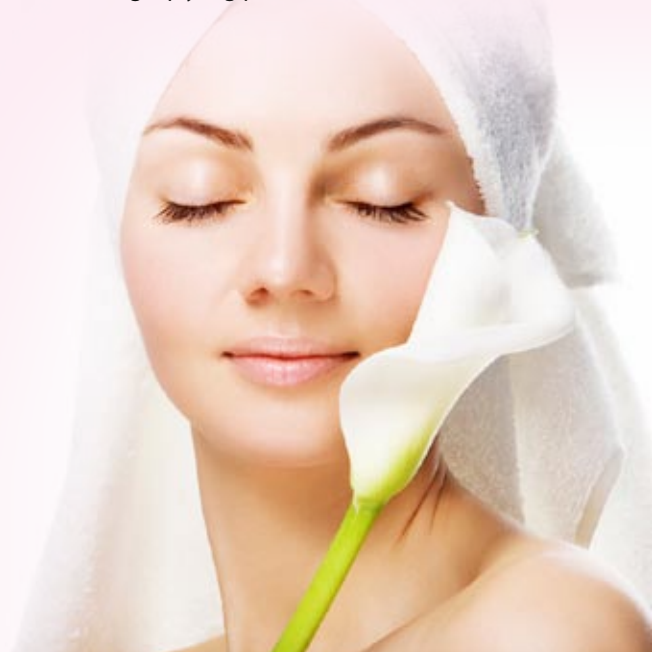
4. RF / RADIO FREKUENCY

Merupakan perawatan yang menggunakan Radio Frekuensi dengan cara mengubah energi menjadi bioelektrik sehingga menyebabkan panas dalam tubuh. Manfaat mengencangkan kulit keriput dan kendur, mengaktifkan sel sel sehingga regenerasi sel kulit meningkat, meremajakan kulit, dan membakar lemak.

5. SKINLIGHT



Adalah suatu alat multifungsi untuk perawatan peremajaan kulit yang menggabungkan antara dermabrasi, dengan tip *diamond vacum drainage*, *electrophoresis*, *phototherapy*, dan *crayotherapy* sehingga menjadi alat *facial* terlengkap yang pernah ada.



Si Kenyal yang Punya Banyak Penggemar

Dingin, manis dan ada sensasi kenyal membuat minuman boba atau boba drink punya banyak penggemar. Berbagai merk pun terus bermunculan seiring dengan semakin banyaknya penggemar minuman ini.

■ LAPORAN: SAP JAYANTI

SUDAH lebih dari setengah jam Krisna berdiri mengantre demi mendapatkan segelas minuman boba dari salah satu merk yang baru saja buka di Surabaya. Sebagai penggemar boba, ia rela jauh-jauh datang dari rumahnya yang berada di Surabaya barat ke salah satu mall di Surabaya timur. Begitu mendapatkan minuman yang diincarnya, ia langsung memotret menggunakan ponsel dan mengunggahnya ke media sosial yang ia miliki.

Tidak sekali itu saja Krisna harus berjuang demi segelas *boba drink*. Ia juga rutin mendatangi Festival *boba drink* yang diadakan di beberapa mall di Surabaya. Di festival-festival itu ia bisa mencoba racikan *boba drink* dari beberapa merk sekaligus. Bahkan banyak diantaranya yang belum memiliki gerai di Surabaya. "Mulai dari sebelum *booming* seperti sekarang, baru ada satu merk minuman yang menggunakan boba atau *pearl* itu saya sudah suka. Sekarang semakin banyak pilihannya, saya senang mencoba-coba membandingkan rasa antara merk satu dengan

lainnya," tuturnya.

Bubble tea atau *boba tea* sejatinya merupakan minuman yang berasal dari Taiwan dan mulai populer sejak tahun 1990-an. Boba sebenarnya adalah makanan penutup tradisional yang disebut "Fen yuan". Boba berasal dari tapioka yang diolah dengan cara direbus dan dicampurkan dengan gula merah, sehingga terbentuklah bola-bola berwarna kehitaman yang manis, lembut, dan kenyal ketika dikunyah.

Salah satu sumber menyebut *boba tea* pertama kali diperkenalkan oleh Liu Han-Chieh, pemilik toko teh asal Taiwan bernama Chun Shui Tang di Taichung, Taiwan. Dari yang semula hanya coba-coba, akhirnya minuman teh boba tersebut dijual dan menjadi andalan karena banyak orang yang menyukainya.

Namun ada juga yang berpendapat, adalah Tu Tsong-he, pemilik Hanlin Teahouse yang menjual minuman dengan bola tapioka pertama. Kala itu, ia menjual minuman dengan mutiara tapioka berwarna putih, teksturnya pun agak keras dan rasanya hambar. Lalu, Tu Tsong-he melakukan inovasi ke mutiara ber-

warna hitam. Mutiara ini direbus dalam tong besar dan disiram sirup karamel manis selama berjam-jam hingga menghasilkan warna hitam, teksturnya kenyal dan membal.

Minuman tersebut kemudian dikenal dengan nama *bubble tea* atau *pearl milk tea* secara internasional atau teh boba di Indonesia. Kini ada lebih dari 45 merek teh boba di Taiwan dan ratusan toko minuman boba di seluruh Taiwan. Beberapa merek minuman boba ternama asal Taiwan adalah The Koi, Tiger Sugar dan Chaitime. Di Taiwan Anda bahkan dapat membeli teh boba di minimarket, selama 24 jam.

Minuman ini berisi teh yang dapat ditambahkan perisa buah, sirup, susu, serta bubble warna hitam yang diletakkan di bagian dasar gelas. Di Indonesia, saat ini sedang tren juga boba drink yang dicampur dengan gula aren.

Tidak hanya dalam bentuk minuman, kini boba juga bersanding dengan makanan. Seperti Ichiro Ramen Boba yang mencampurkan boba dengan ramen. Ada juga Ropang OTW dengan menu andalannya yaitu Ropang Boba dan Indomie Boba. ■

Membuat Buble Tea Sendiri

BAHAN:

■ 2 mangkuk gula merah ■ 1 mangkuk tepung tapioka ■ 1/2 cangkir serbuk teh ■ 500 ml air untuk membuat air gula merah ■ 900 ml air untuk membuat teh

CARA PEMBUATAN BUBBLE:

1. Campurkan 1 mangkuk gula merah yang sudah ditumbuk halus dengan semangkuk tepung tapioka. Aduk merata.
2. Setelah keduanya tercampur, baru tambahkan air secukupnya sampai kenyal. Aduk rata hingga kenyal.
3. Buat bentuk bulat seukuran *bubble* yang Anda inginkan.
4. Rebus satu mangkuk gula merah lainnya yang sudah ditumbuk ha-

lus. Tunggu hingga mendidih.

5. Masukkan bulat *Bubble* yang sudah dibentuk ke dalam panci rebusan air gula yang sudah mendidih, hingga 20 menit.
6. Setelah matang, tiriskan dan dinginkan.

CARA PEMBUATAN TEH:

1. Rebus 1/2 cangkir serbuk teh dengan 900 ml air di panci dan tunggu sampai mendidih.
2. Masukkan *bubble* yang sudah Anda buat ke dalam cangkir.
3. Kemudian setelah teh mendidih, dinginkan dan tambah susu (sesuai selera Anda) ke dalam cangkir.
4. Aduk merata, dan *Bubble Tea* siap disajikan.



JANGAN BERLEBIHAN



MESKIPUN enak dan bikin ketagihan, namun segala sesuatu yang berlebihan pasti memiliki dampak negatif bagi tubuh. Beberapa risiko yang mungkin terjadi jika terlalu berlebihan mengonsumsi minuman ini diantaranya:

★ Menyebabkan peningkatan berat badan

Sirup dan pemanis tambahan lain yang terdapat dalam bubble tea memiliki kandungan kalori yang tinggi, belum lagi kalori dari lemak pada susu. Semua itu dapat meningkatkan berat badan, kadar kolesterol dan trigliserida.

★ Meningkatkan risiko munculnya penyakit tertentu

Minuman bubble tea yang banyak mengandung lemak dapat menyebabkan penumpukan kolesterol dalam darah jika dikonsumsi terlalu sering. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Selain itu, kadar gula yang tinggi dalam bubble tea juga berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya resistensi insulin, yang pada akhirnya dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Gula yang terdapat dalam bubble tea juga dapat mengganggu proses pembuangan asam urat dari dalam tubuh, sehingga meningkatkan risiko munculnya penyakit asam urat.

★ Menimbulkan gangguan pencernaan

Bubble yang terdapat dalam bubble tea berasal dari mutiara tapioka. Mutiara tapioka ini terkadang mengandung zat tambahan bernama guar gum. Jika dikonsumsi terlalu banyak, guar gum dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti perut kembung dan nyeri atau kram perut.



Mengenali Jaringan 5G

DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN

Oleh: **Ahmad Mubarak**
IT, SEKPER & PKBL

APA itu 5G? Yang jelas jangan menanyakan pada mereka yang tidak pernah menggunakan ponsel ya. Sudah pasti asing bagi mereka. Bagi para pengguna ponsel masa kini saja, mungkin hanya sebagian kecil yang bisa mendefinisikan dengan benar apa sebetulnya yang dimaksud dengan 5G. Lalu setelah kita mengetahuinya, apakah teknologi tersebut memiliki dampak besar bagi tubuh kita?

G-THING

Anda mungkin sudah familiar dengan istilah 1G, 2G, 3G ataupun 4G. G dalam 4G atau 5G adalah singkatan dari *Generation* dan jumlahnya hanyalah representasi dari evolusi teknologi. Saat ini, seperti yang Anda ketahui, kita menggunakan teknologi komunikasi nirkabel (ponsel) generasi ke-4.

Pada tanggal 1 Desember 2018 lalu,

Korea Selatan menjadi negara pertama yang menawarkan kemampuan 5G dengan standar nirkabel seluler generasi kelima dan bisa dibilang bahwa industri seluler telah membuat kemajuan yang menakjubkan sejak panggilan telepon pertama dilakukan pada tahun 1973 silam.

Sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, berencana untuk mulai mengadopsi 5G pada tahun 2020 mendatang dan teknologi ini dipersiapkan untuk membantu mendorong perkembangan *Internet of Things* (IoT) dan pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Meskipun standar 5G secara formal belum ditetapkan, 5G diharapkan setidaknya dapat tiga kali lebih cepat dari standar koneksi 4G saat ini.

KEUNGGULAN 5G

Teknologi 5G dipercaya memiliki banyak keunggulan, salah satunya kecepatan transfer data 800 gigabyte per detik (Gbps). Berdasarkan penelitian,

4G hanya mampu memindahkan data dengan kecepatan 100 megabyte (MB) hingga 1 gigabyte (GB) per detik.

Dengan kecepatan 5G, pengguna internet bisa mengunduh (*download*) 33 film dengan kualitas high definition (HD) dalam hitungan detik. Sementara pada ponsel 4G, pengunduhan film kualitas HD bisa memakan waktu enam menit. *Wooww* sekali ya tampaknya. Meski demikian, percobaan awal yang dilakukan Ericsson masih menghasilkan kecepatan transfer data 5 Gbps pada jaringan frekuensi 15 Gigahertz (Ghz).

Keunggulan lainnya adalah minimnya jeda saat proses transfer data (*ultra low latency*). Dalam teknologi 4G, angka jeda yang didapat saat transfer data mencapai 50 milidetik. Sedangkan teknologi 5G diklaim hanya memiliki angka jeda 1 milidetik. Minimnya delay akan membuat pengoperasian gawai berteknologi tinggi seperti *virtual reality* hingga kendaraan tanpa awak minim gangguan.

Perbedaan lainnya, teknologi 5G memungkinkan banyak peralatan canggih terkoneksi internet secara bersamaan di satu waktu. Ini memungkinkan dunia lebih terkoneksi lagi dengan internet. Beberapa yang dapat terakses teknologi ini adalah peralatan rumah pintar hingga kendaraan.

APAKAH 5G BERBAHAYA?

Masih ingat salah satu bentuk perpindahan energi. Salah satunya adalah dengan radiasi. Radiasi adalah salah satu bentuk perpindahan energi dengan penyebaran ke segala arah untuk kemudian diserap oleh benda lainnya. Salah satu contoh radiasi adalah radiasi sinar UV oleh matahari, sinar UV dapat diserap oleh kulit manusia.

Demikian juga dengan teknologi ponsel dan 5G. Teknologi ini berbasis RF atau *Radio Frequency* atau gelombang radio yang termasuk dalam radiasi elektromagnetik. Radiasi *handphone* sendiri hingga kini masih menjadi perdebatan apakah memang betul betul berbahaya bagi kesehatan. Sebagian organisasi kesehatan mengklaim aman akan tetapi beberapa penelitian juga menunjukkan efek yang cukup mengkhawatirkan

Ribuan studi menghubungkan paparan radiasi frekuensi radio nirkabel tingkat rendah ke daftar panjang efek biologis yang merugikan, termasuk:

- Pemutusan untai DNA tunggal dan ganda.
- Kerusakan oksidatif
- Gangguan metabolisme sel.
- Gangguan aliran darah ke otak.
- Berkurangnya hormon melatonin.
- Gangguan metabolisme glukosa ke otak.
- Penekanan terhadap protein.

Pada tahun 2011, 30 ilmuwan internasional yang bergabung dalam International Agency for Research on Cancer (IARC) menyimpulkan hasil studi mereka bahwa terdapat hubungan antara paparan radiasi elektromagnetik ponsel dengan Glioma (suatu bentuk kanker atau keganasan dari sistem saraf pusat). Sehingga pada tahun yang sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan radiasi frekuensi radio sebagai kemungkinan karsinogen

(zat penyebab kanker) 2B.

Baru-baru ini Program Toksikologi Nasional (National Toxicology Program) di AS senilai \$25 juta menyimpulkan bahwa radiasi frekuensi radio dari jenis yang saat ini digunakan oleh telepon seluler dapat menyebabkan kanker.

Peluang terjadi kanker telah naik hingga 3-4 kali lipat lebih banyak, ketika seseorang tinggal dekat BTS tower atau GSM tower, saat memakai 3G atau 4G biasa. Jadi bisa bayangkan apa yang bisa terjadi pada banyak orang apabila 5G sudah di implementasikan yang intensitasnya 10 bahkan 30 kali lipat?

Pakar frekuensi radio internasional Profesor Dariusz Leszczynski dari Universitas Helsinki dalam kuliah umum di Universitas Griffith, Brisbane pada (17/8/2017) silam, memperingatkan tentang efek kesehatan 5G. Penelitian yang dipublikasikan pada situs lembaga tersebut mengatakan bahwa teknologi 5G bisa menembus kulit hingga kedalaman 8 milimeter.

Profesor Leszczynski adalah satu dari 30 pakar di tim penelitian internasional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2011 yang mengklasifikasikan semua emisi frekuensi radio sebagai kemungkinan karsinogen. Mungkin kita berpikir bahwa teknologi pemancar berdaya rendah akan aman, tidak ada masalah, namun tiga puluh tahun kemudian nampaknya itu mungkin bersifat karsinogenik.

Beberapa studi yang lain pada binatang juga mengungkapkan bahwa teknologi 5G memiliki dampak diantarnya:

KULIT. Karena penetrasinya yang dalam maka kemungkinan lebih banyak terjadi penyakit kulit yang disertai rasa sakit pada manusia.

MATA. Sebuah studi tahun 1994 menemukan bahwa paparan radiasi gelombang mikro milimeter (MMW) yang rendah menghasilkan kekaburan lensa mata pada tikus, yang terkait dengan munculnya katarak.

JANTUNG. Sebuah studi di Rusia pada 1992 lalu telah menemukan bahwa frekuensi dalam kisaran 53-78 GHz (yang diusulkan 5G untuk digunakan) berdampak pada variabilitas detak jantung (indikator stres) pada tikus dan perubahan denyut jantung (aritmia) pada

katak. Karenanya bahwa kisaran gelombang yang diusulkan dipakai untuk 5G dapat menyebabkan serangan jantung pada manusia.

SISTEM KEKEBALAN TUBUH.

Sebuah penelitian di Rusia tahun 2002 meneliti efek paparan radiasi gelombang mikro 42 HGz pada darah tikus sehat. Disimpulkan bahwa "paparan seluruh tubuh tikus yang sehat terhadap EHF EMR intensitas rendah memiliki efek mendalam pada indeks kekebalan nonspesifik (*nonspecific immunity*)". Artinya memungkinkan penurunan daya tahan tubuh manusia terhadap serangan infeksi bakteri, virus dsb.

TINGKAT PERTUMBUHAN

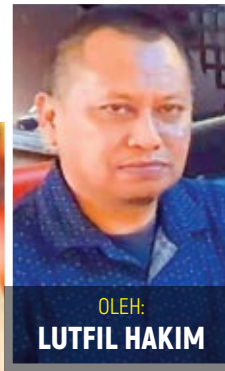
SEL. Bahwa teknologi ini dikhawatirkan dapat merubah sifat dan aktivitas suatu sel sehingga menimbulkan mutasi genetik.

Hasil hasil temuan di atas masih perlu dibuktikan kembali dengan lebih banyak studi. Akan tetapi sudah bisa menjadi suatu kewaspadaan bagi kita untuk lebih berhati-hati berinteraksi dengan ponsel atau teknologi 5G pada khususnya.

Lalu bagaimana cara mencegah dampak negatif radiasi ponsel secara umum?

- Gunakan ponsel hanya bila dibutuhkan.
- Pakai *hands-free* atau pengeras suara ketika menerima panggilan. Saat menelepon memakai *hands-free*, jangan menaruh *handphone* pada saku celana atau saku baju.
- Jauhkan *handphone* dari tubuh ketika tidak digunakan.
- Hanya gunakan *handphone* saat sinyal kuat. Sinyal lemah membuat *handphone* menggunakan lebih banyak energi untuk berkomunikasi.
- Disarankan untuk berkomunikasi melalui pesan singkat ketimbang telepon untuk mengurangi pajanan radiasi.
- Jangan membiarkan anak berlama-lama bermain *handphone*. Gunakan seperlunya saja.

Semua teknologi memiliki dua sisi. Tak ada yang sepenuhnya baik ataupun buruk. Kelebihannya tentu saja membawa keburukan di sisi yang lain. Semoga kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi. ■



DIPLOMASI SAWIT

PEMERINTAH Orde Baru pernah membuat kebijakan tidak lazim pada 1996, yakni melakukan barter barang dengan pemerintah Thailand. Dua pesawat CN-235 buatan IPTN ditukar 110.000 ton beras ketan. Barter dua jenis barang tidak sebanding itu sontak menjadi gunjingan sinis banyak pihak. Ratusan insinyur di IPTN dianggap sama nilainya dengan petani beras ketan di Thailand.

Padahal di balik kebijakan tersebut, Pemerintah Orba berpikir praktis. Jika dua unit pesawat CN-235 buatan IPTN itu diperdagangkan secara konvensional, maka Indonesia akan mengantongi uang US\$34 juta. Tapi akan dikenakan pajak. Sementara impor beras ketan (Thailand) – sebagaimana biasa dilakukan, juga membutuhkan Dolar AS dan kena pajak. Dengan pola barter, pemerintah tidak lagi direpotkan soal kurs dan pajak. Inilah diplomasi dagang.

Istilah barter, menurut banyak versi, adalah bentuk awal perdagangan tradisional. Bahkan praktek barter telah ditemukan dalam sejarah peradaban manusia sejak 6000 SM. Namun pada perkembangannya, istilah *barter* tidak hanya menunjuk pada pertukaran barang dan jasa. Tapi juga pada praktek pertukaran kepentingan lainnya. Misal, barter sandera. Barter politik. Barter hutang dan konsesi. Bahkan ada juga barter ancaman.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, pernah mengancam perang dagang kepada Indonesia – berupa *special safe guard duty* (SSG) atas produk olahan kopi dan *Crude Palm Oil* (CPO) yang diekspor ke Filipina. Tapi pemerintah tidak tinggal diam. Strategi diplomasi terus dilancarkan. Ancaman Filipina akhirnya melunak setelah di-barter kebijakan pembebasan bea masuk ekspor *pisang cavendish* Filipina ke Indonesia.

Lantas bagaimana cara menghadapi

ancaman Uni Eropa (UE) terhadap CPO Indonesia – khususnya untuk bahan baku *biofuel* atau biodiesel yang ditetapkan nol persen dari unsur minyak sawit – yang pemberlakuannya dijadwalkan mulai 2021. Ancaman UE ini sebagai putusan turunan dari hasil *Resolusi Sawit* oleh Parlemen UE.

Padahal UE merupakan salah satu pasar CPO RI yang potensial. Periode Januari-September 2019 ekspor CPO ke UE mencapai 3,29 juta ton. Itu pun sudah menyusut 11,78% dari tahun sebelumnya. Tidak mudah (memang) menghadapinya. Karena hampir mayoritas negara-negara yang tergabung di UE menghendaki segera diberlakukannya *Resolusi Sawit*. Terutama (yang paling ngotot) Norwegia.

Dibutuhkan diplomasi yang bagus, serta seimbang dalam merespon ancaman UE. Karena negara-negara di kawasan *Benua Biru* itu lebih berpengalaman dalam strategi dagang. Bahkan keputusan luar

negerinya sering dipakai sebagai contoh oleh negara lain. Disinilah pentingnya pemerintah segera menyelesaikan perundingan dengan UE, termasuk menuntaskan masalah CPO – agar keputusan UE itu tidak dicontoh oleh negara pembeli CPO lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu sudah mencoba melakukan lobi-lobi ke UE – tapi hasilnya belum juga kelihatan. Termasuk melobi empat negara anggota UE – yang dikenal sebagai *Visegrad Four* (V4) – yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia, yakni Republik Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia. Tapi sejauh ini belum juga nampak hasilnya. Negara – negara V4 itu tergolong lunak terkait sanksi UE atas CPO RI. Pemerintah juga pernah meminta bantuan Spanyol dalam urusan yang sama.

Selain itu, pemerintah sudah berulang kali menawarkan kepada UE agar permasalahan sawit bisa dibahas pada forum perundingan *Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA) secara tuntas. Tapi respon positif dari pihak UE belum juga kelihatan.

Bahkan pada perundingan IEU CEPA putaran ke – 9 yang digelar di Brussel, Belgia pada 2-6 Desember 2019 lalu, ketua juru runding EU Helena König secara tegas mengatakan bahwa negara – negara yang tergabung di UE kini semakin fokus pada agenda ‘hijau’.

Di hadapan delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Wamendag Jerry Sambuaga, Helena König mengatakan bahwa pihak UE sangat memahami pentingnya CPO bagi perekonomian Indonesia. Namun Helena juga menegaskan bahwa Parlemen Eropa dan Kabinet UE kini sedang gencar – gencarnya membangun program ‘hijau’ dan agenda ‘hijau’, baik secara internal maupun eksternal. Artinya statemen Helena König itu bisa dimaknai bahwa UE tetap bergeming terhadap perkara sawit Indonesia.

Pada sambutannya, Wamendag Jerry Sambuaga sempat menyinggung soal upaya Indonesia membawa persoalan CPO ke WTO – yang di klaimnya sebagai bagian dari hak setiap negara dalam memanfaatkan skema perundingan internasional. Jerry menekankan bahwa posisi UE sangat penting bagi Indonesia, dan CEPA adalah forum terbaik untuk melanggengkan hubungan ekonomi kedua pihak, khususnya untuk akses pasar dan investasi. Namun Helena König lagi – lagi menjawab sambutan Jerry Sambuaga secara normatif.

Sebagaimana diketahui, pemerintah

Indonesia telah resmi mengajukan gugatan terhadap UE ke WTO, terkait kebijakan blok ekonomi atas produk kelapa sawit. Gugatan diajukan melalui Peraturan Tetap RI (PTRI) di Jenewa, Swiss pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Regulation* yang dikeluarkan UE.

Memang, gugatan melalui WTO bukan jalan terakhir. Pemerintah terus memutar otak untuk mencari cara terbaik. Agar ancaman UE atas CPO RI bisa dibatalkan. Tapi di dalam negeri (Indonesia) sendiri – pemerintah juga pusing menghadapi ‘tekanan’ beberapa pihak yang meminta segera dituntaskannya persoalan sawit di perundingan IEU CEPA. Karena jika tidak tuntas, dikhawatirkan bisa mengganggu komunikasi bisnis komoditas lain non-sawit. Bahkan seorang pejabat secara jelas mengatakan, persoalan sawit jangan sampai jadi ‘sandera’ bagi lancarnya komunikasi bisnis non-sawit dengan UE.

Tapi tidak sedikit pula pihak yang mendorong pemerintah untuk ‘melawan’ sikap diskriminasi UE atas sawit Indonesia, termasuk suara dari DPR RI. Adanya dua arus dorongan yang berbeda di dalam negeri ini pun makin menyulitkan posisi pemerintah. Namun demikian gaung nasionalisme membela sawit Indonesia nampaknya lebih kuat ketimbang ‘kelompok non-sawit’.

Presiden Jokowi sendiri bahkan sudah menunjukkan sikap terusiknya atas sanksi UE kepada sawit Indonesia. Sampai Presiden sempat melontarkan kalimat: “*Jangan main-main sama CPO RI. Indonesia tidak akan tinggal diam menyikapi diskriminasi ini.*” Bagi ukuran orang Jawa, statemen Presiden itu tergolong keras.

Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah meradang dan sempat memberikan sinyal ancaman keras kepada UE: “*Kami ingatkan ya, Indonesia is the biggest buyer Airbus dan masih ada order 200 unit pesawat di sana,*” kata Airlangga (yang juga Ketua Partai Golkar) – sesaat setelah mendampingi Presiden RI menerima kunjungan delegasi bisnis UE di Istana Kepresidenan, Jakarta (28/11/19).

Nada keras Menko Perekonomian itu terkesan menjadi semacam tawaran “barter boikot” atau “barter ancaman”. Bisa saja UE ‘keder’ atas ancaman itu, mengingat markas *Airbus* yang berbasis di Toulouse (Perancis) *nota-bene* bagian penting dari UE. Banyak pihak yang memuji statemen keras Airlangga. Namun ada juga

pihak yang merespon negatif. Karena kalau ‘barter ancaman boikot’ itu ditanggapi serius oleh UE, ke depan komunikasi dagang kedua pihak berpotensi terganggu.

Tapi ada juga pihak yang secara gamblang justru mengancam pemerintah agar menghentikan perundingan IEU CEPA jika masalah sawit tidak *clear*. Disinilah urgensi pemerintah untuk merumuskan strategi diplomasi sawit secara ideal, agar solusinya bisa diterima semua pihak. Masih ada waktu sampai awal 2021 untuk menawarkan solusi yang seimbang kepada UE.

Memang sejauh ini (dalam beberapa tahun) perdagangan dengan UE mencatat surplus bagi Indonesia. Ekspor Indonesia ke UE pada 2018, misalnya, mencapai US\$ 17,1 miliar. Sedangkan impor dari UE sebesar US\$ 14,1 miliar, atau naik 8,29%. Namun sebagai mitra dagang, UE tergolong rewel dan ribet. Banyak persyaratan yang dilekakan. Bahkan ada persyaratan yang tidak terkait langsung dengan bisnis itu sendiri. Misalnya soal sistem peradilan, politik belanja negara, perlindungan usaha kecil menengah (UKM), hak kekayaan intelektual, hingga soal – soal usaha yang dilakoni BUMN.

Sejauh ini, perundingan IEU CEPA putaran ke-9 sudah berhasil membahas soal-soal yang menjadi sebagian persyaratan, diantaranya soal instrumen pengamanan perdagangan, prosedur bea cukai & fasilitasi perdagangan, serta sanitasi dan fitosanitasi. Sederet persyaratan itu ditinjau melalui tiga perspektif, yakni isu teknis, kebijakan, dan perspektif politik. Tapi masalah sawit sama sekali tidak disinggung lebih jauh.

Di sisi lain, Indonesia

juga sudah menyelesaikan sejumlah persyaratan perdagangan dalam perspektif *World Trade Organization* (WTO) dan *Regional Comprehensive Eco-*

conomic Partnership (RCEP) – sebagai upaya menunjukkan kepada UE bahwa Indonesia sudah *clear* untuk urusan persyaratan perdagangan internasional. Juga dalam perspektif *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *European Free Trade Association* (EFTA)

Namun untuk urusan sawit, pihak UE nampaknya memang bebal dan bergeming. Tidak sedikit pun UE bergeser dari keputusan pleno yang mengacu kepada *resolusi Sawit* oleh Parlemen Eropa. Sehingga wajar jika Indonesia menuduh UE telah melanggar kesepakatan skema GATT dan WTO. Tapi pihak UE membantah dan secara tegas mengatakan keputusannya atas sawit Indonesia tidak melanggar skema GATT dan tidak ada hubungannya dengan WTO.

Mereka mengklaim keputusannya itu lebih sebagai sikap konsistensi UE terkait *climate change*. Baik bagi internal maupun eksternal. Dari situlah kenapa parlemen UE merevisi *renewable energy directive* (RED/ RED I menjadi RED II) -- yang salah satunya menetapkan bahan baku biodiesel tidak mengandung (nol persen) CPO. Keputusan ini juga akan dijadikan dasar revisi UU Konsumen UE yang akan diberlakukan mulai awal 2021.

UE menilai biodiesel konvensional tidak berkontribusi dalam menekan emisi gas rumah kaca, karena terkait masalah perubahan penggunaan lahan tidak langsung (*indirect land use change*/ILUC). Budidaya sawit untuk bahan dasar biodiesel dituduh oleh UE telah menggantikan fungsi hutan, dan ladang sawit terus meluas. Persoalan ini dianggap serius oleh UE, sehingga parlemen dan kabinet UE memutuskan nol persen CPO pada bahan baku biofuel.

Selain isu deforestasi dan isu lingkungan di atas, UE juga kerap mengkampanyekan bahwa mengonsumsi minyak sawit sebagai perilaku tidak sehat, karena mengandung kolesterol tinggi. Juga menuding penyelenggaraan kebun sawit telah menisbikan aspek kemanusiaan pada konteks perburuan perempuan dan anak – anak. Juga dituding sebagai upaya pembakaran hutan yang berakibat pada penghilangan sejumlah spesies hewan hutan.

KONSTRUKSI ARGUMEN

Pada konteks deforestasi, konstitusi Indonesia sebenarnya telah mengatur melalui UU No.41 TH 1999 tentang Kehutanan, bahwa Indonesia konsisten mempertahankan luasan hutan minimal 30% dari total luas daratan – sesuai konvensi internasional.

Nah, sejauh ini luas hutan Indonesia masih di kisaran 68% dari luas daratan. Artinya areal penggunaan lain (APL/selain hutan) masih 32%, atau sekitar 61 juta ha dari total daratan 190 juta ha. Artinya secara konstribusi pemakaian untuk APL masih “boleh” ditambah sekitar 38% lagi.

Dari 32% lahan APL (61 juta ha) tersebut, diantaranya ada lahan sawit nasional yang hanya 14 juta ha. Artinya masih sangat jauh api dari panggang. Apalagi sebagian besar APL diperuntukkan bagi tanaman pangan. Artinya, dalam perspektif UU tentang Kehutanan, seharusnya tidak ada istilah deforestasi – karena hutan Indonesia masih sangat luas (di atas 30% dari daratan).

Persoalannya, UE dalam memaknai terminologi deforestasi menggunakan ukuran *Food and Agriculture Organization* (FAO - PBB) –, dimana setiap batang pohon yang ditebang dengan tinggi di atas 5 meter di areal minimal 0,5 ha, maka itulah deforestasi. Di sinilah persepsinya tidak sama.

Padahal penetapan hutan minimal 30% sesuai UU No.41 TH 1999 sudah mengacu kepada kesepakatan dunia tentang *climate change*. Sehingga tuduhan budidaya sawit sebagai *backbone* deforestasi di Indonesia – sebagaimana dituduhkan UE, sama sekali tidak benar. Harusnya UE bersikap fair melihat fakta ini.

Begitu juga soal tuduhan miring lain, misal soal mempekerjakan anak di bawah umur. Nampaknya UE gagal memahami antara tindakan ilegal vs legal formal. Bahwa ada oknum yang mempekerjakan anak di bawah umur, mungkin saja terjadi. Tapi itu lebih kepada oknum. Prosentasenya kecil. Di mana pun selalu ada yang namanya oknum. Tapi secara legal formal Indonesia tegas melarang mempekerjakan anak di bawah umur. Bukan hanya di kebun sawit, tapi di semua sektor. Bahkan ada dua Undang – undang yang mengaturnya.

Seluruh buruh di perkebunan sudah terintegrasi datanya dengan Dinas Tenaga Kerja (daerah) setempat. Artinya bisa diketahui jika ada anak di bawah umur yang dipekerjakan. Secara legal formal, Pasal 68 UU No. 13 TH 2003 tentang Ketenagakerjaan tegas menyebutkan, bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun. Pelanggarnya bisa dikenakan sanksi hukuman 4 tahun penjara.

Selain itu, ada juga konstitusi yakni UU No.23 TH 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas juga melarang anak dibawah umur untuk dipekerjakan. Per-

sahaan yang melanggar ketentuan ini bisa dikenakan sanksi hukuman 10 tahun penjara. Artinya sudah cukup jelas bahwa Indonesia anti mempekerjakan anak di bawah umur. Bahkan ada dua Undang – undang yang mengaturnya.

Sehingga argumen yang dibangun UE dalam mendiskriminasi sawit Indonesia sejati-dasarnya sangatlah sumir. Semua alasan terbantahkan. Banyak pihak mengatakan bahwa UE telah berbohong untuk menutupi kepentingan bisnisnya yang selama ini tertekan oleh hadirnya CPO RI di kawasan Eropa, yakni bisnis minyak nabati lainnya – seperti *rapeseed oil* dan minyak bunga matahari. Komoditas CPO dinilai telah mengambil porsi banyak pada segmen pasar minyak nabati di pasar UE.

Padahal jika UE memahami sedikit saja hasil banyak penelitian, justru CPO untuk bahan industri membutuhkan *rapeseed oil* dan minyak bunga matahari sebagai komplemen-nya. Artinya membanjirnya CPO ke pasar Eropa, terutama yang untuk bahan industri, justru bisa menumbuhkan pasar minyak nabati lainnya (*rapeseed oil* dan minyak bunga matahari).

Hanya saja yang dijadikan alasan di depan oleh UE adalah *palm oil* sebagai bahan baku biodiesel, sehingga diputuskan nol persen (*no palm oil*) pada biofuel. Dan keputusan ini akan dimasukkan pada revisi UU Konsumen UE yang akan diberlakukan mulai 2021. Di sinilah letak perlakuan diskriminasi UE atas CPO Indonesia.

Namun demikian, pemerintah sebaiknya tetap berhati – hati dalam bernegosiasi dengan UE, mengingat posisi kawasan ini cukup strategis secara ekonomi bagi pasar ekspor Indonesia. Bukan hanya CPO, tapi juga komoditas lain. Strategi komunikasi sebaiknya tetap mengedepankan aspek diplomasi ketimbang “barter ancaman” dalam bentuk aksi boikot barang produk UE.

Sinyal “ancaman” keras ke UE seperti disampaikan Menko Perekonomian – yang dikaitkan dengan pemesanan *Airbus* – sebaiknya tidak diulang. Sebab jika ancaman semacam itu ditanggapi serius oleh UE, justru berpotensi makin melebarkan jarak hubungan ekonomi Indonesia – Eropa. Bakal makin banyak kerugian ekonomi yang ditanggung Indonesia.

Memang, untuk gengsi bangsa, *state-men* Airlangga Hartarto itu cukup membanggakan. Rasa nasionalismenya tinggi. Tapi untuk kepentingan diplomasi dagang, sebaiknya dihindari pemilihan diksi (kata) yang mengarah kepada kesan “menant-

ang” dengan cara “barter boikot”.

Bahkan jika perlu, tawarannya justru dibalik, yakni menukar sawit Indonesia dengan *Airbus* – sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Orba dengan Thailand pada 1996 – yakni menukar pesawat buatan IPTN dengan beras ketan. Konon industri penerbangan Indonesia butuh tambahan 1000 unit pesawat pada 2030. Sementara potensi CPO Indonesia sangat besar. Sehingga klop jika dibarter. Jika UE tidak butuh CPO hasil barter dengan pesawat *Airbus*, kan bisa dijual lagi ke negara lain yang membutuhkan CPO.

Prinsipnya aneka strategi diplomasi perlu terus dicoba untuk menaklukkan ancaman UE atas CPO Indonesia. Merendah tidak berarti kalah. Hampir tidak ada dalam teori diplomasi yang paling efektif – selain dengan cara dan sikap “merendah”. Misalnya dalam konteks tuduhan deforestasi, bisa saja Indonesia merendah dan meminta bantuan kepada UE untuk bersama-sama mengawasi pelaku usaha sawit yang “nakal”. Artinya hanya kepada sawit milik pengusaha nakal saja yang boleh diboikot oleh UE.

Kemudian, untuk sementara waktu, pastikan kepada UE bahwa luasan ladang kebun sawit tidak akan bertambah, dan bisa diawasi secara bersama-sama dengan UE. Artinya untuk sementara waktu tetap bertahan saja di luasan yang ada. Toh jumlahnya sudah cukup besar, yakni sekitar 14 juta ha dengan produksi pada 2019 (data Gapki) berpotensi menyentuh angka 53 juta ton.

Selain itu, perlu juga memberikan semacam insentif bagi produk ekspor UE ke Indonesia, sebagaimana pernah diberikan Indonesia kepada Filipina, dengan ukuran yang seimbang. Juga melengkapi semua persyaratan yang menjadi kemauan UE pada konteks dagang melalui perundingan yang efektif via IEU CEPA. Strategi melakukan klien dengan baik sejatinya merupakan diplomasi yang ideal. Bukan dengan otot (boikot).

Kita harus bertahan dengan kesabaran. Bagaimanapun UE tetap butuh CPO Indonesia. Baik untuk kepentingan bahan baku biofuel di masa depan – mengingat potensi minyak nabati pengganti bahan bakar biodiesel di UE juga akan ada batasnya. Termasuk kebutuhan UE atas CPO untuk kepentingan bahan baku industri (makanan,

kosmetik, obat-obatan, dll).

Selain itu, perlu juga menjadi pertimbangan, bahwa ke depan kondisi ekonomi UE masih nampak berat akibat hegemoni AS dan China pada eko-sistem perekonomian dunia, dan ini bisa menjadi momentum baik bagi Indonesia untuk terus memperkuat posisi tawar di UE.

Menuntaskan ganjalan komunikasi bisnis dengan UE adalah keniscayaan. Harus segera diselesaikan. Karena banyak keputusan UE yang sering menjadi *benchmarking* bagi negara lain, apalagi untuk masalah sawit. Meski UE bukanlah satu-satunya pembeli CPO RI, tapi negara lain bisa mencontoh cara yang sama untuk menekan

JIKA PEMERINTAH BISA MEMAKSIMALKAN TOTAL PRODUKSI SAWIT NASIONAL YANG MENCAPAI 50 JUTA TON LEBIH PER TAHUN SEBAGAI BAHAN RENEWABLE ENERGY DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI, MAKA EKONOMI NASIONAL AKAN LEBIH KUAT – KARENA IMPORTASI SOLAR AKAN TERUS BERKURANG DAN EKSPOR HASIL INDUSTRI BERBAHAN CPO TERUS NAIK.



Indonesia. Kabarinya beberapa negara pembeli besar sawit Indonesia seperti AS, India, Pakistan, Jepang, dan lainnya - sudah mulai coba-coba ikutan mempertanyakan soal isu lingkungan terkait persawitan nasional.

Pemerintah harus ekstra kerja keras mencari solusi permasalahan sawit Indonesia. Mengingat komoditas ini (CPO) memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Secara makro, CPO merupakan penyumbang devisa terbesar. Sejak 10 tahun terakhir nilai ekspornya terus naik. Pada 2010 nilai ekspor CPO mencapai US\$16,3 miliar dan pada 2018 mencapai US\$ 17,89 miliar. Bahkan pernah mencapai US\$21,6 miliar pada 2011.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, industri CPO Indonesia mempekerjakan sekitar 6 juta naker. Belum termasuk tenaga kerja di sektor hilir distribusi dan industri olahan berbahan CPO. Juga naker di sektor

hulu yakni di industri alat berat dan alat perlengkapan lain kebun sawit, serta mesin industri CPO. Artinya keberadaan industri CPO juga membantu mengangkat daya beli masyarakat. Perputaran uang di sektor ini juga tinggi, sehingga juga membantu sektor perbankan nasional.

Sawit Indonesia juga menjadi salah satu *backbond* kedaulatan energi nasional. Sejauh ini kebutuhan BBM solar untuk transportasi dan mesin pabrik lebih mengandalkan impor minyak berbasis fosil yang memakan banyak devisa. Pemerintah sudah berupaya melakukan substitusi (*renewable energy*) dengan memanfaatkan CPO sebagai campuran solar dengan istilah mandatori B-20, artinya ada unsur CPO sebesar 20% pada setiap solar yang diperjual-belikan. Kemudian dinaikkan menjadi 30% (B-30) pada 2020.

Pada mandatori pemerintah untuk renewable CPO sudah ditetapkan 6,4 juta ton pada 2015 dan sebesar 15,2 juta ton pada 2020. Kalau *renewable policy* itu berjalan sesuai skema, seharusnya ada efisiensi devisa sebesar US\$5,6 miliar sejak 2015 dan menjadi US\$16,7 miliar pada 2020. Mandatori ini perlu terus dikembangkan hingga ke angka paling maksimal agar efisiensi devisa bisa terus ditingkatkan.

Selain itu, produk *out put* CPO juga menjadi lokomotif industri nasional sebagai bahan baku industri obat-obatan, makanan, kosmetik, dll hingga pengolahan biomassa limbah sawit menjadi produk – produk bernilai tambah. Maka itu perlu terus dikembangkan teknologi penelitian untuk hilirisasi produk sawit dan pengembangan industrinya di dalam negeri, sehingga nantinya yang diekspor itu bukan CPO, tapi industri berbahan CPO.

Jika pemerintah bisa memaksimalkan total produksi sawit nasional yang mencapai 50 juta ton lebih per tahun sebagai bahan *renewable energy* dan pengembangan industri, maka ekonomi nasional akan lebih kuat – karena importasi solar akan terus berkurang dan ekspor hasil industri berbahan CPO terus naik. Sehingga CPO Indonesia tidak lagi menghadapi sanksi diskriminasi seperti dilakukan UE saat ini, karena seluruh hasil CPO berubah wajah menjadi komoditas turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Tidak ada kata mustahil jika semua pihak bersungguh-sungguh. Bismillah. ■LH

Redaksi PTPN X-mag menerima opini serta saran dan kritik membangun dari seluruh karyawan. Tulis opini Anda pada kertas A4 spasi 1,5 maksimal 6 halaman dan sertakan pas foto. Kirim melalui email ke cindhyalarashati91@gmail.com dan suraidafirda@gmail.com.

OPINI YANG DIMUAT AKAN MENDAPATKAN APRESIASI

■ **HARSYATRIA FITRIO**

ASISTEN URUSAN PERENCANAAN STRATEGIK DAN PENGEMBANGAN USAHA

GCG Harus Diterapkan Sebagai Budaya Kerja



SKOR GCG yang diperoleh PTPN X secara corporate dari hasil assesment kemarin sudah cukup baik yakni 84.9. Skor ini tentu bisa ditingkatkan lagi. Salah satunya dengan penambahan jenis layanan pelaporan dengan kotak saran pengaduan di masing-masing bagian sehingga whistle blowing system berjalan lebih efektif.

Yang tak kalah penting lagi, kesadaran implementasi atau pelaksanaan tata kelola perusahaan atau GCG oleh setiap personel secara langsung di masing-masing bagian dan menjadikan hal tersebut sebagai budaya kerja bukan hanya semata mata pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Karena pada hakikat GCG sendiri adalah sebuah budaya kerja suatu organisasi atau perusahaan sehingga pelaksanaannya sendiri merupakan cerminan perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. ■

YUSUF SYAFRIANSYAH RACHMAN

ASISTEN URUSAN PENGEMBANGAN ASET

Terapkan GCG dengan Baik pada Program Optimalisasi Aset



PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X sebagai salah satu perusahaan yang berkembang wajib melaksanakan seluruh proses bisnis perusahaan dengan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Proses bisnis perusahaan yang dilakukan dengan GCG merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses pengendalian

perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan seluruh *stakeholders*.

PTPN X khususnya di Bagian Hukum & Pengembangan Aset telah membuat SOP kerjasama pemanfaatan aset, SOP penghapusan aset, dan penjualan barang bekas. Pembuatan SOP tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan tata kelola yang baik dalam optimalisasi aset milik PTPN X. Sehingga, optimalisasi aset dapat memberikan pendapatan yang berkesinambungan bagi PTPN X secara transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.

Selanjutnya, saya berharap PTPN X dapat lebih menggiatkan penerapan GCG pada setiap proses bisnis perusahaan, khususnya bagian proses bisnis utama karena dengan adanya GCG akan terbentuk pola kerja yang transparan, bersih, dan professional. ■

■ **SITI MUTHOHAROH** | STAF BAGIAN SDM PTPN X

Perlu Sosialisasi dan Teladan yang Nyata



MENURUT saya, PTPN X telah berusaha secara nyata dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan perusahaan. Walaupun begitu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terutama dalam sistem penerapannya.

Saat perusahaan sudah berkomitmen dan konsisten dalam penerapan GCG tetapi karyawan tidak melakukan maka akan menimbulkan

ketidakseimbangan. Misalnya berperilaku tidak sesuai dengan *code of conduct*.

Mungkin kedepannya perlu adanya sosialisasi berkelanjutan dan teladan yang nyata dari pimpinan agar Pedoman Tata Kelola Perusahaan dapat diimplementasikan dalam praktek pengelolaan perusahaan sehari-hari sehingga bisa menjadi suatu budaya kerja. ■

KANTOR PUSAT:

Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
<http://www.ptpn10.com> | email: contact@ptpn10.com

KANTOR PERWAKILAN:

Perumahan Taman Gandaria Valley
Jl Taman Gandaria Blok F/12A, Telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

UNIT GULA

PG Watoetoelis

Ds. Temu, Kec. Prambon, Sidoarjo 61262
Telepon: 031-8971007, 8972383 | Fax: 031-8970079
email: pg.watoetoelis@ptpn10.co.id

PG Toelangan

Ds. Tulangan, Kec. Tulangan, Sidoarjo 61273
Telepon: 031-8851002 | Fax: 031-8851001
email: pg.toelangan@ptpn10.co.id

PG Kremboong

Ds. Krembung, Kec. Krembung, Sidoarjo 61275
Telepon: 031-8851609, 8851315 | Fax: 031-8151661
email: pg.kremboong@ptpn10.co.id

PG Gempolkrep

Ds. Gempolkerep, Kec. Gedeg, Mojokerto 61302
Telepon: 0321-362111, 362114 | Fax: 0321-362414
email: pg.gempolkrep@ptpn10.co.id

PG Djombang Baru

Jl. Panglima Sudirman No.1 Jombang 61417
Telepon: 0321-861311 | Fax: 0321-866373
email: pg.djombangbaru@ptpn10.co.id

PG Tjoekir

Ds. Cukir, Kec. Diwek, Jombang 61471
Telepon: 0321-861441 | Fax: 0321-868600
email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id

PG Lestari

Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo, Nganjuk 64391
Telepon: 0358-552468, 551439 | Fax: 0358-552468
email: pg.lestari@ptpn10.co.id

PG Meritjan

Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto, Kediri 64102
Telepon: 0354-771619, 773649 | Fax: 0354-773651
email: pg.meritjan@ptpn10.co.id

PG Pesantren Baru

Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren, Kediri 64131
Kotak Pos 6 | Telepon: 0354-684610 | Fax: 0354-686538
website: <http://www.pesantrenbaru.co.cc>
email: pg.pesantrenbaru@ptpn10.co.id

PG Ngadiredjo

Ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. Tromolpos 5
Telepon: 0354-479700 | Fax: 0354-477178
email: pg.ngadiredjo@ptpn10.co.id

PG Modjopanggoong

Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungagung 66261
Telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126
email: pg.modjopangong@ptpn10.co.id

UNIT TEMBAKAU

Kebun Kertosari

Jl. A Yani No. 688 Pakusari, Jember 68181
Telepon: 0331-334177 | Fax: 0331-332854
email: kt.kertosari@ptpn10.co.id

Kebun Ajong Gayasan

Jl. MH Thamrin No.143 Ajung, Jember 68175
Telepon: 0331-321501, 331058 | Fax: 0331-335145
email: kt.ajong@ptpn10.co.id

Kebun Kebonarum / Gayampurit / Wedhibirit

Jl. Pemuda Selatan No. 225, Klaten 57411
Telepon: 0272-321806, 320583, 321252 | Fax: 0272-322203
email: kt.klaten@ptpn10.co.id

UNIT USAHA LAIN:

Unit Industri Bobbin

Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 68102
Telepon: 0331-540205 | Fax: 0331-540407

ANAK PERUSAHAAN

PT Dasaplast Nusantara

Jl Raya Pecangaan No 03 Jepara | Jawa Tengah
Telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205

PT Nusantara Medika Utama

Kantor Direksi

Jl. Hayam Wuruk No. 88, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-328557, 390988 | Fax: 0321-395117

Rumah Sakit Gatoel

Jl. Raden Wijaya No. 56, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-321681, 322329 | Fax: 0321-321684

Rumah Sakit Toeloengredjo

Jl. A Yani No.25 Pare - Kediri 64212
Telepon: 0354-391047, 391145 | Fax: 0354-3392883

Rumah Sakit Perkebunan (RSP)

Jl. Bedadung No.2 - Jember 68118
Telepon: 0331-487104, 487226 | Fax: 0331-485912

Rumah Sakit Medika Utama Blitar

Jl. Kusuma Bangsa, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171
Telepon: 0342-442555

PT Energi Agro Nusantara

Desa Gempolkerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
Telepon: 0321-360360 | Fax: 0321-363363

PT Mitratani Dua Tujuh

Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
Telepon: 0331-422222, 488881 | Fax: 0331-489456, 489457



PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia

Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167

www.ptpn10.co.id

BUMN
Hadir untuk negeri



Mengucapkan

Selamat Natal 2019 & Tahun Baru 2020

PTPN X GROUP



PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA
RUMAH SAKIT & KLINIK KESEHATAN



PT DASAPLAST NUSANTARA
PLASTIC BAG & FLEXIBLE PACKAGING



PT MITRATANI DUA TUJUH
EDAMAME & OKRA



PT ENERGI AGRO NUSANTARA
BIOETHANOL